

**TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)**

**PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN
PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS
KALIMANTAN TENGAH**



Disusun oleh:

**REGINA MARIA
00.24.003**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
ITN MALANG**

**JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2009**

TIKAS AKHIR
(187181)

PERHIMPATAN TEKNIK DAN TEKNOLOGI
KEMUKAAN KEMUKAAN
PERKOTAAN KUALA KAPAS
KALIMANTAN TENGAH

MILIK
PERPUSTAKAAN
ITN MALANG

00.24.00

00.24.00
00.24.00

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN
2008

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KUALA KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH

Disusun Oleh :

Nama : REGINA MARIA
Nim : 00.24.003

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jenjang Strata Satu (S1)
Di
Jurusan Teknik Planologi
Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

Dinyatakan Lulus Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Pada Hari : Sabtu
Tanggal : 14 Maret 2009
Dengan Nilai :

Anggota Penguji :

Penguji I

(Ir. Agustina Nurul Hidayati., MT)

Penguji II

(Mira Setiawati, ST.)

Penguji III

(Fanita Cahyaning A, ST.)

Pembimbing I

(Ir. Wahyu Hidayat, MM, MBA)

Menyetujui :

Pembimbing II

(Ida Soewarni, ST)

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

(Ir. A. Agus Santoso, MT)

Ketua Jurusan

Teknik Planologi
FTSP-ITN Malang

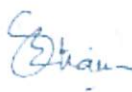
(Agung Witjaksono, ST, MTP)



BERITA ACARA SIDANG KOMPRES
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2009
Judul : Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh Perkotaan Kuala Kapuas
Nama : Regina Maria
Nim : 00.24.003.

No	Penguji	Pertanyaan, Masukan dan Saran	Tanggapan	Paraf
1	Ir.Agustina Nurul Hidayati.,MT	1. Perbaiki BAB I: tinjauan pustaka 1.5 pada sub bab nya : - 1.5.1. fokus pada pemukiman kumuh dan kajian daerah rawa - 1.5.2. program perbaikan pemukiman kumuh. Dan berikan kesimpulan akhir dari masing-masing sub bab Serta sub bab 1.6. landasan penelitian sehingga didapat rumusan variabel yang sesuai dengan karakteristik kekumuhan daerah rawa. 2. Bab II: Kebijakan pemukiman yang ada di Bab II digunakan untuk rekomendasi bab IV	a) 1.5.1. Pemukiman Kumuh: ▪ Definisi dan ciri-ciri rumah kampung, rumah liar dan rumah kumuh. ▪ Kajian kumuh (slum dan squater) ▪ Pengertian kumuh ▪ Karakteristik pemukiman kumuh ▪ Kajian daerah rawa b) Perbaikan pemukiman kumuh yang pernah dilakukan di Indonesia ▪ Program perbaikan kampung/ <i>Kampung Improvement Program</i> (KIP) ▪ Program peremajaan lingkungan kumuh Masukan	

2	Mira Setyawati A.,ST	1. Gambaran umum BAB II : lingkup perkotaan Kuala Kapuas dulu kemudian mengerucut menjadi lingkup lokasi studi. 2. Pada kepadatan penduduk satuannya di modifikasi baru diterapkan pada lokasi studi 3. Bedakan sarana dan prasarana 4. kelas interval di cek lagi 5. tata tulis tabel searah bolak balik	- Masukan dan saran - Masukan dan saran - Masukan dan saran - Masukan dan saran	
3	Fanita Cahyaning Arie, ST	1. Latar belakang : belum kelihatan jelas endingnya bahwa betapa pentingnya perbaikan pemukiman kumuh di Kuala Kapuas 2. rumusan masalah dibuat point dari masalah yang ada di lokasi studi 3. Sasaran di cek lagi 4. Topografi diganti sama kelerengan	- Masukan dan saran - Masukan dan saran - Masukan dan saran - Masukan dan saran	

Mengetahui :

Pembimbing I



Ir. Wahyu Hidayat.,MM.MBA

Pembimbing II



Ida Soewarni.,ST

Determination Of Slum Improvement Priority In Kuala Kapuas

ABSTRACT

The result of the previous identification indicated that the condition of the research location in Kuala Kapuas is categorized as slum. This categorization is on account of the characteristics of the location, such as the dense population, the disorganized settlements due to the jostling lifestyle, low life quality and minimum public order owing to the minimum earnings. In addition, the people are living at a swampy area which can lead to malady dissemination, especially when they have low awareness about cleanliness.

The implementation of slum improvement program in some cities in Indonesia has contained some issues is how to choose which slum is to be improved. The problem occurs as the condition and characteristics of slum in each city are different definition and handling towards each slum. One solution to handle the issue is by determining slum improvement priority in order to meet the requirements, especially the ones of the residents.

In Kuala Kapuas, slum improvement program cannot be realized yet because of financial insufficiency. From the situation, I would like to discover and determine the priority of which slum that will be improved. This priority determination is based on the criteria made by experts handling slum problems and is adjusted to the slum characteristics in Kuala Kapuas. The determination is started by determining to which criteria Kuala Kapuas slum characteristics belong; then, continued by choosing which slum will be improved.

Using Simple Qualifying and Process Hierarchy Analysis and basing the determination on factors that may influence the determination process lead the research to the quality of each village which results to the slum priority determination and slum improvement.

This research results to the order of slums that will be improved based on the priority, which hopefully can be a suggestion for the Kuala Kapuas slum improvement program implementation.

Key words : Slum, Improvement, Priority determination

ABSTRAKSI

PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN KUALA KAPUAS

Pada perkotaan Kuala Kapuas, berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi lokasi studi tergolong sebagai pemukiman kumuh. Hal ini disebabkan karena kondisi pemukiman tersebut memiliki ciri-ciri yang tampak seperti pemukiman yang padat, masyarakatnya hidup berdesakan dan berdempetan, sehingga terlihat semerawut, kemudian karena keterbatasan penghasilan, kemampuan mereka untuk meningkatkan mutu dan ketertiban lingkungan pun menjadi sangat kurang. Selain itu mereka bermukim di atas daerah rawa yang rentan terhadap munculnya berbagai penyakit akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan

Program perbaikan pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan diberbagai kota di Indonesia selama ini, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan masalah didalamnya. Masalah tersebut antara lain bagaimana memilih pemukiman kumuh yang akan diperbaiki. Hal ini mengingat bahwa kondisi dan karakteristik pemukiman kumuh disetiap kota berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan pada pendefinisian pemukiman kumuh dan penanganannya. Dari uraian diatas, maka salah satu cara untuk menangani masalah pemukiman kumuh dengan program perbaikan kampung adalah dengan menentukan prioritas perbaikan pemukiman kumuh agar pemukiman kumuh yang terpilih untuk diprioritaskan sesuai dengan yang diharapkan terutama oleh masyarakat pemukiman yang mendiami kawasan kumuh tersebut.

Di perkotaan Kuala Kapuas program perbaikan pemukiman kumuh baru akan mulai dilaksanakan namun belum direalisasikan karena masih terbatasnya dana. Bertitik tolak dari keadaan diatas maka penulis ingin mencari dan menentukan prioritas pemukiman kumuh yang akan diperbaiki kondisi lingkungannya. Penentuan prioritas ini berdasarkan kriteria-kriteria dari beberapa ahli atau departemen yang menangani masalah pemukiman yang disesuaikan dengan karakteristik pemukiman kumuh perkotaan kuala kapuas. Proses penentuan prioritas diawali dengan penentuan kriteria pemukiman kumuh yang sesuai dengan karakteristik kota Kuala Kapuas yang dilanjutkan dengan proses pemilihan pemukiman kumuh yang akan diperbaiki.

Dengan menggunakan metode Pembobotan Sederhana dan Analisis Hirarki Proses (AHP) serta berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penentuan pemukiman kumuh perkotaan Kuala Kapuas, akan diperoleh suatu bobot untuk tiap-tiap alternatif kampung yang diperbaiki sehingga dapat menentukan pemukiman kumuh mana saja yang akan diberikan prioritas pertama, kedua, ketiga dan keempat untuk ditingkatkan kualitas lingkungan pemukimannya.

Hasil akhir studi ini adalah urutan pemukiman kumuh yang akan diperbaiki sesuai dengan prioritasnya yang diharapkan dapat menjadi usulan dalam rangka pelaksanaan program perbaikan pemukiman kumuh di perkotaan Kuala Kapuas.

Kata Kunci : Pemukiman Kumuh, Perbaikan, Penentuan Prioritas

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Bapa Tri Tunggal Maha Kudus yang telah memberikan Karunia, Bimbingan dan RahmatNya kepada penulis, hingga pada akhirnya dapat terselesaikannya Tugas Akhir ini dengan judul “ Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh Di Perkotaan Kuala Kapuas” yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Nasional Malang.

Melalui kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, mendukung, memberi materi atau fasilitas guna terwujudnya penyusunan tugas akhir ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

- Papah, Mamah, adik-adik tersayang dan Ka Meky yang senantiasa memberi doa, dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran.
- Ibu Ir Agustina Nurul Hidayati, MTP atas nama Dekan Fakultas Sipil dan Perencanaan yang juga membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- Bapak Ir. Wahyu Hidayat.,MM.,MBA, selaku dosen pembimbing I
- Ibu Ida Soewarni.,ST, selaku dosen pembimbing II, yang telah dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga selesai.
- Ketua Bappeda Kabupaten Kapuas beserta stafnya yang telah memberikan informasi dan data sebagai bahan penulisan tugas akhir ini
- Ketua dinas PU Kabupaten Kapuas beserta staf yang juga telah membantu dalam pemberian data, informasi dan pengarahan pada penulis
- Ketua Badan Pertanahan Nasional Kuala Kapuas beserta staf yang juga telah membantu dalam pemberian data, informasi dan pengarahan pada penulis
- Para Kepala Kelurahan Beserta Staf, para ketua RW, RT dan Masyarakat dilokasi penelitian, yang sangat membantu kelancaran dalam pendataan dan pengamatan, sehingga tugas akhir ini menjadi sangat berarti.

- Para Pereferensi (para ahli) yang telah bersedia mengisi angket antara lain :
Bapak Ir. Songep, Bapak Ir Noferman.,MT, Ibu Nur Kayani.BA, Bapak Johansah.,SP, Bapak Yan Satriansyah.,Sstp, Bapak Drs Fery Noah, Bapak Hendri.s.Lamon.S.sos, Bapak Drs Djumrinson, Bapak Drs Agustinus Babo.SH, Bapak Drs.Fajar Narang.
- Bapak Agung Witjaksono,ST,MTP sebagai ketua Jurusan Teknik Planologi atas saran dan pinjaman buku-bukunya selama penyusunan TA.
- Teman-teman dijurusan Teknik Planologi angkatan yang sama-sama menyusun tugas akhir dan membantu dalam memberi masukan dan saran seperti Diah Kumalasari, Novi, Iwan, Arfin, Nya-Nya, Dwi, Esy, Anjar, Vita, Lisa, Ety, Teguh, Citra, wahyu ca”
- Semua pihak yang membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah Bapa memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasa, kebaikan – kebaikan dan bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada penulis, Amien.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca seluruhnya.dan mohon maaf jika dalam penyusunan ini masih banyak kekurangannya.

Malang, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Abstraksi	i
Abstrac	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Peta.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	7
1.3.1.Tujuan	7
1.3.2.Sasaran	7
1.4. Ruang Lingkup Studi	8
1.4.1.Lingkup Lokasi	8
1.4.2.Lingkup Materi	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Kajian Pemukiman Kumuh.....	11
1.5.1.1. Definisi Dan Ciri-Ciri Rumah Kampung, Rumah Liar Dan Rumah Kumuh	11
1.5.1.2. Slum dan Squatter.....	15
1.5.1.3. Pengertian Kumuh	15
1.5.1.4. Karakteristik Pemukiman Kumuh	17
1.5.1.5. Kajian Daerah Rawa	20
1.5.2. Program Perbaikan Pemukiman Kumuh	26
1.5.2.1. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pemukiman Kumuh Di Indonesia	26
1.5.2.2. Program Perbaikan Pemukiman Kumuh yang Pernah Dilakukan Di Indonesia	38
1.6 Landasan Penelitian	42
1.6.1. Pemukiman Kumuh Daerah Rawa.....	43
1.6.2. Kriteria Permukiman Kumuh	43
1.6.3. Peremajaan Kota	43
1.6.4. Rumusan Variabel	48
1.8 Metode Penelitian	48
1.8.1. Tahapan Perumusan	53
1.8.2. Proses Seleksi Pemukiman Kumuh	53
1.8.3. Proses Pengumpulan Data	53
1.8.3.1. Pengumpulan Data Primer	53
1.8.3.2. Pengumpulan Data Sekunder	56

1.8.4.	Tahapan Analisa.....	57
1.9	Kerangka Pemikiran.....	61
1.10	Rencana Sistematika Pembahasan.....	63

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI

2.1.	Letak Geografis Perkotaan Kuala Kapuas.....	65
2.2.	Karakteristik Fisik Dasar.....	65
2.2.1.	Kelerengan.....	65
2.2.2.	Geologi dan Jenis Tanah.....	67
2.2.3.	Hidrologi.....	67
2.3.	Pola Penggunaan Lahan.....	67
2.4.	Gambaran Spesifik Pemukiman Kumuh Perkotaan Kuala Kapuas.....	70
2.5.	Kebijakan.....	72
2.6.	Kedudukan Dan Peran Perkotaan Kuala Kapuas.....	75

BAB III ANALISA PENENTUAN KRITERIA DAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SELAT HILIR DAN KELURAHAN SELAT TENGAH

3.1.	Analisa Penentuan Kriteria Pemukiman Kumuh.....	77
3.1.1.	Analisa Kesesuaian Kondisi Lokasi studi Dengan Kriteria.....	77
3.1.2.	Dasar Penentuan Kriteria dan Variabel Amatan Yang Akan Digunakan Di Lokasi Studi.....	83
3.1.3.	Variabel Amatan yang Digunakan di Lokasi Studi	87
3.2.	Proses Pemilihan Pemukiman Kumuh di Perkotaan Kuala Kapuas	91
3.2.1.	Proses Seleksi Kelurahan.....	92
3.2.2.	Proses Seleksi Pemukiman Kumuh	94
3.3.	Analisa Kajian Potensi Kondisi Lingkungan Berdasarkan Jawaban Dari Masyarakat Per-RT	97
3.4.	Analisa Karakteristik Pemukiman Kumuh di Lokasi Studi Berdasarkan Jawaban Masyarakat per-RT.....	101
3.3.1.	Faktor Fisik.....	101
3.3.2.	Faktor Sosial	122
3.3.3.	Faktor Ekonomi	130
3.5.	Penyusunan Faktor-Faktor Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh	133
3.5.1.	Penyusunan Diagram Faktor Penentu.....	134
3.5.2.	Hasil Perhitungan.....	134
3.5.3.	Proses Penilaian Terhadap Unit Analisis.....	137

BAB IV PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KUALA KAPUAS

4.1	Prioritas dan Upaya Penanganan Perbaikan Pemukuman Kumuh.....	140
4.2	Rekomendasi	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pemukiman memiliki peran yang cukup penting terutama di daerah perkotaan. Semakin cepatnya tingkat perkembangan suatu kota, maka akan semakin cepat pula tingkat pertumbuhan penduduk karena arus manusia yang mengalir ke kota cukup besar. Hal ini menyebabkan kebanyakan kota-kota tidak mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan kota dengan penyediaan tanah dan rumah yang diperlukan guna menampung kaum pendatang baru ke kota tersebut.¹

Berdasarkan analisa statistik pertumbuhan penduduk dan rumah tangga, maka diperkirakan laju kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahunnya rata-rata adalah sebesar 800.000 unit rumah baru per tahun. Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan rumah akibat kekurangan atau defisit rumah (backlog) yang belum terpenuhi hingga akhir tahun 2003 yang masih mencapai 5.93 juta unit (9.43% dari jumlah rumah yang ada) dan rata-rata setiap tahun terdapat 1,5 juta unit yang perlu difasilitasi sampai dengan tahun 2020.

Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya permukiman kumuh dengan luas keseluruhan 47.393 hektar yang dihuni oleh tidak kurang dari 17.2 juta jiwa. Permukiman kumuh di perkotaan pada umumnya terjadi karena masih rendahnya kemampuan sebagian besar masyarakat dimana sekitar 70% masyarakat Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 1,5 juta/bulan² serta masih rendahnya fasilitas pemerintah untuk pembangunan perumahan swadaya yang terjangkau dan layak huni dan akhirnya menyebabkan menurunnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang pada

¹ Djoko Kirmanto .Ir, Dipl, HE, Direktur Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Semiloka Rencana Pencananangan Gerakan Nasional Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh, Palembang 20 – 21 Agustus 2001 : Kebijakan dan Strategi Nasional Penataan Lingkungan Kumuh

² Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman <http://dirjen.id.or.id/>, Bandung 3 september 2004

gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh dan liar.

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi yaitu³ :

1. Pertama kondisi fisiknya, antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi bangunan rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah tidak dikelola dengan baik
2. kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran dan penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang yang berdampak pada kehidupan kota seluruhnya. Oleh karena itu permukiman kumuh merupakan penyakit kota yang harus diatasi
3. ketiga dampak oleh kondisi tersebut

Perkotaan Kuala Kapuas merupakan salah satu Kota di Kalimantan Tengah yang mempunyai fungsi sebagai simpul jasa kegiatan pemerintah yang terdiri dari 2 Kecamatan dan 12 Desa/Kelurahan dengan luas administratif kota adalah 155,66 Km², Kegiatan utama penduduknya bukan hanya pada sektor pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu perkotaan Kuala Kapuas termasuk dalam kategori perkotaan yang cukup pesat mengalami perkembangan kotanya.

Terkait dengan masalah diatas seperti juga kota-kota lainnya, Perkotaan Kuala Kapuas juga tidak luput dari meluasnya gejala permukiman kumuh sebagai akibat dari perkembangan penduduk yang setiap tahun dirasakan semakin

³ strategi national penanggulangan kemiskinan [http_www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

meningkat dan menyebabkan timbulnya berbagai masalah di perkotaan. Menurut Kabupaten Kapuas dalam angka tahun 2007, Perkotaan Kuala Kapuas mempunyai jumlah penduduk sebesar 64.894 jiwa, sedangkan pada tahun 2002 jumlah penduduk 42.767 jiwa dengan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk antara tahun 2002 – 2007 sebesar 1.07 % pertahun dan kepadatan penduduk sebesar 417 jiwa/km². dari kepadatan penduduk tersebut tampaknya perkotaan Kuala Kapuas merupakan kota yang padat. Namun bila dilihat dari per kelurahan atau bahkan per RW, tampak adanya perbedaan yang mencolok terutama kelurahan yang ada di sekitar pusat kota.

Perbedaan kepadatan yang mencolok antara kelurahan yang terdapat dipusat kota dan daerah sekitar perkotaan Kuala Kapuas ini erat kaitannya dengan bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga berpengaruh pada penggunaan lahan di daerah Pusat. kota melihat kondisi dan kecenderungan perkembangan kota Kuala Kapuas yang mengelompok di daerah pusat kota atau pusat-pusat kegiatan, menunjukan bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota terus meningkat akan kebutuhan ruangnya, terutama pada daerah pusat kota (perdagangan dan jasa), tetapi karena terbatasnya lahan-lahan di pusat kota maka perkembangan kota tersebut tekonsentrasi pada pusat kota.

Perkembangan penduduk yang mengelompok ini tidak terlepas dari budaya masyarakat yang hidup mengelompok tinggal dekat dengan sungai yaitu pusat-pusat kegiatan di daerah pusat kota. Tentu saja kecenderungan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pusat kota dan dampak-dampak yang timbul akibat perkembangan tersebut akan membawa dampak positif maupun negatif, dan yang paling menonjol adalah dampak negatif yang berpengaruh terhadap lingkungan, kepadatan bangunan serta terpusatnya suatu kegiatan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi.

Dampak negatif tersebut tidak terlepas dari kondisi fisik perkotaan Kuala Kapuas. Menurut profil Perkotaan Kuala Kapuas Tahun 2006, 70 % wilayahnya merupakan lahan rawa pasang surut dan non rawa kurang lebih 30 %. Pada umumnya daerah yang mempunyai lahan rawa pasang surut, sepanjang musim

hampir tidak pernah kering, mempunyai ketebalan gambut yang bervariasi, tanah dan airnya berkadar asam yang tinggi, serta memiliki daerah topografi yang relatif datar atau cekung.. Berdasarkan hasil survey dan informasi dari BPN pada lokasi studi tergolong rawa kategori III yaitu merupakan suatu daerah yang tidak pernah terluapi oleh air pasang tertinggi dari variasi elevasi pasang surut air sungai. Namun air pasang masih tetap mempengaruhi elevasi muka air tanah sehingga kedalaman muka air tanah tidak lebih kurang 0,50 m di bawah permukaan tanah jadi tinggi muka tanah rata-rata tidak lebih dari 50 cm di atas elevasi muka air tertinggi. Namun karena adanya berbagai bentuk topografi di lokasi studi tidak semua elevasi air 0,50 m di permukaan tanah, ada sebagian lokasi yang terluapi pada saat pasang terjadi dan tidak semua air yang melimpah akan kembali lagi ke sungai pada saat air surut. Air yang terperangkap inilah yang menimbulkan masalah terutama pada saat musim hujan lokasi studi sangat rentan terhadap wabah penyakit karena seluruh lokasi studi tergenang air namun pertukaran air tidak lancar karena terhalang endapan sampah. Menurut informasi dari kelurahan, RW dan RT serta berdasarkan data dinas kesehatan Kuala Kapuas pada tahun 2007 $\pm$ 19.368 jiwa (30%) penduduk perkotaan Kuala Kapuas terserang penyakit ISPA, diare, demam berdarah, typhus, penyakit kulit dan malaria merupakan penyakit yang mewabah sepanjang tahun, jumlah ini mengalami peningkatan jika pada tahun 2002 hanya $\pm$ 8553 jiwa (10 %) penduduk yang terserang wabah penyakit.

Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan dimanapun juga, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif (Clinard: 1968 Wiebes) pemahaman kumuh dapat ditinjau dari : Sebab kumuh Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: segi fisik yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara sedangkan segi masyarakat/sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah. Akibat kumuh Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain: kondisi perumahan yang buruk, penduduk yang terlalu padat, fasilitas lingkungan yang tidak memadai, tingkah laku menyimpang, budaya kumuh, apati

dan isolasi.⁴ Melihat kondisi yang ada kekumuhan yang terjadi di perkotaan Kuala Kapuas disebabkan karena kemunduran lingkungan hidup, jika dilihat dari segi fisik diakibatkan oleh tidak terkelolanya sistem pembuangan sampah sehingga menghambat sirkulasi pertukaran air. Bau air yang menggenang di daerah rawa menyebabkan polusi udara di sekitar hunian dan mewabahnya berbagai macam penyakit.

Selain permasalahan lingkungan Kepadatan bangunan yang tinggi pada daerah perkotaan mengakibatkan rawan terhadap bahaya kebakaran karena pada umumnya masyarakat di Perkotaan Kuala Kapuas memanfaatkan daerah rawa-rawa sebagai daerah pemukiman dengan menggunakan konstruksi bangunan kayu dalam bentuk “Rumah Panggung” karena pembuatan rumah panggung ini lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan pembuatan rumah dari batu bata (rumah beton), serta dapat dijangkau oleh golongan menengah kebawah. Disamping itu memanfaatkan potensi-potensi hasil hutan (kayu) yang ada pada lokasi daerah studi.

Hal inilah yang akhirnya memberikan kontribusi munculnya pemukiman kumuh dipusat kota Kuala Kapuas sehingga diperlukan perbaikan kualitas pemukiman. Perbaikan kualitas lingkungan ini tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pengawas dan pelaksana terealisasinya pembangunan di perkotaan harus terus berusaha memperhatikan kebutuhan untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan permukiman yang layak huni yang terdapat di wilayah perkotaan Kuala Kapuas akibat perkembangan kota dan kondisi fisik lingkungan kota yang menurun kualitasnya, guna upaya perbaikan lingkungan pemukiman kumuh ini diperlukan suatu konsep yang mencakup semua aspek dalam upaya perbaikan pemukiman kumuh yaitu aspek fisik, aspek sosial dan aspek ekonomi dengan pendekatan Tribina (Konsep Tribina) yang terdiri dari bina sosial/manusia, bina ekonomi dan bina fisik/lingkungan.

⁴ Demandiri Online_Siti Umajah Masjukri Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya Pdf 21 januari 2008 hal 3

1.2. Perumusan Masalah.

Masyarakat lokasi studi memanfaatkan daerah rawa pasang surut yang tidak diurug sebagai lahan pemukiman dan selalu digenangi air sepanjang tahun, baik itu air luapan akibat pasang surut sungai maupun genangan air hujan, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya karena :

- a) Tidak terkelolanya sistem pembuangan limbah cair dan padat. Limbah cair buangan rumah tangga langsung di buang ke bawah kolong rumah dan demikian halnya dengan limbah padat sebagian besar masyarakat masih membuang limbah padat (berupa sampah rumah tangga) di sekitar hunian. sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di lokasi studi maka menyebabkan terhambatnya pertukaran air
- b) Rawan terhadap timbulnya penyakit diare, infeksi saluran pernafasan (ISPA), penyakit typhus, penyakit kulit dan malaria serta menimbulkan polusi akibat bau dari rawa.
- c) Kualitas konstruksi bangunan yang rendah, dimana sebagian besar rumah warga terbuat dari bahan kayu.
- d) Semakin dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat kegiatan kota maka semakin padat, hampir sebagian besar bangunan rumahnya berdempetan sehingga rawan terhadap bahaya kebakaran karena semua bangunan di lokasi studi terbuat dari bahan kayu,
- e) Prasarana yang tidak memadai seperti jalan lingkungan yang relatif sempit (lebar jalan 1 – 1,5 m) didominasi oleh jalan jembatan kayu, kurangnya fasilitas MCK sehingga sebagian besar masyarakat masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan akhir.

Kondisi inilah yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan menyebabkan terjadinya kekumuhan di lokasi studi sehingga diperlukan perbaikan.

Berdasarkan kondisi yang ada di lokasi studi maka kasus ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi pengembangan wilayah pada bagian kota yang dilakukan dengan perbaikan lingkungan pemukiman dengan konsep tanpa adanya penggusuran, karena pada umumnya dengan adanya perkembangan kota maka

tidak lain maka akan dilakukan suatu relokasi penduduk (penggusuran). Perkembangan dan peluang yang timbul harus dapat dinikmati oleh penghuni sebagai bagian dari upaya peningkatan perbaikan kondisi lingkungan.

Dengan menyimpulkan dari uraian diatas maka perumusan masalahnya adalah :

- Kriteria apa saja dari permukiman kumuh yang bisa dijadikan sebagai standar lokal bagi prioritas perbaikannya di wilayah studi
- Penentuan prioritas agar semua permukiman kumuh di perkotaan kuala kapuas tanpa terkecuali, perlu mendapatkan upaya-upaya untuk memperbaiki dan peningkatan kualitas permukiman kumuh itu sendiri.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diraih, sedangkan sasaran merupakan upaya yang dapat/akan dilakukan untuk sampai di tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah dalam memilih lokasi permukiman kumuh dan menentukan prioritas perbaikan permukiman kumuh agar permukiman kumuh yang diprioritaskan sesuai dengan yang diharapkan terutama oleh masyarakat yang menempati kawasan kumuh tersebut

1.3.2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- Menetapkan kriteria permukiman kumuh berdasarkan literatur dari Budi D.Sinulingga, A.Ramlan Surbakti dan Parsudi Suparlan.
- Penentuan prioritas dan penanganan permukiman kumuh di wilayah studi.

1.4. Ruang Lingkup Studi

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah meliputi lingkup lokasi dan lingkup materi. Untuk jelasnya akan diuraikan satu persatu berikut ini :

1.4.1. Lingkup Lokasi

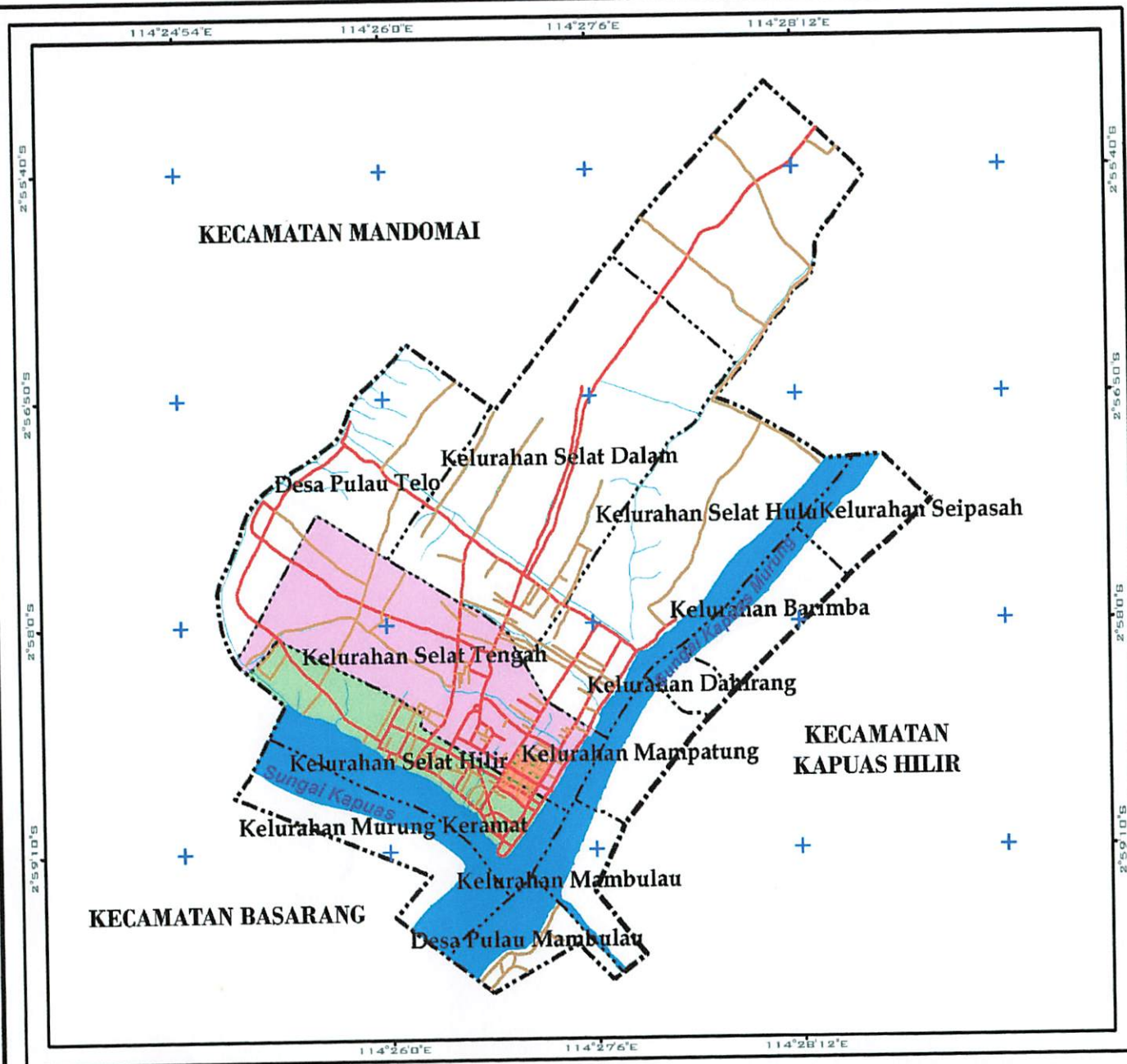
Pada penelitian tentang penentuan prioritas perbaikan permukiman kumuh yang merupakan salah satu permasalahan dari sebuah kota maka lingkup lokasi penelitian permukiman kumuh mencakup seluruh Perkotaan Kuala Kapuas. Perkotaan Kuala Kapuas terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Selat dan Kecamatan Kapuas Hilir dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar 64.894 jiwa. Adapun batas administrasi Perkotaan Kuala Kapuas:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kapuas Murung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Selat (Terusan Karya)
- Sebelah Timur : Kecamatan Kapuas Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Basarang, Mandomai

1.4.2. Lingkup Materi

Dalam lingkup materi yang dibahas antara lain adalah tentang cara penetapan kriteria kekumuhan perkotaan kuala kapuas mengingat belum adanya studi tentang kriteria pemukiman kumuh yang sesuai untuk perkotaan kuala kapuas, pemilihan lokasi yang disesuaikan dengan kriteria terpilih dan prioritas mengingat keterbatasan dana yang tersedia sehingga tidak mungkin dengan dana yang terbatas dapat melakukan perbaikan untuk semua pemukiman kumuh dalam waktu bersamaan oleh karena itu diperlukan adanya prioritas. Pembahasan dalam laporan penelitian ini hanya dibatasi dengan materi:

1. Penentuan kriteria pemukiman kumuh dengan menggunakan amatan berdasarkan referensi dari Ir Budi D Sinulingga, referensi dari A Ramlan Surbakti dan Prof DR. Parsudi Suparlan dan berdasarkan eksisting yaitu dari hasil observasi dengan melihat karakteristik perkotaan Kuala Kapuas dan karakteristik masyarakatnya sehingga didapat kriteria pemukiman kumuh yang sesuai dengan karakteristik perkotaan Kuala Kapuas





JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
LOKASI WILAYAH STUDI

LEGENDA :

- Batas Propinsi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Sungai
- Lokasi Studi
- Kelurahan Selat Hilir
- Kelurahan Selat Tengah

SUMBER :
- BAPPEDA Kota Kuala Kapuas



SKALA : 1:57.000

700 350 0 700 M

PETUNJUK LETAK PETA



NO. PETA : 1.1

2. Melakukan seleksi pemukiman kumuh dengan mengidentifikasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria pemukiman kumuh terpilih yang sesuai dengan karakteristik perkotaan Kuala Kapuas sehingga nantinya akan diketahui mana yang termasuk dalam kriteria pemukiman kumuh. Sesuai dengan kriteria pemukiman kumuh di perkotaan Kuala Kapuas variabel yang digunakan yaitu:
 - a. Aspek fisik
Meliputi: kondisi perkerasan jalan, kondisi jaringan drainase, MCK, pelayanan air bersih, pelayanan listrik, pembuangan sampah, kerapatan dan kepadatan bangunan, kondisi fisik bangunan, tahun perkembangan kawasan dan jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan ekonomi/pusat kegiatan kota
 - b. Aspek Sosial
Meliputi: jumlah penduduk dalam satu wilayah (jiwa/ha), tingkat pendidikan penduduk dan Mata pencaharian
 - c. Aspek ekonomi meliputi tingkat pendapatan masyarakat
3. Menentukan prioritas lokasi penanganan dengan cara : menilai masing-masing indikator dari variabel fisik, variabel sosial dan variabel ekonomi dengan menggunakan analisa penilaian dan pembobotan sederhana pada masing-masing indikator sehingga diketahui indikator mana yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kekumuhan di lokasi studi dan akan didapat lokasi mana yang akan diprioritaskan untuk diupayakan penanganannya terlebih dahulu. Adapun proses penilaian yang dilakukan :
 - a. Jawaban dari responden dinilai dengan memberikan nilai tertinggi 100 dan dibobotkan. Pemberian bobot berdasarkan dari asumsi yang disesuaikan dengan karakteristik lokasi studi.
 - b. Setelah dilakukan analisa penilaian dan pembobotan kemudian diolah lagi dengan menggunakan analisa *Sturgess* dan *Class Interval* untuk menilai tingkat kekumuhan tiap-tiap variabel.
 - c. Analisis penentuan hirarki prioritas perbaikan pemukiman kumuh, dengan menggunakan metode AHP (Analisis Hirarki Proses) untuk mengetahui lokasi prioritas perbaikan pemukiman kumuh.

1.5. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka berisikan pustaka-pustaka atau kajian literatur yang dapat menunjang dan menjadi tolak ukur dalam penelitian dan memperkaya cakrawala pengetahuan, dimana permukiman kumuh sebagai objek kajiannya.

Adapun variabel dan tolak ukur yang digunakan dalam tinjauan pustaka yang kemudian akan mendasari penelitian ini adalah: Observasi, Responden, Questioner, Variabel untuk wawancara dan survei ke instansi serta variabel dan tolak ukur yang digunakan dalam penentuan analisa.

1.5.1. Kajian Pemukiman kumuh

Kajian Pemukiman kumuh dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut teori mengenai definisi dan ciri-ciri kampung, rumah liar dan rumah kumuh, kriteria pemukiman kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini

1.5.1.1. Definisi dan Ciri-Ciri Kampung, Rumah Liar dan Rumah Kumuh

Rumah terdiri dari berbagai macam tipe dan ukuran. Definisi rumah-rumah. Dibawah ini adalah rumah yang banyak sekali ditemukan di Indonesia, diantaranya:

A. Rumah Kampung

Rumah kampung adalah rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang telah dimiliki, disewa atau di pinjam dari pemiliknya. Dengan demikian, pembangunan rumah kampung dilakukan dengan seizin oleh si empunya tanah. Tetapi tak jarang pula terdapat rumah dikampung ada yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dari Pemerintah.

Kampung merupakan suatu lingkungan yang sudah mapan, yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah, yang pada umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas sosial yang cukup, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Kampung-kampung tua sudah mulai berkembang sejak jaman penjajahan Belanda. Terdapat di dekat pusat-pusat kegiatan dalam kota dengan kepadatan yang tinggi, kadang-kadang dapat mencapai kepadatan lebih dari 1.000 orang per-hektar.

Kampung akan tumbuh dengan perlahan-lahan secara bertahap. Ada kampung yang berasal dari pemukiman pedesaan yang semula berada dipinggiran

kota yang secara berangsur-angsur terpengaruh oleh perkembangan pusat kota dan perluasan kota, sehingga pada akhirnya berubah menjadi kampung kota.

Ada pula kampung yang terjadi karena lahan pertanian dipinggiran kota secara berangsur-angsur berubah menjadi perumahan perkotaan. Selanjutnya, pertambahan penduduk kota, baik akibat pertambahan secara alami maupun karena adanya pendatang baru dari pedesaan, berangsur-angsur menjadi kampung-kampung. Lama-kelamaan kampung-kampung tersebut berubah menjadi kampung kota yang didominasi oleh penduduk berpenghasilan rendah dan menengah, serta merupakan campuran antara tempat tinggal dan tempat kerja

B. Rumah Liar

Rumah liar adalah rumah yang dibangun secara ilegal tanpa setahu dan seizin pemilik tanahnya. Pengertian liar disini tidak dikaitkan dengan ada tidaknya izin mendirikan bangunan dari Pemerintah, sedangkan rumah kampung ada yang memiliki izin mendirikan bangunan tetapi ada pula yang tidak. Perumahan liar tumbuh agak jauh dari jalan kendaraan di pinggir-pinggir sungai dan bantaran sungai, di sepanjang rel kereta api, di sekitar pasar dan stasiun kereta api. Daerah-daerah tersebut pada umumnya adalah berupa tanah yang belum dipergunakan, ditinggalkan atau yang tidak diawasi oleh pemegang haknya.

Penghuninya merupakan pendatang dari pedesaan dan kota-kota lainnya, berpenghasilan rendah bahkan sangat rendah. Mereka tinggal di gubuk-gubuk dengan bahan-bahan yang tidak tahan lama dan bahan-bahan bekas, tetapi kadang-kadang terdapat pula bangunan permanen yang cukup baik. Banyak diantara penduduk yang tinggal hanya untuk sementara bersama kerabat atau kenalannya, pada musim tanam atau musim panen mereka kembali ke tempat asal dengan membawa hasil usahanya ke kota mereka. Mereka hidup sebagai pemulung barang-barang bekas, pedagang keliling, pengendara becak, buruh bangunan atau sejenisnya. Dalam perumahan liar yang masih asli pada umumnya tidak terdapat jalan kendaraan maupun jalan setapak yang diperkeras, tidak ada pelayanan air bersih, drainase, dan pembuangan air kotor.

Kebanyakan dari mereka menggunakan air kali yang kotor untuk mandi, mencuci dan juga membuang kotoran. Banyak pula yang membuang kotoran di parit-parit,

yang di musim hujan dapat terjadi banjir sehingga menyebabkan kotoran kemana-mana. Sampahpun sering di buang ke dalam sungai atau kanal terdekat, yang menyebabkan pendangkalan dan banjir di kanan-kirinya

Perumahan liar tumbuh dekat dengan pusat-pusat kegiatan dimana para penghuninya mencari nafkah tumbuhnya pun sangat cepat.dengan waktu singkat perumahan liar menempati jalan kosong yang tidak dijaga, kadang meliputi suatu area yang luas di dalam kota. Sudah banyak pemukiman liar, terutama yang tumbuh di bantaran sungai dan dipinggir rel kereta api yang sudah dibongkar, namun di tempat lain muncul perumahan liar baru sedangkan pemadatan perumahan liar lainnya berjalan terus.

C. Rumah Kumuh

Rumah kumuh adalah rumah yang memiliki kondisi lingkungan dan bangunan yang buruk, hampir sama dengan rumah liar. Perumahan kumuh berupa kampung dan perumahan liar yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah bahkan sangat rendah dengan kepadatan penduduk dan kerapatan bangunan yang tinggi, dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memiliki persyaratan kesehatan maupun teknik dengan pola yang tidak sangat teratur karena tidak direncanakan lebih dahulu.

Ciri-ciri utamanya antara lain pola yang tidak teratur, kurangnya prasarana, kurangnya utilitas dan prasarana sosial, semakin dekat dengan pusat kota maka kepadatan penduduknya semakin tinggi, fungsi daerah sebagai tempat transisi antara kehidupan pedesaan dengan perkotaan atau sebagai pusat proses urbanisasi. Perumahan kumuh memberikan kesempatan bagi pendatang baru yang berasal dari masyarakat petani yang mempunyai kehidupan lebih bebas dan secara ekonomis berperan umum menjadi pekerja kota dan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kota.

Dari uraian diatas antara perumahan kampung, perumahan liar dan perumahan kumuh memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang memiliki

kemiripan satu dengan yang lainnya. Berikut ini merupakan tabel ciri-ciri dari ketiga perumahan tersebut⁵

Tabel 1.2.
Ciri-ciri Rumah Kampung, Rumah Liar Dan Rumah Kumuh

Rumah Kampung	Rumah Liar	Rumah Kumuh
♦ Prasarana dan sarana kurang ♦ Ada yang mempunyai IMB dan ada yang tidak. ♦ Terdiri dari masyarakat golongan rendah dan menengah. ♦ Umumnya masyarakat sudah tinggal menetap ♦ Fisik bangunan mayoritas semi permanen dan permanen ♦ Lokasi umumnya di pusat kota. ♦ Memiliki kepadatan penduduk tinggi	♦ Sarana dan prasarana kurang bahkan tidak ada (jalan setapak, tidak ada pelayanan air bersih, drainase, pembuangan air kotor). ♦ Tidak mempunyai IMB ♦ Terdiri dari msyarakat golongan ekonomi rendah. ♦ Umumnya masyarakat tinggal tidak menetap. ♦ Fisik bangunan terdiri dari gubuk, bahan-bahan yang tidak tahan lama, barang-barang bekas, jarang yang memiliki rumah permanen ♦ Lokasinya umumnya di daerah pinggiran kota seperti di bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, pasar dan stasiun serta di daerah rendah yang sering banjir, selain itu juga dapat dijumpai di daerah pusat kegiatan kota. ♦ Memiliki kepadatan penduduk tinggi	♦ Kurang sarana dan prasarana ♦ Mempunyai IMB. ♦ Terdiri dari msyarakat golongan rendah dan menengah ♦ Umumnya masyarakat tinggal menetap tetapi tidak jarang pula yang tidak menetap. ♦ Fisik bangunan tidak berpengaruh terhadap rumah kumuh. Tergantung pada pola pengaturan rumah tersebut. ♦ Lokasi umumnya di pusat kota, akan tetapi tidak jarang ditemukan dipinggiran kota, yang dekat dengan pusat kegiatan seperti pabrik/industri ♦ Umumnya memiliki kepadatan penduduk dan kerapatan bangunan yang tinggi

Sumber : Siswono Yudohusodo, Ir. et.al, "Rumah Untuk Seluruh Rakyat

Dari ketiga ciri-ciri tersebut terdapat perbedaan ciri-ciri yaitu dari status tanah, kepadatan penghuni perumahan (pemukiman), serta fisik bangunan.

⁵ Siswono Yudohusodo Ir. et.al, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta 1991, hal 311.

1.5.1.2. *Slum dan Squatter*

Dalam perkampungan kumuh itu sendiri dikenal istilah *slum* (kumuh) dan *squatter* (liar). Untuk membedakan antara kawasan *squatter* dan *non-squatter* tidak cukup hanya dengan membedakan masyarakat liar dan masyarakat kumuh. Berapa variabel yang dapat digunakan untuk membedakan pemukiman liar dan pemukiman buruk/kumuh menurut Laquian (1980, 11-14) adalah lokasi spasial; tingkat keburukan pemukiman dan lingkungannya; kepadatan penduduk dan perumahannya; umur relative pemukiman; tipe tanah / lahan yang ditempati (nilai tanah); fasilitas kota yang memadai; organisasi-organisasi masyarakatnya, kesukuan, heterogenitas dan homogenitas kelas masyarakatnya; penyimpangan perilaku (kenakalan remaja dan kriminalitas); tingkat apatisme dan isolasi sosial; tingkat kesehatan dan sanitasi. Dari pengamatan di beberapa Negara asia, tampak kelompok masyarakat yang berada di pusat kota, kurang berkembang dibandingkan dengan masyarakat di daerah pinggiran Laquian (1980, 11-14).⁶

1.5.1.3. *Pengertian Kumuh*

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan⁷

Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan dimanapun juga, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif (Clinard: 1968 Wiebes) pemahaman kumuh dapat ditinjau dari :

a) Sebab kumuh

Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: segi fisik yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan

⁶ Agustina Nurul Hidayati, Ir, MTP. op. cit., hal 11

⁷ Demandiri Online_Siti Umajah Masjukri Program Pascasarjana UNAIR, <http://www.SurabayaPdf> 21 januari 2008 hal 3

udara sedangkan segi masyarakat/sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah.

b) Akibat kumuh

Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain: kondisi perumahan yang buruk, penduduk yang terlalu padat, fasilitas lingkungan yang tidak memadai, tingkah laku menyimpang, budaya kumuh, apati dan isolasi.

Berikut ini merupakan definisi atau pengertian dari beberapa para ahli mengenai pengertian tentang pemukiman kumuh.

- Pemukiman kumuh (*slum*) adalah pemukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan kehidupan penghuni, karena keadaan keamanan dan kesehatan memprihatinkan, kenyamanan dan keandalan bangunan di lingkungan tersebut tidak memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas bangunan yang sangat rendah serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat. (Kamus Tata Ruang Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum).
- Menurut Tjuk Kuswantojo,
“Pemukiman kumuh yaitu pemukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana dan pelayanan pemukiman minim adalah pengejawantahan kemiskinan. kekotaan (urban)”⁸
- Menurut Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/93 Tahun 1993.

Pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang tidak layak huni yang keberadaannya tidak memenuhi persyaratan teknis, sosial, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan serta tidak memenuhi persyaratan ekologis dan legal administratif yang penanganannya dilaksanakan melalui pola perbaikan/pemugaran, peremajaan maupun relokasi sesuai dengan tingkat/kondisi permasalahan yang ada⁹.

⁸ Tjuk Kuswantojo. Et.al. Perumahan dan Pemukiman di Indonesia-Upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan, ITB-Bandung, 2005, hal 184.

⁹ Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/93 Tahun 1993

1.5.1.4. Karakteristik Permukiman Kumuh

Berikut ini merupakan kriteria permukiman kumuh oleh para ahli. Menurut Surbakti, bahwa perkampungan yang dikatakan slum adalah *identik* dengan *perkampungan miskin atau permukiman miskin* yang memiliki kriteria antara lain sebagai berikut¹⁰:

- Penduduk sangat padat antara lain 250-400 jiwa/km².
- Pendidikan rendah
- Berpendapatan rendah di bawah upah minimum harian rata-rata
- Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori rumah darurat (*substandart Lousing Conditions*), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-alang dan bahan yang cepat hancur lainnya.
- Langkahnya pelayanan kota (*urban services*), seperti air minum, fasilitas mandi, cuci kakus (MCK), listrik, sistem pembangunan kotoran dan sampah, serta perlindungan kebakaran.
- Rawan tanah longsor, kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya penyakit
- Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya tidak teratur dan tidak terawat (dalam hal bangunan, halaman dan jalan-jalan), serta sempitnya ruang antar bangunan dan tidak ada ruang terbuka sama sekali.
- Perkampungan miskin ini pada umumnya berokasi di sekitar pusat kota dan seringkali tidak jelas pula status hukum tanah yang ditempatinya (*squater*).
- Sebagian besar lokasinya berada dengan pusat kegiatan ekonomi kota atau pusat-pusat kegiatan kota. Pemikiran penghuni permukiman kumuh ini, bahwa lebih dekat dengan pasar atau pusat-pusat kegiatan ekonomi lebih baik, walaupun mereka harus berdesakan di petak-petak rumahnya

¹⁰Surbakti, A. Ramlan. , Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung Dalam Prisma Edisi 6, Kota Bermuka Dua, Tahun XIII, LP3ES, Jakarta, 1984, hal 65, Dalam Thesis Agustina Nurul Hidayati, Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2, Tipologi Kampung Kumuh di Kotamadya Malang, hal 12.

Pendapat Ir. Budi D. Sinulingga, M.Si., 1997 dalam bukunya *Pembangunan Kota (Tinjauan Regional dan lokal)*, kriteria pemukiman kumuh harus memenuhi beberapa aspek antara lain¹¹:

- Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, terkadang jalan ini sudah tersembunyi di balik atap-atap rumah yang bersinggungan satu sama lain. Selain sempit, jalan-jalan ini ada yang masih berupa jalan tanah.
- Fasilitas drainase tidak memadai. Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air dan bahkan mengakibatkan banjir.
- Fasilitas pembuangan air kotor / tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang langsung membuang ke saluran yang dekat dengan rumah. Ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat. Sebagian dari penghuni membuat WC cubluk, tetapi karena lahan sangat sempit maka dibuatlah berdekatan dengan semur dangkal yang dipergunakan sebagai air minum, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran sumur dangkal sangat besar.
- Fasilitas sumber air bersih sangat minim, sehingga memanfaatkan air sumur dangkal yang sudah tercemar atau menampung air hujan dan bahkan membeli air bersih kalengan. Ada juga yang terpaksa memanfaatkan air sungai yang terdekat yang sudah sangat kotor akibat buangan air kotor dari rumah-rumah penduduk.
- Umumnya bangunan-bangunan yang tidak permanen dan malahan terlihat banyak yang dalam kondisi bangunan darurat.
- Pemilikan hak terhadap lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tak memiliki status apa-apa.
- Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah/berproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan.

¹¹ www.Sulutlink.com/artikel/lingkungan/0814.htm-69k-

Sedangkan menurut Prof. DR. Parsudi Suparlan dalam tulisannya “Segi Sosial Dan Ekonomi Pemukiman Kumuh” menjelaskan ciri-ciri dari pemukiman kumuh secara umum. Adapun kriteria pemukiman kumuh antara lain¹² :

- a) Prasarana kurang (mck, airbersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit)
- b) Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- c) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- d) Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.
- e) Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
- f) Sebagian besar warga yang menempati kawasan kumuh berpenghasilan rendah
- g) Makin lama usia perkembangan suatu kawasan kumuh berarti kawasan tersebut dianggap sudah lebih beradaptasi dan menyatu dengan kehidupan

¹² Parsudi Suparlan, Segi Sosial dan Ekonomi Permukiman Kumuh hal 1-3

perkotaan. Usia kawasan. Sebelum tahun 1950, antara tahun 1950 – 1955, antara tahun 1955 – 1960, antara tahun 1960 – 1970 dan setelah tahun 1970

1.5.1.5. Kajian Daerah rawa.

A. Karakteristik Daerah Rawa

Lahan rawa adalah suatu bentangan tanah atau lahan yang mempunyai topografi relatif datar atau cekung, secara alami tergenang air sepanjang tahun atau semusim.

Ditinjau dari segi fisiknya, proses pembentukan lahan rawa dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu lahan rawa pasang surut dan lahan rawa non pasang surut (rawa lebak/rawa pedalaman). Lahan rawa pasang surut adalah lahan rawa yang dalam proses pembentukannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada saat air laut pasang, permukaan air laut akan naik (termasuk air sungai) sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai ke daerah sekitarnya dan menggenangnya. Sedangkan pada saat air laut surut, permukaan air sungai turun dan hanya sebagian air genangan atau luapan pada waktu pasang yang mampu dibawa, sehingga air genangan yang tersisa membentuk rawa-rawa.

Lahan rawa non pasang surut atau lebak adalah rawa yang terbentuk sebagai akibat keadaan topografi yang rendah dan berbentuk cekungan. Sehingga pada saat musim hujan seluruh lahan tergenangi air yang berasal dari air yang berasal dari air hujan dan air sungai. Dan pada saat musim kemarau sebagian lahan menjadi kering atau lembab dan sebagian masih tetap tergenang oleh air luapan sungai atau air hujan.¹³

B. Penggolongan Jenis Lahan Rawa

Berdasarkan penggolongan rawa menurut Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) rawa dapat digolongkan berdasarkan dua jenis lahan rawa yaitu lahan rawa pasang surut dan lahan rwa nonpasang surut.

Menurut P4S rawa pasang surut tinjauannya berdasarkan Hidro-topografinya adalah ketinggian relatif dari permukaan lahan terhadap muka air pasang surut

¹³ Dr.Ir.Suhardjono,M.Pd.,Dipl.H.E, Pengantar Reklamasi Rawa, Bagian Penerbitan ITN Malang, Malang 1994 hal 14

dibedakan atas tiga macam lahan, yaitu: Lebak Pematang, Lebak Tengah dan Lebak Dalam

1. Rawa Pasang Surut

Suatu daerah disebut rawa pasang surut bila air yang tergenang di daerah itu diakibatkan atau berhubungan dengan adanya pengaruh pasang surut tinggi muka air laut.

Lahan rawa pasang surut umumnya berada pada darah dataran dimana air pasang surut masih cukup mempunyai pengaruh kepada tinggi rendahnya permukaan air didaerah tersebut. Daerah ini dapat mencapai berpuluh-puluh kilometer dari garis pantai. Pada daerah didekat pantai, pengaruh pasang surut air laut tentunya terlalu besar dan dapat berakibat buruk pada perkembangan daerah tersebut.

Secara umum, proses kejadian rawa pasang surut adalah sebagai berikut:

- a. Akibat adanya pasang, muka air laut di muara sungai naik dan seolah-olah menjadi bendungan yang menghambat aliran air sungai menuju laut. Akibatnya muka air disungai menjadi ikut naik karena air terbendung (terempang) di muara.
- b. Naiknya muka air sungai ini menyebabkan luapan-luapan air yang membanjiri daerah di sekitarnya. Akibatnya lahan-lahan di kanan kiri sungai ini tergenang airdan terbentuklah rawa pasang surut.
- c. Karena adanya berbagai bentuk topografi daerah disekitar sungai tidak semua air yang melimpah saat air pasang kembali lagi kesungai pada saat air surut, sehinggalah daerah tersebut terbentuklah rawa-rawa. Genangan air pada lahan di kedua tepi sungai dapat pula berasal dari air hujan yang tidak dapat mengalir keluar dari daerah yang cekung.

Menurut proyek pembukaan persawahan pasang surut dapat digolongkan berdasarkan hidro-topografinya. Yang dimaksud dengan hidrotopografi adalah ketinggian relatif dari permukaan lahan terhadap muka air pasang surut di saluran terdekat.

Namun harus diketahui bahwa keadaan hidrotopografi suatu lahan tidaklah bersifat konstan, karena faktor-faktor yang mempengaruhinya bersifat tidak

permanen. Posisi hidrotopografi suatu lahan rawa pasang surut tergantung pada berbagai faktor, antara lain:

- a. Muka air pasang surut di sungai
- b. Fluktuasi tinggi pasang surut di jaringan saluran
- c. Kondisi permukaan lahan sehubungan adanya pengaruh penurunan (subsidence) muka tanah maupun perubahan muka tanah akibat penataan lahan.

Adapun penggolongan persawahan rawa pasang surut menurut P4S adalah sebagai berikut :

a. Rawa Kategori I

Merupakan daerah yang selalu terluapi oleh pasang tertinggi dari variasi tinggi muka air pasang surut sungai. Tinggi muka tanah rata-rata selalu berada dibawah muka air pasang tertinggi rata-rata (MAPTR)

b. Rawa Kategori II

Merupakan suatu daerah tidak selalu terluapi air pasang tertinggi dari variasi pasang surut air sungai. Tinggi muka tanah rata-rata kurang lebih sama dengan tinggi muka air pasang tertinggi rata-rata (MAPTR).

c. Rawa Kategori III

Merupakan suatu daerah rawa yang tidak pernah terluapi oleh air pasang tertinggi dari variasi elevasi pasang surut air sungai. Namun air pasang masih tetap mempengaruhi elevasi muka air tanah sehingga kedalaman muka air tanah tidak lebih kurang 0,50 meter di bawah permukaan tanah. Tinggi muka tanah rata-rata tidak lebih dari 50 cm di atas elevasi muka air tertinggi

d. Rawa Kategori IV

Merupakan daerah yang tidak pernah terluapi air pasang tertinggi dari variasi elevasi pasang tertinggi dari variasi elevasi pasang surut air sungai dan memiliki ketinggian muka air tanah yang lebih dari 0,50 meter dibawah permukaan tanah. Tinggi muka tanah jauh diatas tinggi muka air pasang tertinggi (MAPTR)

2. Rawa Non Pasang Surut. (Lebak)

Daerah rawa non pasang surut seringkali disebut juga sebagai tanah lebak. Pada umumnya merupakan lahan dengan keadaan topografi yang rendah dan berbentuk cekungan-cekungan. Akibat air hujan daerah tersebut tergenang air. Pada daerah-daerah yang berada di dekat sungai, air yang menggenangi berasal dari luapan air sungai di sekitarnya. Namun ada pula daerah rawa yang sudah digenangi air hujan sebelumnya, dan ditambah oleh air sungai yang melimpah ke daerah tersebut

Adapun faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya penggenangan air pada daerah lahan rawa non pasang surut (lebak), yaitu :

1. Keadaan topografi yang datar, rendah dan berbentuk cekungan-cekungan.
2. Keadaan drainase alam yang tidak baik

Berdasarkan pada tinggi rendahnya genangan air, daerah rawa non pasang surut (Lebak) dapat dipilih dalam tiga klasifikasi sebagai berikut :

Lebak Pematang

Daerah (zone) yang memiliki ketinggian topografi relatif cukup tinggi sehingga jangka waktu genangan airnya relatif pendek. Zone ini disebut lebak pematang.

Lebak Tengah

Daerah (zone) yang berada diantara lebak pematang dan lebak dalam sehingga disebut lebak tengah

Lebak Dalam

Daerah (zone) dengan ketinggian topografi terendah sehingga jangka waktu tergenang air relatif sangat lama atau terus menerus. Zone ini disebut lebak dalam.

C. Jenis Tanah di Daerah Lahan Rawa

Tanah di daerah rawa pasang surut terdiri dari berbagai jenis. Disamping terdapat tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik, misalnya tanah endapan lumpur sungai, terdapat pula bermacam-macam jenis tanah yang kurang baik untuk budidaya pertanian. Jenis tanah yang kurang baik tersebut antara lain:

1. Tanah Sulfat Asam
2. Tanah Gambut
3. Tanah Salinitas (tanah yang kadar garam tinggi)
4. tanah yang ditumbuhi oleh rumput-rumputan

dari berbagai jenis tanah (soil) yang terdapat di daerah lahan rawa di atas, banyak dipergunakan untuk lokasi lahan pemukiman transmigrasi dan pemukiman penduduk di daerah lahan rawa pasang surut dan lahan rawa non pasang surut (Lebak)

☐ Tanah Sulfat Asam

Tanah ini biasanya terbentuk pada endapan lumpur yang masih muda di daerah payau. Akibat proses sedimentasi, larutan sulfat dari air laut dirubah menjadi sulfid dan elemen sulfur dengan bantuan mikroba-mikroba serta terdapat pula besi dan pirit, bila tanah tergenang oleh air, keadaan piritnya stabil dan tidak membahayakan. Namun, bila tanah tersebut menjadi kering akan mengakibatkan turunnya pH secara drastis sehinggatanah menjadi asam dan menjadi racun bagi tanah dan tanaman.

Beberapa sifat tanah Sulfut Asam adalah :

- a) Miskin unsur hara
- b) Sering mengandung unsur alumunium dan besi
- c) Pada musim kemarau menjadi sangat kering
- d) Lahan yang dekat dengan laut dapat dipengaruhi oleh air asin

☐ Tanah Gambut

Tanah gambut pada umumnya terdapat di daerah pantai dengan tebal yang bervariasi dari 0,1 meter sampai bisa mencapai tebal 15 meter. Umumnya daerah gambut pedalaman atau ke daerah hulu tebal lapisan gambut makin tipis. Menurut karakteristik lingkungannya, dikenal ada tiga macam tanah gambut, yakni : Gambut atas (high peat), Gambut Cekungan (basin peat), dan Gambut Pantai (Coastal Peat).

Struktur tanah gambut memiliki bahan organik yang terkomposisi dengan sempurna, karena berasal dari pembusukan dan pengendapan pohon-pohon, daun dan sampah-sampah hutan yang lain selama beratus-ratus bahkan beribu-ribu

tahun, bila tanah gambut mengandung lebih dari 85% bahan organik, maka tanah tersebut dapat disebut sebagai tanah gambut.

Sifat penting dari tanah gambut antara lain :

- a) Keasaman (pH) berkisar antara 3 – 4,5
- b) Berpori-pori banyak sehingga mempunyai kandungan air yang besar
- c) Apabila dikeringkan akan kehilangan daya absorsinya, sehingga air tidak lagi diserap
- d) Gambut tipis berbeda sifatnya dengan gambut tebal.

☐ Tanah Salinitas

Tanah salinitas adalah jenis tanah dngan konsentrasi garam larut yang tinggi. Besaran konsentrasigaram larut yang ada dalam tanah tersebut diukur dari sifatkonduksi listrik (electical Conductivity disingkat E Ce) dalam satuan mm hos/cm. Tanah ini terutama terdapat didaerah sepanjang pantai.

Kriteria teknis tanah bersalinitasi adalah :

- a) Sifat konduksi hantar listrik E Ca lebih besar dari 4 m hos/com
- b) ESP (exchangeable sodium persentase) lebih kecil dari 15%
- c) Nilai pH dalam keadaan jenuh kurang dari 8,5

Tanah salinitas umumnya terjadi akibat dari sistem drainase yang buruk. Dengan demikian sistem tata air yang baik yang terdiri dari usaha mencegah kerusakan tanah akibat air garam, pencucian tanah dan memperbaiki drainase, merupakan upaya yang dapat dilakukan pada reklamasi jenis tanah ini.

☐ Tanah Berumput

Tanah berumput pada umumnya ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman (semak belukar). Dimana lahan-lahan tersebut cepat sekali berkembang dan tingkat populasi rumput liar tersebut sangat sulit terkontrol untuk berbagai kegiatan budidaya pertanian. Dan tanah berumput sangat cocok untuk pengembangan lokasi permukiman dan transmigrasi.

Berdasarkan hasil survey lapangan, informasi dari BPN dan beberapa tinjauan teori diatas pemilihan dan penggolongan lahan rawa di perkotaan Kuala Kapuas merupakan suatu lahan rawa pasang surut yang dikategorikan sebagai lahan rawa kategori I, kategori II dan Kategori III, fungsi lahan rawa pasang surut

di perkotaan Kuala Kapuas yang termasuk rawa kategori I , yakni banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi pasang surut. Sedangkan rawa kategori II dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi pasang surut, perkebunan campuran dan beberapa bagian dimanfaatkan sebagai lokasi pemukiman penduduk dan untuk rawa kategori III sebagian besar dimanfaatkan sebagai lokasi pemukiman penduduk, dimana lokasi lahan rawa pasang surut kategori III ini banyak dijumpai pada daerah-daerah pemukiman penduduk di pusat kota.

Sedangkan untuk jenis tanah yang ada di lahan rawapasang surut tersebut mengandung tanah sulfat asam dimana lokasi lahan rawa perkotaan Kuala Kapuas banyak mengandung endapan-endapan lumpur, dengan tingkat keasaman tinggi dan dipengaruhi oleh air laut (air asin) pada saat musim kemarau panjang. dan tanah rawa pasang surut di perkotaan Kuala Kapuas juga mengandung jenis aluvial hidromorfik gleihumus, tanah rawa podsolik merah, kuning yang tahan terhadap erosi serta tanah aluvial organosol yang banyak mengandung air pasang surut dipengaruhi oleh anak-anak sungai

1.5.2. Program Perbaikan Pemukiman Kumuh

1.5.2.1. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh Di Indonesia

Kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dilaksanakan dengan berbagai upaya, yaitu ¹⁴:

- 1) Meniciptakan keadaan dimana setiap keluarga dapat menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur. Suatu kondisi yang memenuhi persyaratan kelayakan dalam hunia, kelayakan sosial, kelayakan kesehatan, kelayakan dan konstruksi, kelayakan kenyamanan dan keindahan serta kawasan pemukiman yang terbentuk tadi dapat berfungsi sebagai wahana kehidupan dan penghidupan warganya yang semakin tertib dan meningkat mutunya.

¹⁴Siswono Yudohusodo., Et al Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta 1991 hal 6

- 2) Mendorong terciptanya kawasan pemukiman yang dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya.
- 3) Mengusahakan agar proses pembangunan perumahan dan pemukiman dapat menjadi peluang dalam memperluas kesempatan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi.
- 4) Menetapkan kebijaksanaan yang bertumpu kepada pandangan, bahwa pada hakekatnya pembangunan perumahan dan pemukiman itu merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri.
- 5) Mengarahkan peran Pemerintah untuk memberikan penyuluhan, bimbingan dan menciptakan iklim usaha serta iklim pembangunan. Disamping itu mendorong dan menggerakkan serta merangsang peran serta masyarakat luas, menumbuhkan swakarsa dan mengembangkan swadaya masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukimannya sendiri. Pemerintah juga mengatur agar pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman itu dapat berjalan dengan tertib dan teratur.
- 7) Memberikan arah kepada pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan berdasarkan azas-azas keadilan, pemerataan dan keterjangkauan, berwawasan serta memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.
- 8) Memberikan penekanan kepada pembangunan perumahan dan pemukiman yang bersifat multi sektoral, yang perlu didukung oleh berbagai kebijaksanaan penunjang, meliputi aspek-aspek tata ruang, pertanahan, prasarana dan fasilitas lingkungan, teknologi membangun, industri bahan bangunan dan jasa konstruksi, pembiayaan, pengembangan sumberdaya manusia, kelembangaan, peraturan perundang-undangan serta penelitian dan pengembangan. Oleh karenanya diperlukan koordinasi yang efektif antara unsur-unsur instansi yang terkait penanganan masalah perumahan dan pemukiman.

a. Langkah-langkah Kebijakan Pembangunan Perumahan Nasional

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional maka tujuan pembangunan perumahan dalam jangka panjang ditujukan agar setiap keluarga menempati satu rumah yang layak serta dapat menjamin ketentraman hidup. Keadaan ini tidak

dapat dicapai sekaligus dan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada pada pemerintah dan masyarakat.

Mengingat besarnya kebutuhan perumahan dan kemampuan sebagian besar masyarakat yang masih rendah serta keterbatasan kemampuan pemerintah, maka peningkatan pembangunan perumahan rakyat dilakukan secara bertahap dan perlu ditetapkan prioritas-prioritas berdasarkan mendesaknya kebutuhan perumahan dari berbagai golongan masyarakat dan daerah pengembangan dan memperhatikan manfaatnya dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi, terutama dalam menunjang usaha perluasan lapangan kerja. Dalam rangka mengatasi permasalahan dari perumahan maka diperlukan suatu kebijaksanaan itu antara lain :

➤ *Kebijaksanaan Umum*

Dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungan pemukiman pada umumnya perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan perumahan rakyat dalam rangka pembangunan sosial-ekonomi nasional diselenggarakan sesuai dengan strategi pengembangan wilayah yang berimbang.
- (2) Perlu disusun dan dibina sistem yang terarah dan terpadu dalam bidang pembangunan pemukiman dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan rakyat dan terwujudnya lingkungan hidup yang sehat, perkembangan kota dan desa yang tertib, efisien dan serasi dengan pembangunan daerah. Dalam hal ini peranan Pemerintah Daerah perlu lebih di tingkatkan.
- (3) Untuk menanggulangi masalah ketidak keseimbangan kemampuan dan kepadatan antara penduduk kota di kota dan di desa, antara pulau dengan pulau, dan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, perlu diambil pendekatan yang integral dan koordinatif dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dengan berlandaskan pada asas keadilan dan pemerataan.

- (4) Usaha pengembangan wilayah pemukiman baru melalui program transmigrasi perlu terus dilanjutkan, mengingat bahwa mengumpulkan sebagian besar penduduk di pulau Jawa akan mengakibatkan daya dukung pulau ini akan menjadi semakin kritis. Pengembangan tersebut harus didahului dengan penelitian yang cermat dan seksama, antara lain mengenai keadaan tanah, dan air, kemungkinan penyediaan lapangan kerja serta keadaan sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Kebijakan pembangunan perumahan rakyat berkaitan erat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang lain seperti kebijaksanaan kependudukan, kebijaksanaan pertanahan, kebijaksanaan moneter dan perkreditan, kebijaksanaan riset dan pengembangan teknologi dan sebagainya, sehingga program pengembangan perumahan rakyat harus diserasikan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Dalam hal ini, pola koordinasi perlu lebih dimantapkan, diikuti pula dengan pelaksanaannya secara konsekuen.
- (6) Sebagai mekanisme di dalam penentuan kebijaksanaan, program dan pelaksanaan pembangunan peranan sarana-sarana kelembagaan yang telah ada perlu dimantapkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- (7) Dalam rangka meningkatkan pembangunan perumahan rakyat berbagai sistem pengadaan perumahan perlu dimantapkan dan disempurnakan dan untuk itu harus diadakan monitoring dan evaluasi yang intensif dan terus-menerus dari berbagai kegiatan.
- (8) Dalam rangka meningkatkan pembangunan perumahan rakyat berbagai sistem pengadaan perumahan perlu dimantapkan dan disempurnakan dan untuk itu harus diadakan monitoring dan evaluasi yang intensif dan terus-menerus dari berbagai kegiatan.
- (9) Perlu adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang sesuai antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan perumahan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri.

- (10) Pengikutsertaan sektor usaha swasta dan masyarakat perorangan ditingkatkan dengan membina dan mengarahkan badan-badan pembangunan perumahan swasta, mengembangkan organisasi-organisasi yang tidak mencari keuntungan (non profit) seperti koperasi dan sebagainya, serta mengusahakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Dalam hal ini perlu dikembangkan kemungkinan pemilikan tanah untuk pembangunan perumahan dari koperasi-koperasi.
- (11) Suatu sistem lembaga pembiayaan yang lebih efektif dan dapat mendorong terhimpunnya modal untuk pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan lebih dikembangkan lagi mencakup daerah pedesaan sehingga memungkinkan pengembangan perumahan dalam jumlah yang besar dengan harga yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak.
- (12) Pengembangan perumahan dalam skala besar, memerlukan penyediaan tanah dalam jumlah yang cukup luas, lokasi yang serasi serta harga yang relatif rendah. Untuk itu perlunya adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :
 - (a) Pengaturan perencanaan dan pengendalian peruntukan tanah yang memberikan kemungkinan penyediaan tanah yang cukup.
 - (b) Pengendalian harga tanah
 - (c) Sistem perpajakan tanah perumahan yang progresif dan rasional berdasarkan azas keadilan dan pemerataan untuk semua kelompok masyarakat.
 - (d) Pembatasan pemilikan tanah yang berlebihan untuk kepentingan perorangan.
 - (e) Penguasaan tanah sebanyak mungkin oleh Pemerintah.
- (13) Pembangunan perumahan memerlukan investasi yang sangat besar, sedangkan kenyataan pada dewasa ini sumber-sumber dana yang ada masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu ada pendekatan yang mengarah pada pengerahan dana-dana yang bersumber dari masyarakat sendiri antara lain tabungan, asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan

yang memungkinkan. Beberapa pokok kebijaksanaan yang diperlukan sebagai berikut:

- (a) Pengembangan sistem pengeralahan dana masyarakat berupa tabungan, asuransi dan dana-dana lainnya untu keperluan pembangunan perumahan rakyat.
 - (b) Pembiayaan oleh pemerintah dalam pembangunan perumahan diarahkan kepada usaha-usaha yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, misalnya program perbaikan kampung.
 - (c) Pengembangan sistem perkreditan (kredit konstruksi/kredit pemilikan rumah) yang didasarkan adanya diferensiasi kemampuan masyarakat suku bunganya.
 - (d) Pengembangan sistem subsidi silang dan usaha meraih kembali keuntungan dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah.
- (14) Dalam bidang hukum, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap perangkat peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan perumahan dan perkembangan masyarakat. Terutama peraturan perundangan mengenai tanah perlu lebih dimantapkan, dengan pelaksanaannya secara konsekuen.
- (15) Kegiatan penelitian dan pengembangan sistem dan tata cara penyelenggaraan pembangunan perumahan mencakup seluruh aspeknya perlu dilakukan secara menerus dalam rangka menentukan sistem yang efisien dan efektif, sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat.
- (16) Dalam mengatasi masalah tak terjagkaunya harga tempat pemukiman oleh daya beli masyarakat, perlu dikembangkan desain bentuk dan konstruksi perumahan yang sesuai dengan fungsinya bagi sebagian besar rumah tangga Indonesia, dan keadaan lingkungan serta cukup memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat dibangun dengan harga yang relative murah.

- (17) Perlu digalakkan produksi bahan bangunan yang memenuhi standart mutu, murah dan awet dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan menerapkan teknologi pengawetan bahan.
- (18) Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pembinaan dan pengembangan industri konstruksi nasional dan industri-industri kecil/ kerajinan bahan bangunan dengan memberikan bimbingan teknik dan modal kerja serta dengan memanfaatkan sebanyak mungkin bahan-bahan/ produk lokal.
- (19) Untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi perlu untuk mengatasi berbagai krisis tata guna tanah yang sudah ada sampai saat ini, sedang untuk keperluan yang akan ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk mampu menganalisis dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan, mengetahui cara mengatasi atau memilih alternatif lain yang lebih baik.
- (20) Penanaman dan peningkatan pengertian serta kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah dan lingkungan pemukiman yang sehat perlu diteruskan disertai dengan usaha penyempurnaan dan peningkatan prasarana pendukung lingkungan perumahannya.

➤ *Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*

Kebijaksanaan Lingkungan Hidup bertitik tolak Garis-garis Besar Haluan Negara 1983 yang mencantumkan bahwa hakekat pembangunan Indoneasia adalah pembangunan untuk manusia seutuhnya, dengan ciri-ciri pokok keselarasan hubungan antara manusia dengan masyarakat, dan antara manusia dengan lingkungan alam. Apapun yang dibangun, arah pembangunan tidak boleh melepaskan diri dari tujuan membentuk manusia seutuhnya. Keselarasan hubungan antara manusia dengtan lingkungan merupakan salah satu ciri pokoknya. Maka oleh karena itu harus dijaga agar faktor lingkungan selalu diperhatikan dalam arah tujuan segala kegiatan pembangunan.

Faktor lingkungan hidup tidak saja paling sebagai tujuan pembangunan, tetapi juga penting sebagai dimensi pembangunan. Dalam undang-undang nomor tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup dengan jelas dicantumkan bahwa kita harus

mengembangkan pembangunan berwawasan lingkungan. Tersimpulkan di sini keharusan cara menggunakan sumber-sumber yang bijaksana agar dapat menunjang proses pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia.

Pertimbangan Lingkungan Hidup tidaklah berarti bahwa lingkungan tidak bisa diubah dan sumber alam tidak bisa dimanfaatkan. Pertimbangan lingkungan hidup tidak menentang berlangsungnya proses pembangunan, lebih-lebih jika ini diperuntukan bagi kesejahteraan manusia dan masyarakat. Yang menjadi kecemasan banyak ahli pembangunan adalah bahwa proses pembangunan tidak memperdulikan faktor lingkungan hidup, mengeksploitasi sumber alam secara serampangan sehingga melumpuhkan kemampuan sumber alam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Proses pembangunan bersifat jangka panjang, harus dijaga agar sumber alam mampu menunjang proses jangka panjang ini secara berkesinambungan. Justru demi suksesnya pembangunan jangka panjang inilah maka lingkungan hidup harus menjadi perhatian utama.

Sumber alam utama dalam pengembangan pemukiman dan perumahan adalah ruang air dan udara, untuk singkatnya lahan dan air. Kelangsungan kawasan perumahan dan pemukiman banyak ditentukan oleh kondisi tanah dan air yang terkelola dengan baik . oleh karena itu, dalam pengembangan pemukiman khususnya perumahan, penggunaan ruang perlu ditata sedemikian rupa sehingga kemampuan alam menyerap kualitas air sebanyak mungkin dapat dipelihara. Hal ini disebabkan sumber alam air akan menjadi faktor yang semakin langka, apabila kegiatan pengembangan pemukiman dan perumahan tidak terkendalikan dampak negatifnya, Dalam upaya memelihara sanitasi pemukiman dan perumahan, kegiatan pencegahan pencemaran kepada air harus dilaksanankan pula sedini mungkin.

Sumber alam lahan akan semakin langka pada masa depan, akibat bertambahnya jumlah penduduk yang selanjutnya memerlukan perumahan dan lapangan kerja di lingkungan pemukiman. Sebagai contoh untuk pemukiman transmigrasi, akibat semakin langkanya ketersediaan lahan

timbul keharusan mengelola tanah yang semakin kurang kualitasnya. Oleh karena itu, patut dipertimbangkan rencana mengelola padang alang-alang menjadi produktif bagi transmigrasi. Disamping itu masalah pemilikan, sekaligus ditangani dalam pola konsep saling menguntungkan. Pemilik padang alang-alang pada waktu ini tidak memetik manfaat dari tanahnya yang terlantar. Dengan campur tangan Pemerintah meningkatkan produktifitas tanah maka si pemilik tanah memperoleh manfaat, yang untuk itu ia diminta mengkompensasikan dengan ditampungnya transmigran.

b. Peraturan Perundang-undangan Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990

Dalam rangka mempercepat peningkatan mutu kehidupan masyarakat terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertempat tinggal di kawasan pemukiman kumuh yang berada di atas tanah Negara, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas tanah Negara. Diinstruksikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Kependudukan Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, untuk melaksanakan peremajaan pemukiman kumuh di daerah perkotaan terutama yang berada di atas tanah Negara di seluruh Indonesia, sesuai dengan pedoman sebagai berikut:

- (a) Peremajaan Pemukiman Kumuh adalah pembongkaran sebagian atau seluruh pemukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah Negara dan kemudian ditempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan rumah susunan serta bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- (b) Peremajaan Pemukiman Kumuh Bertujuan untuk:
 - Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni pemukiman kumuh terutama golongan

masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperoleh perumahan yang layak dalam lingkungan pemukiman yang sehat dan teratur.

- Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
 - Mendorong penggunaan tanah yang efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan pemukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.
- (c) Penghuni lingkungan yang diremajakan ditampung kembali di rumah susun hasil peremajaan atau di lokasi lain yang berdekatan dengan lokasi peremajaan, baik dengan cara memiliki yang didukung dengan fasilitas kredit Pemilikan Rumah maupun dengan cara menyewa. Selama proses pembangunan rumah susun, developer menyediakan rumah penampungan sementara bagi penghuni pemukiman kumuh sepanjang diperlukan.
- (d) Dalam menetapkan lokasi pemukiman kumuh yang akan diremajakan, disamping harus sesuai dengan Pola Dasar Rencana pembangunan Daerah dan atau Rencana Umum Tata Ruang Kota (RTUK), perlu ada pendekatan kepada masyarakat setempat agar masyarakat berperan secara aktif dalam proses peremajaan tersebut. Peremajaan pemukiman kumuh dilakukan dengan menerapkan sistem subsidi silang antara pembangunan rumah susun dengan areal komersial yang berada dikawasan yang diremajakan. Biaya yang dikeluarkan oleh developer untuk pengosongan pemukiman kumuh, penampungan sementara para penghuni-penghuni pemukiman kumuh, pembangunan rumah susun lengkap dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya, pemindahan penghunian ke rumah susun dan tingkat keuntungan yang wajar, memperoleh imbalan berupa areal komersial yang senilai.

- (e) Rumah susun yang dibangun di lokasi peremajaan berikut tanahnya menjadi milik Negara, Menteri Keuangan menyerahkan pengelolaan rumah susun tersebut kepada perum PERUMNAS.
- (f) Rumah susun tersebut dapat disewakan atau dijual oleh perum PERUMNAS. Harga sewa satuan rumah susun ditetapkan dengan memperhatikan besarnya biaya operasi dan pemeliharaan rumah susun. Harga jual satuan rumah susun ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan penghasilan penghuni pemukiman kumuh.
- (g) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan peremajaan pemukiman kumuh dengan pola ini disediakan dari :
 - Badan Usaha Milik Negara khususnya perum PERUMNAS
 - Yayasan, khususnya yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial
 - Developer swasta
- (h) Ratio atas lahan rumah susun dan areal komersial serta banyaknya satuan rumah susun yang dibangun ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dan khusus untuk DKI-Jakarta ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Peremajaan permukiman kumuh di DKI-Jakarta ditetapkan sebagai proyek percontohan untuk dapat dikembangkan di kota-kota lain.
- (i) Tanggung jawab para Menteri, Kepala Badan Pertanahan, para Gubernur dan para Bupati/Walikota adalah sebagai berikut :
 - Menteri Negara Perumahan Rakyat mengkoordinasikan unsure-unsur yang terkait dalam pelaksanaan peremajaan pemukiman kumuh serta memonitor tahap pelaksanaan dan purna pelaksanaan pembangunan.
 - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkoordinasikan program peremajaan pemukiman kumuh ini dengan program-program lain yang berkaitan dengan program peremajaan pemukiman kumuh.
 - Menteri Negara Kependudukan dan lingkungan Hidup memberikan bimbingan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dari kawasan yang diremajakan.

- Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam penyiapan program dan pengaturan peremajaan lingkungan pemukiman kumuh di daerahnya masing-masing serta menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk melakukan inventarisasi pemukiman-pemukiman kumuh yang ada di setiap kota, menyusun usulan proyek dari rencana peremajaan masing-masing kawasan pemukiman kumuh, mencari developer baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan-yayasan maupun perusahaan swasta yang berminat untuk meremajakan serta menetapkan persyaratan-persyaratan hubungan kerjasama antara pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan developer yang berminat.
- Menteri Pekerjaan antara Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan developer yang berminat.
- Menteri Pekerjaan Umum memberikan bimbingan dan bantuan atas pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum, mengatur persyaratan teknis pembangunan rumah susun dan menetapkan harga sewa dan harga jual satuan rumah susun.
- Menteri Sosial memberikan penyuluhan kepada masyarakat pemukiman kumuh yang akan diremajakan, membina peningkatan kesejahteraannya serta mengarahkan penggunaan sebagian dana dari Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelaksanaan peremajaan pemukiman kumuh ini.
- Menteri Keuangan memberikan bimbingan dan pengaturan atas sumber dana untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang dibangun oleh perum PERUMNAS dan pemanfaatan dari penjualan dari penyewaan rumah susun yang dikelola oleh perum PERUMNAS.
- Kepala Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemberian hak atas tanah dalam lokasi yang diremajakan termasuk hak atas tanah areal komersial.

- Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan peremajaan pemukiman kumuh di Daerah Tingkat II.
- Khusus Gubernur Kepala Daerah DKI-Jakarta bertanggung jawab atas penetapan lokasi peremajaan pemukiman kumuh sesuai dengan Pola Dasar Rencana Pembangunan Daerah dan atau Rencana Umum Tata Ruang Kota, pengaturan peremajaan pemukiman kumuh di wilayah DKI-Jakarta, pemberian kemudahan dalam proses perijinan, bantuan pengadaan prasarana, fasilitas lingkungan dan pemindahan penghuni serta pengawasan mutu bangunan rumah susun beserta prasarana dan fasilitas lingkungannya.
- Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas penetapan lokasi peremajaan pemukiman kumuh sesuai dengan Pola Dasar Rencana Pembangunan Daerah dan atau Rencana Umum Tata Ruang Kota, pengaturan peremajaan pemukiman kumuh di Daerah Tingkat I yang bersangkutan, pemberian kemudahan dalam proses perijinan, bantuan pengadaan prasarana, fasilitas lingkungan dan pemindahan penghuni serta pengawasan mutu bangunan rumah susun, prasarana dan fasilitas lingkungannya.

1.5.2.2. Program Perbaikan Permukiman Kumuh yang pernah di Lakukan di Indonesia

Masalah pemukiman yang terdapat di Indonesia tidak begitu saja diabaikan oleh pemerintah. Dalam artian sampai saat ini masih terus berlangsung program perbaikan permukiman kumuh baik dengan cara konvensional seperti perbaikan kampung, program KIP dan sebagainya ataupun cara modern dengan membuat apartemen atau rumah susun untuk masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Berikut ini merupakan penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pemukiman di Indonesia.

A. Program Perbaikan Kampung (KIP)

Program perbaikan kampung adalah program yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan lingkungan permukiman di pemukiman yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke bawah.

Di Indonesia program perbaikan kampung atau dikenal dengan KIP (*Kampung Improvement Program*) telah ada sejak zaman penjajahan. Program KIP di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Surabaya, yaitu pada tahun 1923, pada waktu itu program KIP diadakan untuk menanggapi politis etis dari kaum oposisi di parlemen Belanda dengan tujuan untuk melindungi penduduk yang bermukim di dekat kampung yang pada umumnya dihuni warga Eropa dari bahaya epidemi. Orientasi KIP pada saat itu hanyalah untuk menangani aspek sanitasi kampung saja.¹⁵

Namun sejak PELITA III program perbaikan kampung tidak lagi hanya dipusatkan pada perbaikan fisik melainkan tujuan akhir perbaikan kampung adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sejalan dengan perbaikan fisik lingkungannya, (seperti pembangunan saluran pipa air bersih, jalan kendaraan, jalan setapak, MCK, tempat pembuangan sampah, saluran pematuan, pos-pos/klinik kesehatan, peningkatan rata-rata luas ruangan rumah per penduduk dengan membangun rumah susun) diusahakan pula peningkatan ekonomi masyarakatnya. Selain itu untuk peningkatan kualitas hidup diwujudkan dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Dengan kata lain tujuan utama Program Perbaikan Kampung (KIP) adalah bina lingkungan, bina manusia (peningkatan kualitas hidup) dan bina usaha (peningkatan ekonomi)¹⁶

Di Surabaya gagasan perbaikan kampung bersama masyarakat, terwujud melalui proyek-proyek pembangunan, perbaikan serta pemeliharaan, proyek yang pertama dilaksanakan adalah Proyek W.R. Supratman yang dimulai pada tahun

¹⁵ Johan Silas, *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan*, Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya dan Surabaya Post, 1996 hal 8

¹⁶ Siswono Yudohusodo., *Et al Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta 1991 hal 312

1969 – 1974. realisasi pada proyek ini berupa perbaikan kampung didasarkan pada penyediaan plat beton cetak yang dapat diperoleh warga kampung dan yang bersedia melakukan pemasangan atas usaha masyarakat itu sendiri. Proyek ini didanai melalui anggaran bagian pemeliharaan kota, sehingga besarnya tidak dapat dipastikan.

Proyek W.R. Supratman ini berlanjut dari periode tahun 1974-1975 sampai dengan periode 1982-1983. Pelaksanaan awal program dari KIP ini bertujuan untuk membantu aktifitas/kegiatan masyarakat pada umumnya dan penghuni/warga kampung khususnya di dalam memperbaiki dan memelihara kampungnya, dengan jalan memperbaiki fisik lingkungan yaitu menyediakan/meningkatkan prasarana pokok secara layak, yang meliputi:

- a. Jalan untuk orang dan kendaraan termasuk kelengkapannya
- b. Saluran pematuan
- c. Jaringan air minum dengan kran air untuk minum
- d. Fasilitas sanitasi untuk mandi, cuci, kakus (MCK)
- e. Fasilitas kesehatan masyarakat
- f. Fasilitas pendidikan dasar

Pada tahun 1998, Program Perbaikan Kampung di Surabaya mulai disempurnakan dengan Program Perbaikan Kampung Komprehensif (KIP-K) dengan pendekatan yang memadukan antara *Botem Up dan Top Down*. Secara umum tujuan implementasi Program Perbaikan Kampung Komprehensif (Laboratorium Perumahan dan Permukiman ITS dan LPM-ITS, 2000) adalah:

- a. Meningkatkan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman kampung
- b. Meningkatkan status kepemilikan lahan rumah
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2001, Program KIP-K dikembangkan lagi menjadi pembangunan yang selain merupakan pembangunan di bidang fisik lingkungan permukiman juga melaksanakan pembangunan di bidang sosial ekonomi masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya untuk menggalang sinergi semua kekuatan masyarakat yang

diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan permukiman. Dengan demikian perbaikan kampung adalah bagian dari pemberdayaan dapat diartikan sebagai meningkatkan produktivitas. Dibidang ekonomi.

Tujuan utama KIP-K 2001 (Kampung Improvement Program Komprehensif) adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berorientasi pada pembangunan fisik dan non fisik dilaksanakan melalui:

1. program pengembangan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat diantaranya: peningkatan keterampilan/usaha kecil dan kesehatan
2. program pinjaman rumah tangga: yaitu pinjaman perbaikan sarana tempat tinggal, untuk perbaikan fasilitas rumah seperti pembuatan septic tank, perbaikan dapur, dan penyelesaian air bersih. Dapat pula digunakan untuk usaha ekonomis seperti warung dan usaha rumah tangga.
3. Program perbaikan fisik lingkungan, yaitu bantuan murni untuk memperbaiki fisik lingkungan kampung meliputi: jalan setapak, selokan, MCK dan persampahan.
4. Program peningkatan manajemen lahan, untuk membantu warga memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat tanah. Dengan memberikan kemudahan bantuan dalam proses prosedur pengurusan dan pengajuan IMB serta sertifikat tanah.

Adapun perbedaan antara KIP awal dengan KIP Komprehensif adalah: KIP awal lebih diarahkan pada perbaikan prasarana fisik baik rumah maupun lingkungan kampung untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan aktifitas penduduk yang berakibat meningkatkan ekonomi penduduk kampung sedangkan KIP Komprehensif adalah suatu program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang berorientasi pada pembangunan fisik dan non fisik.

B. Program Peremajaan Lingkungan kumuh

Peremajaan lingkungan kumuh tanpa menggusur bukan pekerjaan mudah. Hasan Poerba (1990) menegaskan peremajaan lingkungan kumuh menyangkut kesiapan sosial dan kelembagaan masyarakat, pemecahan masalah lingkungan kumuh harus didasarkan atas kondisi setempat yang spesifik dan pendekatan bersifat partisipatif. Partisipatif perlu diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat yang lingkungan pemukimannya akan diremajakan di dalam menentukan nasib sendiri.

Di pihak lain, Nugroho Sukmanto (REI, 1990) menyatakan empat pola peremajaan lingkungan kumuh, yaitu relokasi (*resettlement*), pembebasan tanah, konsolidasi tanah (penataan kembali), dan partisipasi masyarakat setempat dengan sistem bank tanah (*land banking*). Relokasi bisa dilakukan semacam transmigrasi bedol desa, pembebasan tanah memberi peluang kepada warga setempat untuk tinggal di rumah susun atau pindah ke daerah lain di pinggir kota, konsolidasi tanah adalah pengefektifan tanah dan wilayah kota, sedangkan bank tanah dapat mengendalikan tanah dan memperhatikan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*).¹⁷

Peremajaan lingkungan pemukiman kumuh mempunyai tiga tujuan¹⁸ :

Pertama, meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni pemukiman yang sehat dan teratur.

Kedua, mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.

1.6 . Landasan Penelitian

Landaan teori merupakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Dengan teori-teori ini memberikan kemudahan dalam menentukan suatu batasan dalam bahasan penelitian.

¹⁷ Ibid, hal 97.

¹⁸ Ibid, hal 92.

1.6.1. Pemukiman Kumuh Daerah Rawa.

Dari karakteristik daerah rawa dan karakteristik pemukiman kumuh maka pemukiman kumuh daerah rawa bila dilihat dari karakteristik fisik, sosial dan ekonomi:

1. Karakteristik Fisik : Pemukiman yang tidak layak huni karena menurunnya kualitas lingkungan akibat dari budaya kumuh masyarakatnya, prasarana lingkungan tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, kualitas konstruksi dan bangunan yang rendah, kepadatan bangunan tinggi, dekat dengan pusat kegiatan kota
2. Karakteristik Sosial :berpenduduk padat, dekat dengan pusat kegiatan kota, sebagian besar warganya bekerja di sektor informal dan mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal dan berada pada lingkup skala RT
3. Karakteristik Ekonomi : Berpendapatan rendah

1.6.2. Kriteria Pemukiman Kumuh

Dalam penelitian “Prioritas Perbaikan Permukiman Kumuh Di Perkotaan Kuala Kapuas maka kriteria yang digunakan berdasarkan pendapat Ir. Budi D. Sinulingga , A.Ramlan Surbakti dan Prof. DR. Parsudi Suparlan. Pengambilan kriteria tersebut berdasarkan: untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2.

- 1) Kriteria yang dipakai dipilih berdasarkan adanya komponen yang berbeda dari masing-masing kriteria.
- 2) Karena kriteria dari masing-masing referensi terdapat kesamaan pengertian, maka sebagian dari kriteria-kriteria yang dipakai disesuaikan dengan kriteria dari referensi pembandingnya yang lebih spesifik.

1.6.3. Peremajaan Kota

Peremajaan kota adalah upaya pembangunan yang terencana untuk merubah atau memperbaharui suatu kawasan kota yang mutu lingkungannya rendah. Kemerosotan suatu kawasan dapat saja terjadi karena kondisi fisik lingkungan yang sudah tidak memadai lagi dalam mendukung efektivitas fungsi lingkungan atau oleh pelapukan karena umur. Pembangunan kota dapat menyebabkan berubah fungsi lama atau fungsi semula yang tidak lagi sesuai dengan tatanan kota setelah pengembangan.

Tabel 1.3
Penentuan Kriteria Pemukiman Kumuh

Kriteria Pemukiman Kumuh			Kriteria Yang Dipakai
A. Ramlan Surbakti	Ir. Budi D. Sinulingga, M. Si	Prof. DR. Parsudi Suparlan	
Fisik : a) Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisik pun tidak teratur dan terawat (dalam hal bangunan, halaman dan jalan-jalan), serta sempitnya ruang antar bangunan dan tidak ada ruang terbuka sama sekali. b) Langkanya pelayanan kota (urban services), seperti air minum, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), listrik, sistem pembuangan kotoran dan sampah, serta perlindungan kebakaran. c) Rawan tanah longsor, kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya penyakit d) Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori rumah darurat (substandard housing conditions), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-alang dan bahan yang cepat hancur lainnya. e) Perkampungan miskin ini pada umumnya berlokasi di sekitar	Fisik : a) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, terkadang jalan ini sudah tersembunyi di balik atap-atap rumah yang bersinggungan satu sama lain. Selain sempit, jalan-jalan ini ada yang masih berupa jalan tanah. b) Fasilitas drainase tidak memadai. Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air dan bahkan mengakibatkan banjir. c) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang langsung membuang ke saluran yang dekat dengan rumah Ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat. Sebagian dari penghuni membuat wc cubluk, tetapi karena lahan sangat sempit maka dibuatlah berdekatan dengan sumur dangkal yang dipergunakan sebagai air minum, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran sumur	Fisik : a) Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik,gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit). b) kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. c) adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaaan ekonomi penghuninya. d) Potret buruk kehidupan perkotaan, makin lama usia perkembangan suatu kawasan kumuh berarti kawasan tersebut dianggap sudah lebih beradaptasi dan menyatu dengan kehidupan perkotaan	Fisik : a) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, terkadang jalan ini sudah tersembunyi di balik atap-atap rumah yang bersinggungan satu sama lain. Selain sempit, jalan-jalan ini ada yang masih berupa jalan tanah. b) Fasilitas drainase tidak memadai. Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air dan bahkan mengakibatkan banjir c) Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik,gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit) d) Potret buruk kehidupan perkotaan .Makin lama usia perkembangan suatu kawasan kumuh berarti kawasan tersebut dianggap sudah lebih beradaptasi dan menyatu dengan kehidupan perkotaan e) Langkanya pelayanan kota (urban services), seperti air minum, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), listrik, sistem pembuangan kotoran dan

Kriteria Pemukiman Kumuh			Kriteria Yang Dipakai
A. Ramlan Surbakti	Ir. Budi D. Sinulingga, M. Si	Prof. DR. Parsudi Suparlan	
pusat kota dan seringkali tidak jelas pula status hukum tanah yang ditempatinya (squatter) f) Sebagian besar lokasinya berada dengan pusat kegiatan ekonomi kota atau pusat-pusat kegiatan kota. Pemikiran penghuni kawasan kumuh ini, bahwa lebih dekat dengan pasar atau pusat kegiatan ekonomi lebih baik, walaupun mereka harus berdesakan di petak-petak rumahnya	dangkal sangat besar sekali. e) Fasilitas sumber air bersih sangat minim, sehingga memanfaatkan air sumur dangkal yang sudah tercemar atau menampung air hujan dan bahkan membeli air bersih kalengan. Ada juga yang terpaksa memanfaatkan air sungai terdekat yang sudah sangat kotor akibat buangan air kotor dari rumah-rumah penduduk. f) Umumnya bangunan-bangunan yang tidak permanen dan malahan terlihat banyak yang dalam kondisi bangunan darurat. g) Pemilikan hak terhadap lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tak memiliki status apa-apa.		sampah, serta perlindungan kebakaran. f) Rawan Tanah Longsor kebakaran dan rawan terhadap timbulnya penyakit g) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang langsung membuang ke saluran yang dekat dengan rumah. Ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat. h) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. i) Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori rumah darurat (substandard housing conditions), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-alang dan bahan yang cepat hancur lainnya. j) Sebagian besar lokasinya berada dengan pusat kegiatan ekonomi kota

Kriteria Pemukiman Kumuh			Kriteria Yang Dipakai
A. Ramlan Surbakti	Ir. Budi D. Sinulingga, M. Si	Prof. DR. Parsudi Suparlan	
Sosial : a) Penduduk sangat padat antara 250 – 400 jiwa/km² b) Pendidikan rendah	Sosial : a) Permukiman tersebut dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel, karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi dari pedesaan. b) Secara sosial terisolasi dari permukiman masyarakat lainnya	Sosial : a) permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai: • sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar • satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari RT atau sebuah RW • Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW. atau	atau pusat-pusat kegiatan kota. Pemikiran penghuni kawasan kumuh ini, bahwa lebih dekat dengan pasar atau pusat kegiatan ekonomi lebih baik, walaupun mereka harus berdesakan di petak-petak rumahnya k) Pemilikan hak terhadap lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tak memiliki status apa-apa. Sosial : a) Penduduk sangat padat antara 250 – 400 jiwa/km² c) permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai: • sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar • satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari RT atau sebuah RW • Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW. atau bahkan

Kriteria Pemukiman Kumuh			Kriteria Yang Dipakai
A. Ramlan Surbakti	Ir. Budi D. Sinulingga, M. Si	Prof. DR. Parsudi Suparlan	
47		bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar. b) penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beraneka ragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut	terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar. c) penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beraneka ragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut e) Secara sosial terisolasi dari permukiman masyarakat lainnya.
Ekonomi : Berpendapatan rendah di bawah upah minimum harian rata-rata	Ekonomi ; Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah/berproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan	Ekonomi : Sebagian besar warga yang menempati kawasan kumuh berpenghasilan rendah	Ekonomi ; Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah

Sumber : Hasil Kajian

Peningkatan mutu lingkungan dalam peremajaan kota, dimaksudkan untuk tatanan sosial ekonomi di kawasan yang bersangkutan. Dengan demikian tatanan sosial ekonomi yang baru, dapat lebih mampu menunjang pengembangan wilayah kota lainnya karena naiknya efektivitas, efisiensi dan produktifitas kawasan tersebut setelah diremajakan. Jadi peremajaan kota bukan semata-mata diajukan kepada perbaikan fisiknya saja, tetapi yang utama adalah perbaikan tatanan sosial ekonomi masyarakat.¹⁹

1.6.4. Rumusan Variabel.

Rumusan variabel merupakan satu kesatuan dari variabel amatan yang menjadi sub pokok bahasan sehingga menjadi acuan untuk mengetahui hasil akhir yang menjadi tujuan penelitian terhadap penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh. Dalam perumusan variabel ini akan menentukan suatu karakteristik maupun hal-hal yang berhubungan dengan penentuan prioritas perbaikan kumuh.

Rumusan variabel ini didapat dari beberapa referensi yang mendukung terhadap judul tersebut dan juga dapat dirumuskan beberapa variabel-variabel seperti yang dijelaskan pada tabel 1.4.

1.7. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara pendekatan yang harus dilakukan dalam kegiatan studi ini untuk mendekati suatu permasalahan serta sekaligus mencari dan menemukan serta mengungkapkan suatu permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh di Perkotaan Kuala Kapuas dengan tinjauan terhadap kualitas pemukiman sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai, dalam studi ini akan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

¹⁹ Siswono Yudohusodo, et.al, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta 1991, Hal 332

Tabel 1.4.
Rumusan Variabel

Sasaran	Variabel	Kajian	Kriteria	Definisi operasional
Penentuan kriteria pemukiman kumuh	Fisik	Kondisi perkerasan jalan	- Aspal - Tanah - Jembatan Kayu	Untuk penilaian kondisi jalan dilihat berdasarkan kualitas bahan yang digunakan, apabila kualitas bahan yang digunakan rendah, tidak terawat dan bisa membahayakan pengguna jalan maka dianggap sesuai dengan kriteria pemukiman kumuh
		Kondisi jaringan drainase	- Lancar - Tidak lancar	Drainase dinilai berdasarkan kelancaran sirkulasi air, jika pada daerah rawa tidak terjadi pergantian air maka aliran airnya tidak lancar dan ini menunjukkan kualitas lingkungan yang buruk dan termasuk dalam kriteria pemukiman kumuh.
		Kondisi Bangunan	- Permanen - Semi permanen - Temporer	Kondisi perumahan digolongkan berdasarkan kualitas bahan yang digunakan, semakin banyak bangunan temporer pada satu kawasan maka dianggap termasuk dalam kriteria kumuh.
		Kerapatan/kepadatan bangunan	- Tidak rapat (> 5 meter) - Sedang (< 5 meter) - Rapat (berdempetan)	Kerapatan/kepadatan bangunan termasuk dalam kategori kumuh apabila jaraknya berdempetan dan jarak antara rumah yang satu dengan yang lain hanya berjarak < 5 m.
		Usia kawasan kumuh	- Setelah tahun 1990 - Antara tahun 1985 – 1990 - Sebelum tahun 1985	Umur kawasan sangat berpengaruh terhadap kehidupan perkotaan semakin tua umur suatu kawasan dianggap termasuk dalam kategori kumuh
		Sumber Air Bersih	- PDAM - Kran umum - Sungai	Dikategorikan masuk dalam kriteria kumuh apabila pelayanan akan air bersih kurang dan sebagian besar masyarakat memanfaatkan

Sasaran	Variabel	Kajian	Kriteria	Definisi operasional
			- Sumur	sumur yang tercemar air rawa.
		Pembuangan sampah	- Dibuang ke TPS - Dibuang ke tempat sampah lalu diambil petugas. - Dibakar - Ditumpuk disekitar hunian - Membuang di sungai	Semakin banyak warga yang membuang sampah disekitar hunian dan sungai menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan dianggap sesuai dengan kriteria kumuh
		Pelayanan listrik	- Listrik - Bukan listrik	Penilaian berdasarkan minimnya masyarakat yang memanfaatkan listrik sebagai sumber penerangan
		Sistem Sanitasi	- Sanitasi Pribadi - MCK - Sungai	Sistem sanitasi dibedakan berdasarkan penggunaannya yaitu sanitasi pribadi, sungai, dan MCK, dikategorikan kumuh apabila sebagian besar masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan akhir.
		Jarak Lokasi pemukiman kumuh dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat kegiatan kota	- ≤ 1 km - 1 km – 5 km - > 5 km	Penilaian jarak lokasi pemukiman kumuh dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat kegiatan kota berdasarkan pada besarnya jarak pencapaian. Semakin dekat jarak pemukiman kumuh dengan pusat kegiatan kota atau kegiatan ekonomi maka munculnya pemukiman kumuh semakin besar.
	Sosial	Jumlah penduduk dalam satu wilayah (jiwa/ha)	- ≤ 314 jiwa/ha - 314 – 343 jiwa/ha - ≥ 343 jiwa/ha	Jumlah peduduk dikategorikan kumuh apabila dalam satu kawasan penduduk berjumlah lebih dari 343 jiwa/ha.
		Tingkat Pendidikan	- Perguruan Tinggi - Se-tingkat SMU - Se-tingkat SMP	Semakin banyak penduduk yang tidak sekolah maka kawasan tersebut masuk dalam kategori pemukiman kumuh

Sasaran	Variabel	Kajian	Kriteria	Definisi operasional
			- Tingkat SD - Tidak Sekolah.	
		Mata Pencanharian	- PNS - Pengangguran dll	Akan termasuk dalam kriteria kumuh apabila banyak jumlah penduduk yang tidak bekerja
	Ekonomi	Pendapatan rendah	- > Rp 150.000 - Rp. 150.000 – Rp. 500.000 - Rp. 500.000 – 1 jt - Rp. > 1 jt	Semakin rendah tingkat pendapatan masyarakat maka termasuk dalam kriteria pemukiman kumuh
Penentuan Prioritas perbaikan pemukiman kumuh	Fisik	Kondisi perkerasan jalan	- Aspal - Tanah - Jembatan Kayu	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang banyak terdapat kondisi jalan jembatan kayu yang tidak terawat dan berlobang.
		Kondisi jaringan drainase	- Lancar - Tidak lancar	Perbaikan lebih diprioritaskan untuk kawasan yang aliran airnya tidak lancar.
		Kondisi bangunan	- Permanen - Semi permanen - Temporer	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang kondisi bangunannya masih banyak terdapat bangunan temporer
		Kerapatan/kepadatan bangunan	- Rapat (berdempetan) - Sedang (< 5 meter) - Tidak rapat (> 5 meter)	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan dengan kerapatan/kepadatan bangunan yang sangat tinggi
		Usia kawasan kumuh	- Sebelum tahun 1985 - Antara tahun 1985 – 1990 - Setelah tahun 1990	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang usianya lebih tua.
		Sumber air bersih	- PDAM - Kran umum - Sungai - Sumur	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan dengan pelayanan sumber air bersihnya yang kurang terlayani dan tercemar.
		Pembuangan sampah	- Dibuang ke TPS - Dibuang ke tempat	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang sebagian besar warganya membuang

Sasaran	Variabel	Kajian	Kriteria	Definisi operasional
			sampah lalu diambil petugas. - Dibakar - Ditumpuk disekitar hunian - Membuang di sungai	sampah di sekitar hunian dan sungai.
		Pelayanan listrik	- Listrik - Bukan listrik	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang pelayan listrik masih kurang
		Sistem Sanitasi	- Sanitasi Pribadi - MCK - Sungai	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang sistem sanitasinya masih kurang dan masih jauh dari standar kesehatan.
		Jarak Lokasi pemukiman kumuh dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat kegiatan kota	- ≤ 1 km - 1 km – 5 km - > 5 km	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang jaraknya dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat kegiatan kota
	Sosial	Jumlah penduduk dalam satu wilayah (jiwa/ha)	- ≤ 314 jiwa/ha - 314 – 343 jiwa/ha - ≥ 343 jiwa/ha	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan dengan jumlah penduduk terpadat
		Tingkat Pendidikan	- Tingkat SD - Se- tingkat SMP - Se-tingkat SMU - Perguruan tinggi - Tidak sekolah	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang mayoritas penduduknya tidak sekolah
		Mata pencaharian	- Pengangguran - PNS - ABRI dll	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat pengangguran yang tinggi.
	Ekonomi	Tingkat Pendapatan Masyarakat	- $> \text{Rp } 150.000$ - $\text{Rp. } 150.000 - \text{Rp. } 500.000$ - $\text{Rp. } 500.000 - 1 \text{ jt}$ - $\text{Rp. } > 1 \text{ jt}$	Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan yang sebagian besar warganya berpendapatan dibawah $\text{Rp } 150.000/\text{bulan..}$

Sumber : Hasil Kajian

Menetapkan kawasan mana yang termasuk dalam kriteria kumuh sesuai dengan karakteristik perkotaan Kuala Kapuas, oleh karena itu dilakukan proses pemilihan pemukiman kumuh :

1. Mendapatkan informasi dari pemerintah daerah setempat dalam lingkup batasan daerah studi (Perkotaan Kuala Kapuas) mengenai pemukiman kumuh yang akan diteliti sebagai bahan pertimbangan.
2. Melakukan pengamatan langsung terhadap kawasan yang dianggap sebagai pemukiman kumuh berdasarkan pada kondisi masing-masing pemukiman
3. mengadakan tanya jawab (interview) langsung dengan aparat kecamatan, kelurahan, RT dan RW untuk memperoleh referensi lokasi pemukiman kumuh
4. Mengelompokkan kawasan kumuh yang telah dipilih dengan melihat pada kondisi pemukiman berdasarkan kriteria pemukiman kumuh yang telah ditentukan.

1.7.3. Proses pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dari studi ini meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survey lapangan, penyebaran kuisioner, wawancara dan pemotretan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, internet, dan instansi terkait seperti kantor Kecamatan dan Kelurahan setempat, BAPEDA, BPN dan instansi lainnya yang terkait. Untuk lebih jelas mengenai penjelasan pengumpulan data primer dan data sekunder dapat dijabarkan pada sub sub bab berikut :

1.7.3.1. Pengumpulan Data Primer

Cara pengumpulan data primer ini, dilakukan dengan cara survey lapangan melalui penyebaran daftar kuisioner, wawancara dan pemotretan. Wawancara dilakukan pada masyarakat, ketua RW, ketua RT atau pada staf kelurahan setempat. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah:

1. Metode Quistioner

a. Disebarkan kepada masyarakat

Dalam metode ini yang perlu dilakukan yaitu penyebaran kuisioner dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat dari masyarakat di lokasi studi. Metode ini berdasarkan pada lapangan tentang karakteristik masyarakat dengan dasar pada pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa responden adalah orang yang sudah cukup lama bertempat tinggal/paling tahu tentang kondisi yang ada di lokasi studi.
- Responden yang menjadi sasaran untuk menjawab kuisioner yang sudah disediakan adalah : Kepala Keluarga yang sudah ditunjuk yang mewakili anggota keluarga pada rumah tersebut.
- Pengungkapan responden adalah benar dan dapat dipercaya.

Dalam menentukan besarnya sampel pada lokasi studi didasarkan pada banyaknya populasi yang ada dengan menggunakan Metode Pengambilan Sampel Acak Sederhana (*Sample Randome Sampling*) dengan menggunakan rumus sederhana untuk ini adalah (Yamane, 1967:99)²⁰:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Quistioner/sample

N = Jumlah Populasi (Jumlah KK keseluruhan di lokasi studi)

d = Derajat Kepercayaan 93% atau tingkat kecermatan 7%

Dengan menggunakan rumus diatas, maka hasil yang diperoleh adalah :

$$n = \frac{296}{296(0,07)^2 + 1} = \frac{296}{2,4504} = 120,8$$

$$= 121 \text{ Sampel}$$

Maka dapat diketahui bahwa besarnya sampel yang disebar adalah 121 sampel yang dapat mewakili aspirasi dari masyarakat, dimana sampel-sampel tersebut

²⁰ Rakhmat, Jalaludin., Metode Penelitian Komunika, Bandung, 1998, hal 82

disebar secara merata dan acak pada wilayah lokasi studi. Untuk pembagian jumlah sampel pada tiap-tiap lokasi studi dapat di lihat sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Responden} = \frac{\sum KK \text{ Dilokasi Studi (RT)}}{\sum KK \text{ Keseluruhan}} \times 121$$

$$\begin{aligned} \text{RT 12} &= \frac{81}{296} \times 121 = 33,1 & \text{RT 05} &= \frac{61}{296} \times 121 = 24,9 \\ &= 33 \text{ Responden} & &= 25 \text{ Responden} \\ \text{RT 04} &= \frac{80}{296} \times 121 = 32,7 & \text{RT 06} &= \frac{74}{296} \times 121 = 30,3 \\ &= 33 \text{ Responden} & &= 30 \text{ Responden} \end{aligned}$$

Pengambilan sampel pada 121 responden ini bertujuan untuk menentukan prioritas lokasi penanganan pemukiman kumuh

b. Disebarkan Kepada Para Ahli

Penulis telah menyebarkan 10 kuisioner (angket perbandingan tingkat kepentingan antara) kepada para pakar sesuai bidang tersebut untuk meminta pendapat terhadap perbandingan tingkat kepentingan pada tiap elemen.

Dalam pemilihan responden penulis mempertimbangkan bahwa responden adalah pakar-pakar yang telah menguasai bidangnya sesuai dengan aspek-aspek yang digunakan dalam studi ini. Contoh angket isian perbandingan tingkat kepentingan antara dapat dilihat pada lampiran.

Penyebaran kuisioner atau angket ini bertujuan untuk menentukan prioritas perbaikan pemukiman kumuh.

2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan dari studi ini. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pengungkapan responden adalah benar dan dapat dipercaya.
- Wawancara dilakukan kepada orang yang cukup lama bertempat tinggal/paling tahu tentang kondisi lokasi studi, seperti : Kepala Kelurahan, Ketua RW dan RT maupun tokoh masyarakat setempat.

Wawancara ini bertujuan untuk memilih lokasi pemukiman kumuh dimana pewawancara akan memberikan rekomendasi lokasi yang dianggap kumuh

3. Pemotretan

Cara pengumpulan data ini, dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan terhadap karakteristik wilayah dengan mengumpulkan dokumentasi yaitu dengan pengambilan gambar pada tiap karakter dari berbagai titik lokasi yang ada dalam lokasi studi, pemotretan ini bertujuan untuk memberikan gambaran lokasi studi secara obyektif.

1.8.3.2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data ini merupakan usaha pencarian informasi-informasi mengenai wilayah penelitian yang akan di teliti dengan mencari data melalui studi kepustakaan dan survey instansi pemerintah. Adapun penjelasan dari kegiatan survey sekunder yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yang dimaksudkan adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur dan informasi dari berbagai media yang berhubungan erat dengan studi yang dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menganalisa dan membahas permasalahan yang ada di lokasi studi.

2. Survey Instansi

Pengumpulan data melalui instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan masalah pemukiman kumuh, seperti :

- Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang bergerak di bidang pendataan penggunaan tanah atau lahan. Data tersebut berupa peta tata guna lahan.
- Bappeda untuk memperoleh data tata guna lahan pada lokasi studi dan sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Data tersebut berupa peta penggunaan lahan, penyebaran perumahan dan juga beberapa elemen pendukung penelitian.
- Kantor Kecamatan untuk dapat mengetahui kondisi demografi pada wilayah studi.

- Kantor Kelurahan yang menjadi lokasi studi untuk memperoleh data penduduk, ekonomi dan fisik yang berupa kawasan terbangun dan tak terbangun serta luasannya pada lokasi studi.

1.7.4. Tahapan Analisa

Pada tahap analisa dilakukan analisa mengenai karakteristik lokasi studi berdasarkan hasil pengumpulan data. Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan dua metode pendekatan, yaitu :

1. Metode Deskriptif Kualitatif

Data yang dianalisa adalah jenis gejala dan masalah yang bersifat kualitatif. Metode ini didasarkan pada logika dan hukum logika untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian secara logis. Dengan kata lain, metode kualitatif yaitu metode yang merupakan proses penilaian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²¹

Metode ini digunakan untuk menganalisa kriteria dan juga variabel-variabel yang ditemukan untuk membantu dalam proses penentuan lokasi pemukiman kumuh yang ada di Perkotaan Kuala Kapuas. Sasaran yang menggunakan metode kualitatif adalah:

▪ Analisa penentuan kriteria

Dengan cara kriteria yang didapat dari referensi di literatur kemudian dicocokkan dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian yaitu observasi di wilayah studi sehingga nantinya dapat ditemukan kriteria yang cocok dengan wilayah studi (kesesuaian kriteria dengan lokasi studi) dan variabel amatannya juga akan diketahui (kesimpulan dari kriteria yang akan digunakan di lokasi studi). Penentuan kriteria mempunyai kegunaan untuk memilih kriteria yang sesuai dengan lokasi studi yang dapat dijadikan sebagai kriteria acuan atau standar pemukiman kumuh dalam lingkup skala kelurahan atau RT nantinya.

²¹ Prof.Drs.H.Moh.Kasiram, MSC., Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, UIN Malang Press, Malang, 2008, Hal 151

- Penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh

Dengan menggunakan keterkaitan antar variabel dan juga data yang diperoleh dari masyarakat yaitu hasil kuisioner. Dari sini nantinya akan dibandingkan dan diuraikan sesuai dengan referensi yang digunakan sehingga akan diperoleh lokasi pemukiman kumuh yang diprioritaskan dan prioritas penanganannya.

2. Metode Kuantitatif

Metode ini merupakan metode yang dilakukan melalui proses penilaian dengan menggunakan perhitungan angka atau uji statistik. Dalam metode penelitian kuantitatif terdapat prosedur standar tentang bagaimana membuat data-data yang terkumpul cukup tinggi akurasi, sehingga nilai-nilai dari suatu variabel kuantitatif dapat diuraikan dalam bentuk angka-angka. Sasaran yang menggunakan metode ini adalah analisa penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh

Dalam melakukan analisa penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh ini menggunakan pendekatan pembobotan. Pembobotan dilakukan berdasarkan hasil jawaban masyarakat pada lokasi studi. Setelah itu baru penghitungan dengan matrik AHP dengan menggunakan variabel : Fisik, Sosial dan Ekonomi

Adapun cara untuk menganalisa penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh ini yaitu :

1. memasukan data dari variabel penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh untuk penentuan bobotnya
2. mengisi matrik perbandingan yang didapat dari beberapa jawaban kuisioner yang telah diseleksi dan direkap dari orang-orang yang berkompeten dalam penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh ini. Adapun skala utama model matrik AHP²² dapat dilihat pada tabel 1.5

²² Saaty L Thomas, Pengambilan keputusan bagi para pemimpin, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, Tahun 1991, hal 86

Tabel 1.5.
Intensitas Kepentingan / Derajat Penilaian
Antar Pasangan Faktor / Parameter

Intensitas Kepentingan	Definisi	Keterangan / Penjelasan
1	Sama penting	Kedua faktor tersebut memberikan dukungan yang sama pentingnya tujuan tertentu
3	Relatif agak penting terhadap lainnya	Telah nyata nampak pentingnya faktor tersebut dibandingkan dengan faktor lainnya tetapi tidak meyakinkan.
5	Perlu dan kuat kepentingannya	Jelas, nyata dan nampak terbukti bahwa beberapa peristiwa dan kriteria logis menunjukkan faktor tersebut dengan kuat menyokong satu elmen atas elemen yang lainnya
7	Menyolok kepentingannya	Satu elemen dengan kuat disokong, dan dominannya telah terlihat dalam praktek
9	Mutlak penting	Jelas, nyata dan nampak terbukti secara meyakinkan dari beberapa peristiwa menunjukkan faktor tersebut sangat penting dalam tingkat pemufakatan yang paling tinggi
2,4,6,8	Nilai penengah antara dua pertimbangan diatas yang berdekatan	Jika diperlukan suatu penilaian yang kompromistis atas kedua faktor yang diperbandingkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i	

Sumber : Buku Pengambilan Keputusan, Thomas L Saaty, 1993

Penghitungan AHP ini berdasarkan pada kuisioner dengan tingkat kepentingan antar variabel dalam penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh, dengan mengembangkan suatu matrik perbandingan berpasangan dari pengaruh relatif aktor terhadap penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh. Ini dilakukan dengan mengalikan matrik dan memperhatikan nilai skala utama model AHP. Contoh pengisian matrik perbandingan dengan perbandingan variabel *Fisik, Sosial dan Ekonomi*

Variabel	Fisik	Sosial	Ekonomi
Fisik	1	5/8	7/5
Sosial	8/5	1	8/6
Ekonomi	5/7	6/8	1

3. mengalikan pembobotan dengan matrik perbandingan tiap item variabel prioritas dan menentukan nilai eigen vektor dengan rumus :

$$Ev_j = \sqrt[n]{(Na_1 \times Na_2 \dots)}$$

4. Penentuan prioritas perbaikan dengan membandingkan nilai eigen vektor tiap prioritas dengan jumlah nilai eigen vektor seluruhnya. Dengan rumus :

$$V_p = EV_j / \sum V_j$$

5. Hasil dari prioritas vektor dikalikan dengan pembobotan data yang telah dilakukan, hasil tertinggi merupakan lokasi prioritas (Lihat Bab III hal 209)

Analisa Sturges

Analisa Sturges ini digunakan untuk melakukan penilaian kondisi pemukiman yang dilakukan dengan menggunakan metode penilaian dan pembobotan terhadap alat ukurnya. rumus Sturgess, yaitu :

$$K = 1 + 3,32 \log n$$

Dimana :

K = Jumlah Kelas

n = jumlah Frekuensi (jumlah RT yang ada di RW 02)

Kemudian untuk penentuan prioritas pemukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan metode “*class interval*”. Adapun rumus dari metode “*class interval*” yaitu²³ :

$$Ci = \frac{R}{\sum K}$$

Dimana :

Ci = Interval

R = Range/Rentangan data, dapat dicari dengan menggunakan persamaan :

$$R = \text{Nilai data maksimal} - \text{Nilai data minimal}$$

$\sum K$ = Jumlah kelas

²³ Syamsudin : Statistik Deskriptif, Surakarta 2002, hal 26.

Dengan menggunakan rumus-rumus diatas tersebut, maka dapat digunakan untuk menentukan prioritas pemukiman kumuh,. Analisa yang menggunakan metode ini adalah:

- **Analisa proses seleksi pemukiman kumuh di lokasi studi**

Pada analisa ini berisi mengenai pengertian variabel, sub variabel dan indikator, analisa penilaian sub variabel amatan, analisa penilaian potensi kondisi pemukiman berdasarkan jawaban dari masyarakat pada objek studi dan analisa tingkat kekumuhan di lokasi studi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

- **Analisa penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh**

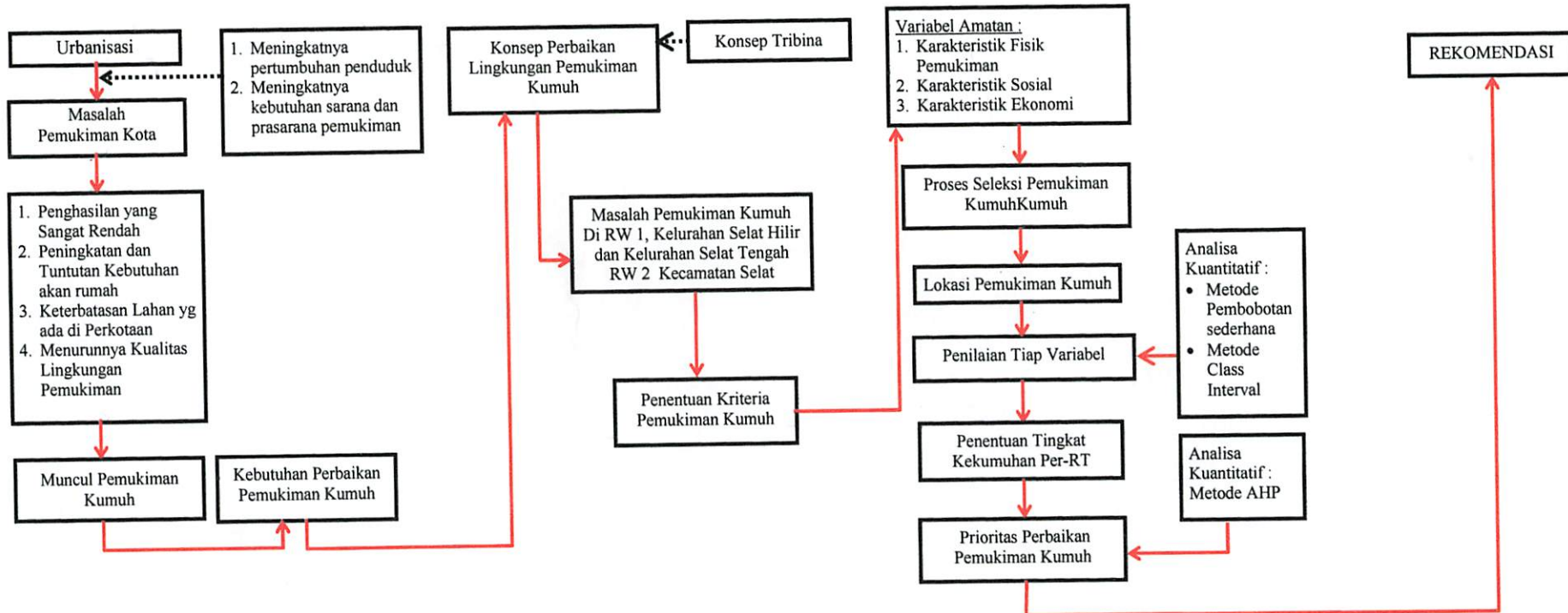
Analisa ini menjelaskan tentang penentuan kawasan pemukiman yang akan diprioritaskan dalam rangka perbaikan pemukiman.kumuh. Adapun tahapan analisa dalam penentuan prioritas perbaikan meliputi analisa penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh berdasarkan variabel yang diamati dan prioritas perbaikan pemukiman kumuh

1.8. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penjelasan proses kerja dalam studi ini dapat dituangkan dalam kerangka pemikiran. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram 1.1. pada halaman berikut ini.

Diagram 1.1.

KERANGKA PIKIR PENENTUAN PRIOTAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH



Keterangan

→ Proses Kerja

---> Keterkaitan

1.9. Rencana Sistematika Pembahasan

Rencana Sistematika pembahasan ini membahas sekilas isi dari setiap bab dalam studi tentang “Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh di perkotaan Kuala Kapuas”. Adapun Sistematika pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang studi, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, tinjauan pustaka, landasan teori, variabel amatan, metodologi, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kota Kuala Kapuas, jumlah dan laju penduduk, perekonomian, kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Kota Kuala Kapuas, gambaran umum objek studi, kondisi permukiman kumuh, gambaran spesifik permukiman kumuh, gambaran permasalahan potensi, dan juga karakteristik masyarakat berdasarkan hasil kuisioner.

BAB III ANALISA PENENTUAN KRITERIA DAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SELAT HILIR DAN SELAT TENGAH

Pada bab ini menguraikan tentang proses analisa data dalam menentukan relevansi kriteria dari teori dengan hasil observasi yang akan dipakai untuk menyeleksi kawasan permukiman kumuh di perkotaan Kuala Kapuas. Dalam menentukan prioritas program perbaikan permukiman kumuh, dilakukan berdasarkan pada metode perhitungan Analisa Proses Hirarki (APH).

Dalam bab ini, cara-cara pelaksanaan penilaian dan pembobotan juga diuraikan dan selanjutnya kawasan permukiman kumuh yang ada dimasukkan dalam proses pengklasifikasian dan penggolongan prioritas perbaikan permukiman kumuh di perkotaan Kuala Kapuas

BAB II

GAMBARAN UMUM PERKOTAAN KUALA KAPUAS

2.1. Letak Geografis Perkotaan Kuala Kapuas

Secara geografis letak perkotaan Kuala Kapuas membujur dan memanjang dari arah utara ke selatan. Perkotaan Kuala Kapuas terletak disebelah Selatan garis Khatulistiwa diantara $0,4^{\circ}$ LU dan $2,4^{\circ}$ sampai $3,4^{\circ}$ LS dan $114,5^{\circ}$ sampai $115,5^{\circ}$ Bujur Timur dan 113° sampai $115,5^{\circ}$ Bujur Timur dan 113° Bujur Timur.

Sedangkan batas-batas wilayah perkotaan Kuala Kapuas, termasuk Kecamatan Selat, yang dibatasi oleh batas wilayah kecamatan-kecamatan lain adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pulau Petak
- Sebelah Timur : Kecamatan Kapuas Hilir dan Kapuas Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kapuas Kuala
- Sebelah Barat : Kecamatan Basarang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 2.1

2.2. Karakteristik Fisik Dasar

Secara umum, perkembangan fisik kota sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisik dasar kota tersebut. Sehingga peningkatan optimasi penggunaan lahan memerlukan pengukuran kemampuan lingkungan fisiknya.

Sebagai masukan utama dalam pengukuran fisik perkotaan Kuala Kapuas ditinjau dari beberapa faktor-faktor yang menyangkut kondisi kelerengan, geologi serta jenis tanah dan Hidrologi.

2.2.1. Kelerengan

Kondisi kelerengan perkotaan Kuala Kapuas secara umum merupakan daerah dataran rendah dan selalu dipengaruhi oleh pasang surut air sungai dan air laut. Dengan tingkat kemiringan lahan sangat rendah antara 0 – 2 %

114°24'54"E

114°26'0"E

114°27'6"E

114°28'12"E

2°55'40"S

2°56'50"S

2°58'0"S

2°59'10"S

2°55'40"E

2°56'50"E

2°58'0"E

2°59'10"E

KECAMATAN MANDOMAI

Desa Pulau Telo

Kelurahan Selat Dalam

Kelurahan Selat HuluKelurahan Seipasah

Kelurahan Barimba

Kelurahan Selat Tengah

Kelurahan Dahirang

Kelurahan Selat HilirKelurahan Mampatung

Kelurahan Murung Keramat

Kelurahan Mambulau

Desa Pulau Mambulau

KECAMATAN BASARANG

KECAMATAN
KAPUAS HILIR

Sungai Kapuas



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :

BATAS ADMINISTRASI
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

LEGENDA :

- Batas Propinsi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Sungai

SUMBER :

-BAPPEDA Kota Kuala Kapuas



SKALA : 1:57.000

700 350 0 700 M

NO. PETA : 2.1

PETUNJUK LELAK PETA



2.2.2. Geologi Dan Jenis Tanah

Kondisi geologi atau batuan pada wilayah perkotaan Kula Kapuas ditutupi oleh batuan sedimen kwartet yang berupa rawa pasang surut terdiri dari alluvium dan lumpur, dimana daerah tersebut dibagi tiga wilayah yang dipengaruhi oleh jenis tanah yang berbeda. Adapun wilayah pembagian tersebut adalah di bagian utara terdiri dari tanah rawa pasang surut yang mengandung alluvial hidromorfik glei-humus dan daerah aliran sungai. Sedangkan bagian tengah terdiri dari sebagian tanah rawa padosolik merah, kuning yang juga tahan terhadap erosi dan bagian selatan kota terdiri dari tanah rawa pasang surut aluvial / organosol banyak mengandung air serta daerah pasang surut yang di hiasi oleh sungai-sungai dan terusan / handel.

2.2.3. Hidrologi

Kondisi wilayah studi merupakan wilayah yang dilalui oleh sungai Kapuas dan sungai Kapuas Murung, serta sungai-sungai kecil atau terusan (handel) yang melintasi Perkotaan Kuala Kapuas secara keseluruhan. Maka keadaan tata air sangat dipengaruhi oleh air permukaan dan air yang tergenang menutupi lahan yang paling rendah dan ada juga yang sama rata dengan muka air pasang tertinggi pada saat air pasang naik, sehingga pada daerah-daerah yang rendah akan menjadi daerah genangan air pasang. Oleh karena itu, lahan-lahan yang tergenang ini disebut lahan rawa pasang surut.

Adapun pemanfaatan sungai yang ada di perkotaan Kuala Kapuas, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, misalnya untuk kebutuhan air minum, mandi dan dipergunakan sebagai sarana transportasi sungai dan untuk mengairkan persawahan.

2.3. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di perkotaan Kuala Kapuas terdiri dari kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Adapun penggunaan kawasan terbangun didominasi oleh kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa (tahun 2007) yang jumlahnya sebesar 1.046,73 Ha

atau 38,30 % dari luas perkotaan Kuala Kapuas. Sedangkan untuk pola penyebaran kawasan pemukiman dan kawasan per-dagangan, jasa terpusat di daerah pusat kota, tetapi ada juga tersebar tidak merata untuk kawasan pemukiman. Dan kawasan perkantoran terpusat di daerah transisi yang terdapat Kelurahan Selat Tengah dan Selat Dalam.

Sedangkan untuk kawasan tidak terbangun didominasi oleh kawasan pertanian padi pasang surut (berupa lahan-lahan rawa), perkebunan campuran, tanah kosong (berupa rawa-rawa), semak belukar berjumlah 1.686,27 Ha atau seluas 61,70 % dari luas perkotaan Kuala Kapuas.

Berdasarkan pola penggunaan lahan yang ada di perkotaan Kuala Kapuas, maka dapat kita lihat pola-pola pemukiman yang mengelompok di daerah pusat kota oleh karena itu kondisi pemukiman di pusat kota sangat padat dan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan pemukiman sehingga menyebabkan kekumuhan di daerah pusat kota. Untuk lebih jelasnya lihat peta 2.2 dan Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Pola Penggunaan Lahan Di Perkotaan Kuala Kapuas
Tahun 2007

No	Jenis Penggunaan	Luas	Ha
1	Perumahan	896,82	32,81
2	Pemerintahan/perkantoran	52,46	1,92
3	Perdagangan / jasa	10,98	0,40
4	Pendidikan	40,69	1,49
5	Kesehatan	9,82	0,35
6	Peribadatan	1,78	0,06
7	Jaringan jalan	34,18	1,35
8	Tanah Kosong/kebun/pertanian padi pasang surut (sawah)	1.686,27	61,70
Total		2,733,00	100
Kawasan terbangun		1.046,73	38,30

Sumber : RUTRK Kuala Kapuas

114°24'54"E 114°26'0"E 114°27'6"E 114°28'12"E

2°55'40"S

2°56'50"S

2°58'0"S

2°59'10"S

KECAMATAN MANDOMAI



KECAMATAN BASARANG

114°26'0"E 114°27'6"E 114°28'12"E

2°55'40"S

2°56'50"S

2°58'0"S

2°59'10"S



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
POLA GUNA LAHAN
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

LEGENDA :

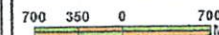
- Batas Propinsi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Sungai
- Pemukiman
- Kebun
- ▨ Sawah
- ▤ Belukar
- Tanah Kosong

SUMBER :

- BAPPEDA Kota Kuala Kapuas



SKALA : 1:57.000



NO. PETA : 2.2

PETUNJUK LETAK PETA



2.4. Gambaran Spesifik Pemukiman Kumuh Perkotaan Kuala Kapuas.

Pemukiman kumuh di lokasi studi terkonsentrasi di pusat perkotaan Kuala Kapuas dimana lokasinya berada pada daerah rawa pasang surut, sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya. Adapun karakteristik lokasi studi antara lain :

a) Karakteristik Fisik Lingkungan

- ☐ Secara topografi lokasi studi pada umumnya merupakan daerah rawa pasang surut kategori III, tidak selalu terluapi air pasang tertinggi dari variasi pasang surut air sungai. Tinggi muka tanah rata-rata kurang lebih sama dengan tinggi muka air pasang tertinggi rata-rata.. Topografi tanah antara 0 – 15 %, jadi kondisi rawa di lokasi studi selalu tergenang air $\pm$ 50 cm diatas muka tanah.
- ☐ Secara hidrologi merupakan daerah pasang surut, mempunyai air tanah tinggi, terdapat tekanan air sungai Kapuas dan Sungai Kapuas murung terhadap air tanah.
- ☐ Secara geologi, sebagian besar mempunyai struktur batuan lepas, tanah lunak oleh karena itu tanah di lokasi studi merupakan tanah yang labil
- ☐ Secara penggunaan lahan memiliki hubungan intensif antara air dan elemen kota karena masyarakat perkotaan Kuala Kapuas pada perkembangannya memanfaatkan lahan rawa sebagai lahan pemukiman.
- ☐ Pemanfaatan lahan rawa sebagai lokasi pemukiman menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan, seperti pencemaran akibat perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di sekitar hunian.

b) Karakteristik Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- ☐ Memiliki keunggulan lokasi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena berada dekat dengan pusat kegiatan kota
- ☐ Penduduk mempunyai kegiatan sosial-ekonomi yang berorientasi ke air dan darat.

- ☐ Rata-rata penduduk golongan ekonomi lemah dengan latar belakang pendidikan relatif terbatas.
- ☐ Pengetahuan akan lingkungan sehat cenderung masih kurang, terjadi kebiasaan tidak sadar lingkungan serta cenderung kurang memperhatikan bahaya dan resiko.
- ☐ Merupakan kawasan terbuka (akses lingkungan), sehingga rawan terhadap keamanan (masalah keamanan)

c) Karakteristik Perumahan dan Pemukiman

- ☐ Kawasan pemukiman dilokasi studi cenderung rapat (kepadatan bangunan tinggi dan jarak antar bangunan rapat) dan kumuh (tidak teratur, kotor).
- ☐ Pola perumahan dipengaruhi oleh keadaan topografi, karena daerahnya relatif datar cenderung memiliki pola relatif teratur.
- ☐ Orientasi bangunan cenderung menghadap ke arah darat dan lebih mempertimbangkan aspek fungsional dan aksesibilitas.
- ☐ Secara arsitektural, bangunan pada pemukiman di lokasi studi merupakan bangunan panggung. Arsitektur bangunan menggunakan struktur dan konstruksi sederhana, tradisional maupun moderen, sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat.
- ☐ Tipologi bangunan menggunakan struktur dan konstruksi sederhana, tradisional dan konvensional.
- ☐ Kecenderungan terjadinya bahaya kebakaran relatif tinggi karena sebagian besar rumah terbuat dari bahan kayu dan saling berdekatan dan berdempetan.

d) Karakteristik sarana dan prasarana lingkungan

- ☐ Mempunyai aksesibilitas yang sangat tinggi sebab dapat dicapai dari darat maupun sungai, sehingga peran dermaga/fery penyebrangan menjadi titik pertumbuhan.
- ☐ Sistem pola jaringan jalan umumnya sudah berpola, memadai serta dapat melayani fungsi-fungsi yang ada, hanya beberapa konstruksi jalan perlu disesuaikan dengan standar dan tingkat pelayanan yang

harus disediakan. Jalan setapak dan jalan ligkungan biasanya berpola organik mengikuti pola perumahan. Sistem jaringan jalan di lokasi studi didominasi oleh jalan jembatan kayu (konstruksi kayu). Pola jaringan jalan umumnya tidak teratur/organik mengikuti perkembangan bangunan dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

- ❑ Sistem drainase memerlukan penanganan relatif lebih rumit, karena merupakan daerah rawa yang selalu tergenang air.
- ❑ Pembuangan air limbah memerlukan penanganan khusus, karena muka air tanah yang tinggi. Masyarakat cenderung membuang air limbah langsung ke badan air, baik dari kakus individu maupun MCK.
- ❑ Umumnya sampah dibuang/ditimbun di sekitar hunian dan depan gang sehingga sering menimbulkan bau serta menjadi sarang lalat dan nyamuk.
- ❑ Sistem penanggulangan bahaya kebakaran (sarana, prasarana, tata cara dan pedoman)

e) **Karakteristik Status hukum (legalitas)**

Status legalitas tanah dilokasi studi legal namun sebagian masih ada yang menyewa dan membayar sewa per bulan pada pemerintah dan tuan tanah.

2.5. Kebijakan

Berdasarkan buku revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang disusun tahun 2006 ditunjukan belum adanya kebijakan yang secara khusus mengatur tentang masalah pemukiman kumuh namun dalam kebijakan tersebut hanya mengatur pemukiman secara umum yang menyangkut pengembangan lingkungan pemukiman di perkotaan Kuala Kapuas didasari konsep mix landuse (penggunaan lahan campuran) dimana perumahan menjadi fungsi yang mengisi ruang antara fungsi-fungsi yang lain. Kebijakan ini terdiri dari :

1. Kebijakan Pengembangan

Kebijakan pengembangan perumahan yakni :

- ✚ Klasifikasi I dengan luas persil 5000 - 6000 m², diklasifikasikan sebagai rumah kapling besar.
- ✚ Klasifikasi II dengan luas persil sedang 2500 – 3000 m² diklasifikasikan sebagai rumah kapling sedang/menengah.
- ✚ Klasifikasi III dengan luas persil 500 – 1000 m², diklasifikasikan sebagai rumah kapling kecil/ sederhana.

2. Strategi Pengembangan.

Strategi pengembangan perumahan sangat ditentukan oleh pengembangan infrastruktur. Berdasarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas ruang kota maka perlu diatur antara lain :

- ✚ Garis sempadan bangunan
- ✚ Ketinggian bangunan yang berhubungan dengan tingkat kepadatan bangunan
- ✚ Pedestrianisasi dan memberi tempat bagi pengendara sepeda di setiap jalan
- ✚ Memberi tanaman perindang di pinggir jalan
- ✚ Menatalampu jalan agar berfungsi sebagai penerang jalan.

Disamping pengaturan-pengaturan tersebut diatas strategi pembangunan juga menyangkut pengendalian yakni :

- ✚ Pengendalian besaran hunian / kapasitas tampung. Kota Kapuas harus dapat mengontrol kapasitas huniannya dimana semakin ke pusat kota, dalam hal ini kota lama, semakin dipadatkan.
- ✚ Pengendalian luasan kapling. Perencanaan besaran kapling yang beruntut dari kapling terbesar di BWK (B) sampai kapling terkecil di dalam blok seharusnya diikuti dengan law enforcement dimana pembelian kapling tidak diperbolehkan satu pembeli dengan dua kapling berdampingan. Demikian pula diperlukan peraturan bangunan yang tidak memperkenankan membangun satu rumah diatas dua kapling. Pengendalian ini bertujuan agar masyarakat dengan golongan ekonomi dibawah bisa mendapatkan tempat tinggal di Kota Kapuas.
- ✚ Pengendalian pola lingkungan. Prinsip kota taman dengan kepadatan yang teratur mengharuskan pengendalian pembangunan bangunan didalam kota

sehingga daerah diluar batas kota di hutankan kembali agar menjadi paru-paru kota. Dimasa mendatang agar tidak terjadi perluasan kota diluar batas yang direncanakan, pembangunan dikendalikan kearah vertikal dan menghentikan pengembangan kota kearah horisontal agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

- ✚ Pengendalian pembangunan lingkungan dan bangunan. Pengendalian ini tercantum pada Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Pengendalian ini perlu dilakukan dengan law enforcement sehingga tidak dapat dilanggar para pemilik bangunan sesukanya.
- ✚ Pengendalian penyediaan jaringan utilitas. Aspek pengendalian ini berhubungan langsung dengan kualitas lingkungan kota. Pendayagunaan sumber-sumber air bersih, listrik, serta sistem-sistem pembuangan limbah agar dicapai tingkat pelayanan yang terbaik.

3. Arah Pengembangan Daya Tampung Hunian

Dengan perencanaan hunian di BWK (B) dengan dinamu pertumbuhan pusat pemerintahan kabupaten dan kawasan perdagangan retail maka diharapkan rancangan BWK ini bisa berfungsi dengan baik. Arah pengembangan daya tampung ini merupakan cara mengendalikan kepadatan penduduk dan bangunan di daerah pasar yang cenderung semakin padat dan cenderung turun kualitas ruang kotanya.

4. Bentuk-Bentuk Pengembangan Lingkungan Perumahan.

Pengembangan lingkungan perumahan mengikuti :

a. BWK (A)

- ✚ Struktur kota dengan jalan Pemuda sebagai jalan utama akan menarik dan sekaligus membatasi pembangunan di bagian Utarakota.
- ✚ Pembangunan tipe-tipe perumahan besar, sedang dan kecil seperti dengan klasifikasi luasan tapak.
- ✚ Dikembangkan rumah tunggal dan rumah duplex untuk luasan tapak yang kecil.

- ✚ Pengembangan lingkungan perumahan mengikuti pola jalan yang direncanakan.

Perbaikan prasarana lingkungan seperti jalan, saluran air bersih dan air limbah serta drainase, jaringan listrik dan telpon.

b. BWK (B)

- ✚ Perbaikan rumah-rumah yang memiliki nilai arsitektur serta pelestarian kota lama dimana bangunan tua harus dilestarikan
- ✚ Perbaikan prasarana lingkungan seperti jalan, saluran air bersih dan air limbah serta drainase, jaringan listrik dan telpon.

c. BWK (C)

- ✚ Perbaikan prasarana lingkungan seperti jalan, saluran air bersih dan air limbah serta drainase, jaringan listrik dan telpon.
- ✚ Pelebaran jalan untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan membangun pedestrian serta jalur sepeda.

5. Pola Pengembangan Lingkungan Perumahan

Pola pengembangan perumahan merupakan pola grid dengan alur jalan untuk mendefinisikan blok-blok utama dan pada blok yang lebih kecil dengan konsep kota taman dimana pada setiap blok besar terdapat ruang terbuka untuk tempat parkir tamu, tempat olah raga dan pertamanan. Dengan perumahan vertikal maka lahan di BWK (B) tidak dikapling-kapling tetapi ruang terbuka milik bersama.

Berdasarkan gambaran diatas, lokasi studi masuk dalam BWK B dan sebagian besar rumah termasuk dalam klasifikasi III dengan luas persil 500 – 1000 m² diklasifikasikan sebagai rumah kavling kecil maka untuk lokasi studi hal-hal yang harus dilakukan adalah : Mengatur ketinggian bangunan yang berhubungan dengan tingkat kepadatan bangunan, pengendalian pembangunan lingkungan dan bangunan yang tercantun dalam KDB dan KLB

2.6. Kedudukan Dan Peranan Perkotaan Kuala Kapuas.

Perkotaan Kuala Kapuas sebagai Ibukota Kabupaten Kapuas terletak diantara sungai Kapuas dan Sungai Kapuas Murung yang merupakan prasarana

perangkutan yang utama dalam menghubungkan dengan kota atau daerah-daerah pedalaman.

Secara geografis Perkotaan Kuala Kapuas mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis sebagai ibukota Kabupaten Kapuas sendiri maupun di Propinsi Kalimantan Tengah pada umumnya. Karena perkotaan Kuala Kapuas terletak sebagai tempat persinggahan atau kota transit yang berdekatan dengan propinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin) yang memberikan dampak sangat besar terhadap perkembangan perkotaan Kuala Kapuas.

Adapun dampak perkembangan kota tersebut sangat ditunjang dengan adanya jalan darat lintas Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan berbagai kota di Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya) dan Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin) yang melalui kota Kuala Kapuas sebagai simpul jasa dan kota transit untuk menghubungkan berbagai keterpencilan kota setempat.

Bila dikaitkan dengan kedudukan dan peranan Perkotaan Kuala Kapuas diatas, maka perkembangan perkotaan Kuala Kapuas sebagai kota transit akan mendorong perkembangan tata ruang fisik kota yakni mendorong perkembangan penduduk untuk memilikilah sebagai tempat usaha dan sebagai tempat pemukiman. Oleh karena itu akibat dampak perkembangan kota yang dirasakan meningkat dimasa yang akan datang, maka diharapkan pemerintah harus dapat mengantisipasi dampak perkembangan kota. Hal ini akan membawa dampak terhadap perubahan bentuk dan struktur kota.

BAB III

ANALISA PENENTUAN KRITERIA DAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SELAT HILIR RW 2, RT 12 DAN KELURAHAN SELAT TENGAH RW 1, RT 4, 5 DAN 6

3.1. Analisa Penentuan Kriteria Pemukiman Kumuh

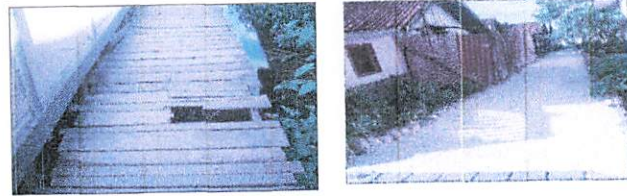
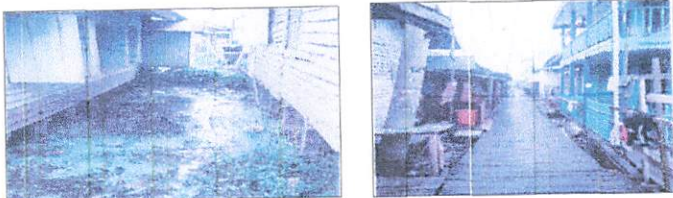
Pada pembahasan ini menjelaskan tentang analisa penentuan kriteria yang mempunyai kegunaan untuk memilih kriteria dari teori yang disesuaikan dengan lokasi studi dengan mendeskriptifkan atau memaparkan antara kriteria teoritik dan kondisi lapangan (memasukan hal yang berbeda tetapi ada di lokasi studi) serta memasukan karakteristik khusus yang ada di lokasi studi pada sub bab 3.1.1 dan pada sub bab 3.1.2 memaparkan tentang kesimpulan kriteria yang dipilih dari sub bab 3.1.1. dimana kriteria-kriteria tersebut berupa variabel dan sub-sub variabel yang nantinya akan digunakan dalam menentukan titik-titik pemukiman kumuh yang terdapat di perkotaan Kuala Kapuas. Selain itu variabel dan sub-sub variabel pada sub bab 3.1.2. akan dinilai dengan menggunakan analisa Kuantitatif yaitu metode pembobotan sederhana, class interval (Sturgess) dan metode AHP sebagai proses penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh yang akan dijelaskan pada sub bab 3.3. Adapun penjelasan dari analisa penentuan kriteria pemukiman kumuh di lokasi studi adalah sebagai berikut :

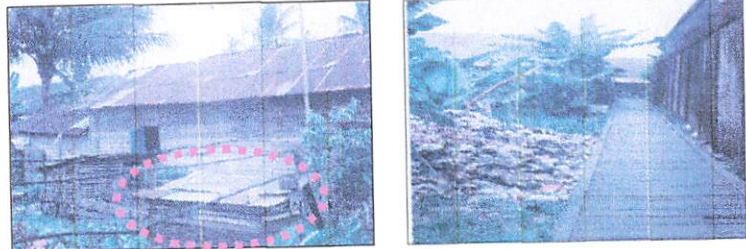
3.1.1. Analisa Kesesuaian Kondisi Lokasi Studi Dengan Kriteria

Kesesuaian kondisi lokasi studi ini merupakan ulasan tentang kondisi lokasi studi berdasarkan dari teori kriteria pemukiman kumuh yang sudah dijelaskan pada bab I pendahuluan. Adapun cara pengerjaannya yaitu dengan membandingkan atau mencocokkan antara kriteria berdasarkan teori dengan hasil observasi di lapangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kriteria. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di halaman selanjutnya.

Tabel 3.1.

Kesesuaian Kondisi Lokasi Studi Dengan Kriteria Teoritik

Kriteria dari teori	Hasil Amatan
1) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, terkadang jalan ini sudah tersembunyi di balik atap-atap rumah yang bersinggungan satu sama lain. Selain sempit, jalan-jalan ini ada yang masih berupa jalan tanah.	Kondisi jalan di lokasi studi memiliki lebar jalan dengan ukuran yang sempit/kecil tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dengan lebar 1m – 1,5 m dan terbuat dari jembatan kayu bahkan berlobang yang dapat membahayakan pengguna jalan dan untuk jalan tanah lebarnya sama dengan jembatan kayu. Lebih jelas lihat gambar berikut :  Gambar 3.1. Kondisi Jalan dari jembatan kayu yang berlubang dan jalan tanah yang sempit
2) Fasilitas drainase tidak memadai. Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air dan bahkan mengakibatkan banjir.	Drainase di lokasi studi kurang memadai, menggunakan sistem drainase kawasan yang mengandalkan kekuatan alam yaitu pasang surutnya air sungai, disebabkan karena lokasi studi berada pada daerah rawa yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai dan membuat lokasi studi selalu tergenang air namun tidak pernah terjadi banjir. Jelasnya lihat gambar berikut :  Gambar 3.2. limbah rumah tangga yang langsung di buang di badan air serta Jalan tanpa adanya fasilitas drainase

Kriteria dari teori	Hasil Amatan
3) Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit).	Prasarana lingkungan di lokasi studi di nilai kurang seperti mck hanya 2 MCK yang digunakan oleh sekitar ± 26 KK dengan kondisi MCK yang tidak layak karena tidak semua warga mempunyai septictank pribadi. Disamping itu kondisi lingkungan yang jorok akibat adanya tumpukan sampah yang berada di samping jalan dan diperparah lagi dengan kondisi lokasi studi yang selalu tergenang air karena merupakan daerah rawa. Untuk kebutuhan air sudah terlayani dan tercukupi meskipun ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jelasnya lihat gambar 3.3  Gambar 3.3. Kondisi MCK yang tidak layak dan kondisi lingkungan yang jorok Akibat tumpukan sampah karena tidak ada tempat sampah
4) Potret buruk kehidupan perkotaan. Makin lama usia perkembangan suatu kawasan kumuh berarti kawasan tersebut dianggap sudah lebih beradaptasi dan menyatu dengan kehidupan perkotaan	Berdasarkan informasi dari ketua RT dan tokoh masyarakat perkotaan Kuala Kapuas lokasi studi berkembang setelah kemerdekaan tahun 1945, namun untuk perkembangan kawasan kumuh di lokasi studi RT 12 berkembang sejak tahun 1980, RT 4 berkembang sekitar tahun 1985, RT 5 berkembang sekitar tahun 1993 dan RT 6 berkembang sekitar tahun 1990
5) Langkanya pelayanan kota (urban service), seperti air minum, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), listrik, sistem pembuangan kotoran dan sampah, serta perlindungan terhadap kebakaran	Berdasarkan kuisioner, pelayanan air minum, fasilitas MCK, listrik, sistem pembuangan kotoran dan sampah sudah terlayani hanya pelayanan dan jumlah unit (MCK, sistem pembuangan sampah dan kotoran) masih kurang. Sedangkan untuk pelayanan terhadap kebakaran tidak tersedia sama sekali (berdasarkan hasil observasi di lokasi studi tidak terdapat hydrant)
6) Rawan tanah longsor, kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya penyakit	Rawan kebakaran karena letak rumah yang saling berdempetan dan konstruksi rumah yang terbuat dari kayu serta rawan terhadap timbulnya

Kriteria dari teori	Hasil Amatan
	penyakit (berdasarkan informasi dari aparat kelurahan Selat Hilir dan Selat Tengah penyakit ISPA, diare, malaria, Types dan demam berdarah) merupakan penyakit yang menjadi wabah sepanjang tahun. Sedangkan bila dilihat dari topografinya merupakan daerah datar (0 – 2 %) dan dilihat dari jenis tanahnya merupakan tanah podsolik merah yang tahan terhadap erosi. Jadi di lokasi studi tidak rawan longsor dan air pasang tidak sampai menggenangi/masuk rumah warga dan tidak menggenangi jalan karena jalan dibuat berdasarkan elevasi pasang tertinggi jadi pada lokasi studi tidak rawan banjir
7) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang langsung membuang ke saluran yang dekat dengan rumah. Ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat.	Di lokasi studi fasilitas pembuangan air kotor seperti <i>septic tank</i> sangat minim sekali. Karena lahan di lokasi studi berada pada daerah rawa, kadang masih ada warga yang memanfaatkan rawa sebagai tempat pembuangan akhir dan ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat.
8) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemerawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.	Tingkat frekuensi dan kepadatan volume di lokasi studi tergolong tinggi, dilihat dari pola penggunaan lahannya 100 % merupakan lahan terbangun (termasuk pemukiman, perdagangan dan jasa) sehingga mencerminkan adanya kesemerawutan tata ruang dan bila dilihat dari persentase pendapatan penduduk 94 % berpenghasilan rendah di bawah 1jt sehingga perbaikan kondisi fisik lingkungan pemukiman bukan menjadi prioritas bagi sebagian besar masyarakat di lokasi studi Lebih jelasnya lihat gambar berikut: Gambar 3.4. Volume kepadatan bangunan yang tinggi dan semerawut 

Kriteria dari teori	Hasil Amatan
9) Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori rumah darurat (substandard housing conditions), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-alang dan bahan yang cepat hancur lainnya.	Gambar 3.5. Contoh kondisi bangunan temporer (tidak permanen)  Bangunan-bangunan di lokasi studi tidak bisa dikatakan kumuh apabila mempunyai karakter kawasan yang sesuai dengan bahan bangunan tersebut. Kondisi bangunan di lokasi studi umumnya berupa bangunan permanen yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu ulin dan bansau dan sebagian merupakan bahan plesteran semen. Bangunan semi permanen menggunakan kayu ulin dan bansau serta blangiran. Selain itu ada pula beberapa yang temporer dengan menggunakan kayu pilau atau garupuk, papan bekas dan seng bekas sebagai dinding. Jelasnya lihat gambar 3.5
10) Sebagian besar lokasinya berada dekat dengan pusat kegiatan ekonomi kota/pusat-pusat kegiatan kota. Pemikiran penghuni kawasan kumuh ini, bahwa lebih dekat dengan pasar atau pusat kegiatan ekonomi yang lebih baik, walaupun mereka harus berdesakan di petak-petak rumahnya.	Lokasi studi merupakan lokasi yang letaknya berada di pusat kegiatan ekonomi (pusat kegiatan kota). Lokasi ini tepatnya berada di jantung kota Kapuas yaitu berada di antara pasar sarimulya dan komplek pertokoan. Hal ini, terlihat bahwa pemikiran penghuni beralasan tinggal di lokasi tersebut dikarenakan bahwa lebih dekat dengan pasar atau pusat kegiatan kota adalah yang terbaik karena dapat menghemat ongkos transportasi.
11) Pemilikan hak terhadap lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tak memiliki status apa-apa.	Status tanah pemukiman di lokasi studi tidak termasuk ilegal, artinya status tanahnya tetap tanah negara tetapi para pemilik hanya diwajibkan membayar pajak atau PBB dan sebagian lagi membayar sewa dengan tuan tanah selama masih menempati lokasi tersebut dengan kata lain para pemilik tak memiliki status apa-apa.
12) Penduduk sangat padat 250 – 400 jiwa/km²	Kepadatan penduduk di lokasi studi pemukiman kumuh perkotaan Kuala Kapuas yaitu 342 jiwa/ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1.197 jiwa dan luas kawasan sebesar ± 3,5 ha serta dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 411 KK, berdasarkan hasil observasi di lokasi studi jumlah ini sudah sangat padat. Kepadatan penduduk ini kurang sesuai dengan teori. (Pada teori 250 – 400 jiwa/km² termasuk dalam kepadatan tinggi)

Kriteria dari teori	Hasil Amatan
	sedangkan di lokasi studi luas wilayah hanya 3,5 Ha, satu kawasan tidak sampai 1 km ² dengan kepadatan terendah 314 jiwa/ha – 357 jiwa/ha merupakan kepadatan tertinggi.
13) Pendidikan rendah.	Berdasarkan hasil observasi persentase tingkat pendidikan masyarakat diperoleh persentase sebesar 36 % atau 44 orang dari 121 responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMU/SLTA.
14) Sebuah komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan sebagai sebuah kelurahan dan bukan hunian liar.	Kondisi pemukiman kumuh di lokasi studi merupakan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RW bahkan RT dan bukan merupakan hunian liar.
15) Secara sosial terisolasi dari permukiman masyarakat lainnya	Lokasi studi berada di pusat kota Kuala Kapuas jadi penduduk di lokasi studi secara sosial tidak terisolasi dari permukiman masyarakat lainnya.
16) Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.	Penghuni pemukiman kumuh di lokasi studi secara sosial dan ekonomi tidak homogen, masyarakat kebanyakan merupakan penduduk asli yang bertahun-tahun menempati kawasan tersebut dan juga ada masyarakat pendatang yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh pekerjaan di kota, tetapi dengan perbedaan tersebut penghuni memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat.
17) Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah/berproduksi subsistem yang hidup dibawah garis kemiskinan	Berdasarkan kuisioner di lokasi studi sebanyak 59 orang atau sekitar 49 % mempunyai pendapatan 150 Rb – 500 Rb/ bulan

Sumber : Hasil Analisa

3.1.2. Dasar Penentuan Kriteria Dan Variabel Amatan Yang Akan Digunakan Di Lokasi Studi

Dari beberapa kriteria pemukiman kumuh yang dijabarkan dalam teori pada bab I Pendahuluan tidak semua kriteria dari masing-masing kriteria menurut teori atau hasil penelitian dipakai sebagai kriteria dalam penelitian ini dasar pertimbangannya adalah : tidak semua kriteria tersebut sesuai dengan karakteristik kota Kuala Kapuas sebagai daerah penelitian, mengingat karakteristik pemukiman kumuh disetiap kota berbeda.

Dasar penentuan kriteria pemukiman kumuh yang akan di gunakan di lokasi studi adalah 14 dari 16 kriteria yang sesuai dengan lokasi studi. Kriteria ini dipakai sebagai kriteria acuan di lokasi studi dalam lingkup skala RT, dalam rangka penelitian “Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh”. Adapun kriteria tersebut antara lain :

- a) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, berdasarkan hasil observasi jalan tanah dan jembatan kayu mempunyai lebar 1m – 1,5m, karena sempitnya, terkadang jalan ini sudah tersembunyi di balik atap-atap rumah yang bersinggungan satu sama lain. Selain sempit, jalan-jalan di lokasi studi di dominasi oleh jalan yang terbuat dari jembatan kayu dan bahkan kondisi jalan tersebut ada yang berlobang sehingga membahayakan pengguna jalan.
- b) Fasilitas drainase tidak memadai. Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas drainase. Drainase di lokasi studi bersifat makro atau drainase kawasan yang mengandalkan sungai/kanal untuk sirkulasi air pada daerah rawa dan tidak pernah terjadi banjir. Hal ini disebabkan lokasi studi yang berada pada daerah rawa pasang surut sehingga tidak memungkinkan untuk membuat drainase per blok perumahan.
- c) Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit).
- d) Potret buruk kehidupan perkotaan. Makin lama usia perkembangan suatu kawasan kumuh berarti kawasan tersebut dianggap sudah lebih beradaptasi dan menyatu dengan kehidupan perkotaan Berdasarkan informasi dari ketua

RT dan tokoh masyarakat perkotaan Kuala Kapuas lokasi studi berkembang setelah kemerdekaan tahun 1945, namun untuk perkembangan kawasan kumuh di lokasi studi RT 12 berkembang sejak tahun 1980, RT 4 berkembang sekitar tahun 1985, RT 5 berkembang sekitar tahun 1993 dan RT 6 berkembang sekitar tahun 1990

- e) Rawan kebakaran dan rawan terhadap timbulnya penyakit



- f) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Sebagian besar warga langsung membuang limbah rumah tangga di sekitar tempat hunian. Ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat.



- g) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

... ..



Fig. 1.

... ..

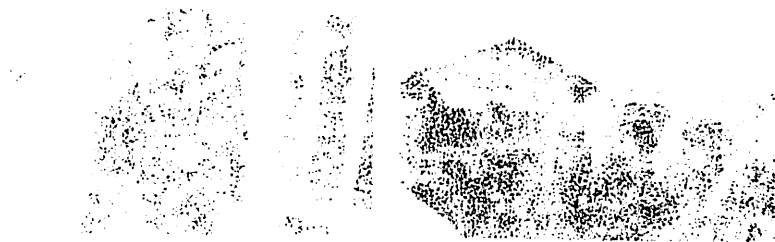


Fig. 2.

... ..



Gambar 3.9.

Tingkat frekuensi dan kepadatan volume bangunan yang tinggi, mencerminkan kesemrawutan tata ruang dan keterbatasan ruang terbuka (*open space*).

- h) Perumahan di pemukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori rumah darurat (*substandard housing condition*), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-alang dan bahan yang cepat hancur lainnya.
- i) Sebagian besar lokasinya berada dekat dengan pusat kegiatan ekonomi kota/pusat kegiatan kota. Pemikiran penghuni kawasan kumuh ini, bahwa lebih dekat dengan pasar atau pusat kegiatan kota yang lebih baik, walaupun mereka harus berdesakan di petak-petak rumahnya.
- j) Penduduk sangat padat 250 – 400 jiwa/km², karena lingkup wilayah adalah RW maka unit terkecil lokasi kawasan kumuh adalah RT, untuk mempermudah analisisnya digunakan ukuran luasan adalah hektar (ha) maka jumlah kepadatan penduduk yaitu 1.364 jiwa/ha. Untuk itu, hal tersebut sudah sangat padat.
- k) Pendidikan rendah. Berdasarkan hasil observasi persentase tingkat pendidikan masyarakat diperoleh persentase sebesar 36 % atau 44 orang dari 121 responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMU/SLTA
- l) Sebuah komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan sebagai sebuah kelurahan dan bukan hunian liar. Lokasi studi merupakan sebuah satuan komunitas yang terwujud sebagai sebuah RW dengan unit terkecil yaitu RT dan tidak dapat dikatakan sebagai hunian liar.
- m) Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman

kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

n) Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah

Sedangkan untuk kesimpulan dari variabel yang digunakan di lokasi studi dalam rangka penelitian "*Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh*", antara lain

1. Variabel berdasarkan fisik merupakan faktor yang dominan karena mempunyai dampak langsung terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi di kawasan pemukiman tersebut. Oleh karena itu pengamatan ditekankan untuk penyelamatan kondisi fisik lokasi studi yang terburuk :
 - Jarak hunian penduduk dengan pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan kota sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah hunian di sekitarnya. Semakin dekat jarak lokasi pemukiman penduduk dengan pusat kegiatan ekonomi/pusat kegiatan kota maka anggapan meningkatnya jumlah pemukiman kumuh menjadi tinggi.
 - Utilitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan fisik dimana juga mempengaruhi terhadap kesehatan dan kenyamanan penduduk, meliputi kondisi perkerasan jalan, Kondisi saluran drainase, sumber air bersih, pembuangan sampah, pelayanan listrik/telpon dan sistem sanitasi (MCK).
 - Kondisi bangunan, kriteria ini bertujuan untuk menilai tingkat kenyamanan pada suatu kawasan pemukiman. Makin tinggi tingkat kepadatan suatu kawasan pemukiman berarti makin buruk kondisinya. Yang termasuk kriteria bangunan meliputi : Tahun perkembangan kawasan kumuh, kondisi perumahan dan kepadatan bangunan.
2. Variabel berdasarkan sosial merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan yang terjadi pada suatu kawasan pemukiman, meliputi kepadatan penduduk (jiwa/ha), pendidikan penduduk dan ketenagakerjaan.
3. Variabel berdasarkan ekonomi merupakan kriteria yang paling penting dalam menentukan prioritas perbaikan pemukiman untuk mengukur

kemampuan dan kondisi ekonomi penduduk di lokasi studi yang meliputi tingkat pendapatan perbulan KK.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menentukan “*Prioritas Perbaikan Permukiman Kumuh*“, penulis juga mempertimbangkan pada beberapa pemikiran antara lain:

a) Keinginan dan kebutuhan masyarakat

Masyarakat seharusnya menjadi subyek dan bukan sekedar obyek pembangunan. Oleh karena itu masyarakat permukiman kumuh dalam penelitian ini diharapkan dapat menggunakan potensi-potensi yang ada seperti jiwa gotong royong dan dapat mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat tersebut seperti:

- Adanya usulan-usulan dan partisipasi dari masyarakat untuk pembangunan lingkungannya sehingga masyarakat nantinya bisa merawat dan memelihara hasil pembangunan di setiap kawasan permukiman karena adanya rasa memiliki.
- Perlu adanya peningkatan ekonomi dengan upaya menambah penghasilan dan usaha menciptakan lapangan kerja sehingga ada keinginan untuk memperbaiki lingkungannya.

b) Dengan pertimbangan dan pendapat para ahli

Dengan melihat pertimbangan dan pendapat para ahli, dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah melalui tanggapan dalam merumuskan tingkat kepentingan tiap variabel sesuai dengan bidangnya masing-masing.

c) Keinginan penulis

Dari beberapa pertimbangan diatas maka penulis merumuskan pola pikir dengan menggabungkan keinginan masyarakat dan pertimbangan para ahli.

3.1.3. Variabel Amatan yang Digunakan di Lokasi Studi

Pada pembahasan ini analisa yang digunakan dalam menentukan variabel amatan yang akan digunakan di lokasi studi adalah analisa kualitatif yaitu memaparkan dalam bentuk tabulasi kesimpulan dari variabel pada sub bab 3.1.2. diatas yang akan digunakan dalam proses pemilihan permukiman kumuh di perkotaan kuala kapuas. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.2.

Tabel 3.2
Variabel Amatan yang Digunakan di Lokasi Studi

Teori dan Hasil Amatan	Variabel	Sub Variabel	Indikator
a) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, terkadang jalan ini sudah tersembunyi di balik atap-atap rumah yang bersinggungan satu sama lain. Selain sempit, jalan-jalan di Kelurahan Selat Hilir dan Selat Tengah di dominasi oleh jalan yang terbuat dari jembatan kayu dan bahkan kondisi jalan tersebut ada yang berlobang seperti di Kelurahan Selat Hilir sehingga membahayakan pengguna jalan. Perkerasan jalan di lokasi studi, masih berupa jalan tanah. Selain itu, ukuran lebar jalan yang sempit atau kecil. b) Fasilitas drainase kurang memadai. Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas drainase. 100% lokasi studi merupakan drainase kawasan dan tidak terbagi berdasarkan blok-blok perumahan. hal ini disebabkan lokasi studi yang berada pada daerah rawa pasang surut sehingga membuat lokasi studi selalu tergenang meskipun saat musim kemarau hanya volume air yang berkurang tidak seperti pada musim hujan. Namun tidak menyebabkan banjir. c) Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit). Prasarana lingkungan di lokasi studi di nilai kurang seperti mck hanya 2 MCK yang digunakan oleh sekitar ± 26 KK dengan kondisi MCK yang tidak layak karena tidak semua warga mempunyai septictank	Fisik	• Kondisi perkerasan jalan	- Aspal - Tanah - Kayu (Jembatan Kayu)
		• Kondisi jaringan drainase	- lancar - tidak lancar
		• Kondisi Perumahan	- Permanen - Semi permanen - Temporer
		• Kerapatan/kepadatan bangunan	- Rapat (berdempetan) - Sedang (<5 meter) - Tidak rapat (> 5 meter)
		• Tahun Perkembangan kawasan kumuh	- Sebelum tahun 1985 - Antara tahun 1985 – 1990 - Setelah tahun 1990
		• Pelayanan air bersih	- PDAM - Kran Umum - Sungai - Sumur

Teori	Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pribadi. Disamping itu kondisi lingkungan yang jorok akibat adanya tumpukan sampah yang berada di samping jalan dan diperparah lagi dengan kondisi lokasi studi yang selalu tergenang air karena merupakan daerah rawa. Untuk kebutuhan air sudah terlayani dan tercukupi meskipun ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari d) Potret buruk kehidupan perkotaan. Makin lama usia perkembangan suatu kawasan kumuh berarti kawasan tersebut dianggap sudah lebih beradaptasi dan menyatu dengan kehidupan perkotaan e) Rawan kebakaran dan rawan terhadap timbulnya penyakit f) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Sebagian besar warga langsung membuang limbah rumah tangga di sekitar tempat hunian. Ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat g) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya h) Perumahan di pemukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori rumah darurat (substandard housing condition), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-		•Pembuangan Sampah	- DibuangTPS - Dibuang ke tempat sampah lalu diambil petugas - Dibakar - Ditumpuk disekitar hunian - Membuang di sungai
		• Pelayanan Listrik / telepon	- Listrik - Bukan listrik
		• Sistem sanitasi	- Sanitasi pribadi - Sungai - MCK umum
		• Jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan kota	- ≤ 5 km - 5 – 10 km - > 10 km
	Sosial	• Jumlah penduduk dalam satu Wilayah (jiwa/ha).	- ≤ 314 jiwa/ha - 314 - 343 jiwa/ha - ≥ 343 jiwa/ha
		• Tingkat pendidikan terakhir penduduk	- Tingkat SD - Se-Tingkat SMP - Se-Tingkat SMU - Perguruan Tinggi - Tidak sekolah

Teori	Variabel	Sub Variabel	Indikator
alang dan bahan yang cepat hancur lainnya i) Sebagian besar lokasinya berada dekat dengan pusat kegiatan ekonomi kota/pusat kegiatan kota. Pemikiran penghuni kawasan kumuh ini, bahwa lebih dekat dengan pasar atau pusat kegiatan kota yang lebih baik, walaupun mereka harus berdesakan di petak-petak rumahnya. j) Penduduk sangat padat 250 – 400 jiwa/km², karena lingkup wilayah adalah RW maka unit terkecil lokasi kawasan kumuh adalah RT, untuk mempermudah analisisnya digunakan ukuran luasan adalah hektar (ha) maka jumlah kepadatan penduduk yaitu 1.364 jiwa/ha. Untuk itu, hal tersebut sudah sangat padat k) Pendidikan rendah. Berdasarkan hasil observasi persentase tingkat pendidikan masyarakat diperoleh persentase sebesar 36 % atau 44 orang dari 121 responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMU/SLTA l) Sebuah komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan sebagai sebuah kelurahan dan bukan hunian liar. Lokasi studi merupakan sebuah satuan komuniti yang terwujud sebagai sebuah RW dengan unit terkecil yaitu RT dan tidak dapat dikatakan sebagai hunian liar m) Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. n) Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah.	Ekonomi	• Mata Pencaharian Tingkat pendapatan masyarakat	- Pengangguran - PNS dll - < Rp. 150.000 - Rp. 150.000 – Rp 500.000 - Rp. 500.000 – Rp 1 jt

Sumber : Hasil Kajian dan Observasi

3.2. Proses Pemilihan Pemukiman Kumuh di Perkotaan Kota Kuala Kapuas

Proses pemilihan pemukiman kumuh di perkotaan kuala kapuas bertujuan untuk mengetahui titik-titik pemukiman kumuh yang terdapat di perkotaan kuala kapuas dengan menggunakan variabel sosial, variabel ekonomi dan variabel fisik sebagai tolak ukur dari penentuan kriteria pemukiman kumuh pada sub bab 3.1.3. diatas untuk menyeleksi pemukiman kumuh di perkotaan kuala kapuas

Dalam proses pemilihan pemukiman Kumuh di Perkotaan Kuala Kapuas dilakukan melalui tahapan-tahapan :

- Mendata Kelurahan-Kelurahan di Perkotaan Kuala Kapuas untuk mengetahui berapa banyak kelurahan yang termasuk dalam wilayah administratif perkotaan Kuala Kapuas. Dari pendataan tersebut ada 12 kelurahan yang termasuk dalam wilayah administratif perkotaan kuala kapuas yaitu :

Kecamatan Selat :

- Pulau Mambulau - Selat Hulu
- Murung Keramat - Selat Dalam
- Selat Hilir - Pulau Telo
- Selat Tengah

Kecamatan Kapuas Hilir :

- Mambulau
- Hampatung
- Dahirang
- Barimba
- Sei Pasah

- Melakukan seleksi 12 kelurahan yang ada di perkotaan Kuala kapuas dengan melihat faktor kepadatan penduduk sebagai alat analisis untuk proses seleksi (penjelasan lihat pada sub bab 3.2.1) dan mengadakan wawancara dengan aparat kecamatan. Dari kedua pendekatan tersebut didapat dua kelurahan yang termasuk dalam kriteria kumuh (dengan melihat kriteria terpilih pada sub bab 3.1.2) yaitu Kelurahan Selat Hilir dan Kelurahan Selat Tengah

- Mengidentifikasi dan melakukan wawancara dengan aparat kelurahan, ketua RW dari kedua kelurahan terpilih tersebut diatas (Kelurahan Selat Hilir dan Selat tengah) berdasarkan penentuan kriteria terpilih pada sub bab 3.1.2 diatas (Variabel Sosial, Variabel Ekonomi dan Variabel Fisik). Dari proses identifikasi dan wawancara tersebut didapat titik-titik pemukiman kumuh pada Kelurahan Selat Hilir dan Selat tengah yaitu dalam lingkup skala RT. Penjelasan dapat dilihat pada sub bab 3.2.2.

3.2.1. Proses Seleksi Kelurahan

Proses seleksi kelurahan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Menghitung kepadatan penduduk di 12 Kelurahan.*

Kepadatan Penduduk dipakai sebagai salah satu cara dalam proses seleksi kelurahan karena penduduk merupakan faktor dominan dari faktor sosial pada penentuan kriteria pemukiman kumuh diatas yang berpengaruh terhadap tumbuhnya kawasan hunian.

Proses seleksi ini diawali dengan menghitung kepadatan penduduk tiap-tiap kelurahan yang terdapat di perkotaan kuala kapuas yang bertujuan untuk mengetahui kepadatan penduduk (jiwa/ha) pada tiap-tiap kelurahan di perkotaan kuala kapuas caranya adalah *membandingkan jumlah penduduk pada tiap-tiap kelurahan di perkotaan kuala kapuas dengan luas administratif masing-masing kelurahan*, kemudian dari hasil perhitungan didapat bahwa kelurahan Selat Hilir memiliki kepadatan tertinggi yaitu 19 jiwa/ha dan kepadatan terendah berada di kelurahan Sei Pasah dengan kepadatan 1 jiwa/ha.

Proses selanjutnya adalah mengklasifikasi kepadatan penduduk tersebut dengan menggunakan metode sturgess yang kemudian diperoleh 5 klasifikasi selanjutnya untuk penentuan lokasi terpilih digunakan metode class interval, dari penggunaan metode sturgess dan clas interval ini kemudian didapat :

1	-	4,6	Merupakan kepadatan sangat rendah (SR)
4,7	-	8,3	Merupakan kepadatan rendah (R)
8,4	-	11,8	Merupakan kepadatan sedang (S)

11,9 - 15,4 Merupakan kepadatan tinggi (T)

15,5 - 19 Merupakan kepadatan sangat tinggi (ST)

Yang termasuk dalam kelurahan terseleksi adalah yang termasuk dalam klasifikasi kepadatan tinggi dan sangat tinggi. Hal ini karena kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan terbatasnya optimalisasi pelayanan dan berbagai fasilitas yang ada. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3.
Kepadatan Penduduk di Perkotaan Kuala Kapuas
Tahun 2007

No	Kelurahan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Klasifikasi
1	Pulau Mambulau	592	3.272	6	R
2	Murung Keramat	3614	6.336	2	SR
3	Selat Hilir	486	9122	19	ST
4	Selat Tengah	1630	15.925	14	T
5	Selat Hulu	2128	11.715	6	R
6	Selat Dalam	736	5.960	8	R
7	Pulau Telo	2580	4.110	2	SR
8	Mambulau	400	2.658	7	R
9	Hampatung	800	1.801	2,3	SR
10	Dahirang	200	966	5	R
11	Barimba	1100	1.750	2	SR
12	Sei pasah	1300	1.279	1	SR

Sumber : Kapuas Dalam Angka 2007/2008

Dari perhitungan terhadap kepadatan penduduk diperoleh 2 kelurahan sebagai kelurahan terseleksi untuk program perbaikan permukiman kumuh yaitu :

1. Selat Hilir
2. Selat Tengah

b. Mengadakan Wawancara Dengan Aparat Kecamatan

Wawancara dengan aparat kecamatan ini bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah mana yang terdapat kawasan kumuh pada dua kelurahan terpilih

ditas. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menanyakan daerah-daerah mana diwilayah administrasi kecamatan yang memiliki wilayah pemukiman kumuh sesuai dengan kriteria sosial meliputi tingkat pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, ketenagakerjaan dan ekonomi dengan tingkat pendapatan, jarak pusat kota serta kriteria fisik yang meliputi drainase, pembuangan sampah, sanitasi/MCK, air minum, penerangan, kondisi jalan, kondisi perumahan dan kepadatan bangunan dari hasil wawancara tersebut diperoleh 2 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Selat Hilir
2. Kelurahan Selat Tengah

c. Melakukan seleksi keluraha-kelurahan dari kedua pendekatan diatas

Dari kedua pendekatan diatas dengan melihat derajat tingkat kesamaan maka diperoleh kelurahan mana yang akan terpilih dalam program perbaikan pemukiman kumuh. Lihat tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Seleksi Kelurahan

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk	Wawancara	Kelurahan Terpilih
1	Selat Hilir	*	*	X
2	Selat Tengah	*	*	X

Sumber : Hasil Analisa

Keterangan : untuk yang mendapat 2 point () merupakan kelurahan terpilih.*

Pada tabel menunjukan kelurahan-kelurahan yang terpilih adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Selat Hilir
2. Kelurahan Selat Tengah

3.2.2. Proses Seleksi Pemukiman Kumuh

Dari ke 2 kelurahan terpilih pada sub bab 3.2.2. diatas langkah selanjutnya adalah menyeleksi kelurahan-kelurahan yang dipakai sebagai daerah studi untuk perbaikan pemukiman yang dianggap kumuh. Dalam menyeleksi kelurahan-kelurahan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menanyakan tanya jawab dengan aparat kelurahan dan Ketua RW
- Menanyakan daerah-daerah (RW) mana saja pada ke 2 kelurahan tersebut yang kondisinya seperti pada kriteria-kriteria sosial meliputi tingkat pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, ketenagakerjaan dan ekonomi dengan tingkat pendapatan, kriteria fisik yang meliputi Status tanah, drainase, pembuangan sampah, sanitasi/MCK, air minum, penerangan, kondisi jalan, kondisi perumahan dan kepadatan bangunan. Dalam satu kelurahan terdiri dari beberapa satuan wilayah administratif terkecil yaitu RW, kemudian dilakukan wawancara dengan ketua RW sehingga didapat informasi bahwa dalam lingkup RW tidak seluruh kawasan tergolong dalam kriteria kumuh maka dibagi lagi berdasarkan RT. mengingat tidak seluruh wilayah RW termasuk dalam kriteria kumuh oleh karena itu dalam studi ini menggunakan RT sebagai batasan terkecil wilayah studi.
- dari hasil tanya jawab diperoleh 4 RT yang terdapat lokasi pemukiman kumuh yaitu :

Tabel 3.5.
Hasil Wawancara dengan Aparat Kelurahan
dan Ketua RW

No	Kelurahan	RW	RT
1	Selat Hilir	2	12
2	Selat Tengah	1	4,5,6

Sumber : Hasil Wawancara

- b. Dengan pengamatan langsung pada 4 RT, untuk mengetahui kondisi yang ada di lokasi studi tersebut. Pengamatan dilakukan dengan:
1. Membuat daftar koreksi berdasarkan kondisi fisik secara umum dengan melihat kondisi fisik/bangunan dan kondisi lingkungannya
- Yang dimaksud dengan kondisi fisik baik, dimana :
- ◆ Jarak rumah ke rumah tidak berdempetan sehingga memungkinkan penyinaran secara langsung, peredaran udara lancar dan menghindari bahaya kebakaran.
 - ◆ Ruang jendela dan penghawaan cukup besar sehingga udara tidak pengap/panas dan penghawaan lancar.

- ◆ Cukup penerangan, baik penerangan buatan (lampu/listrik).
- ◆ Ada pemisahan ruang didalam rumah menurut kegunaannya, seperti ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, dapur, KM/WC
- ◆ Konstruksi cukup kuat, terutama slof, tiang /kolom merupakan sistem ikatan yang kokoh sehingga cukup kuat menahan pergerakan tanah mengingat lokasi studi merupakan daerah rawa dengan kondisi tanah yang labil.
- ◆ Tersedia jamban dan tempat mandi yang memenuhi syarat kesehatan. Peletakan jamban minimal 10 m dari sumur

Dan kondisi fisik buruk, ditandai adanya :

- ◆ Kondisi bangunan di lokasi studi tersebut kebanyakan temporer atau semi permanen (sekitar lebih dari 25 %) dari jumlah bangunan yang ada.
- ◆ Kondisi bangunan bangunan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai bangunan yang baik.

Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan kenyamanan dan pemukiman yang sehat yang terdiri dari kumpulan rumah sehat yang teratur tata letaknya dan mempunyai fasilitas lingkungan antara lain :

- ◆ Tersedia MCK (Mandi, Cuci, Kakus) bagi masyarakat yang tidak memiliki kamar mandi dan jamban sendiri.
- ◆ Kelestaraan lingkungan, terpelihara dan terjaga kelestarian lingkungan dengan tindakan masyarakat yang baik, dengan membiasakan membuang sampah pada tempat sampah.

Dan untuk kondisi lingkungan buruk, antara lain mencakup :

- ◆ Pada lokasi studi tidak terdapat saluran pembuangan dan limbah rumah tangga di buang disekitar hunian.
- ◆ Kondisi lingkungan yang kotor dan tidak terawat seperti buang sampah disembarang tempat sehingga menimbulkan penyakit, bau yang tidak sedap dan kurang sosial.

2. selanjutnya dilakukan pengamatan langsung dengan mengoreksi apakah kawasan pemukiman (RT) tersebut sesuai dengan yang ada pada kriteria kumuh dan benar-benar layak untuk diperbaiki.
3. menanyakan kepada masyarakat kondisi lokasi studi sesuai dengan persepsi masyarakat .

Tabel 3.6
Seleksi Pemukiman Kumuh

Kelurahan	RW	RT	Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi Lingkungan	Pemukiman kumuh terpilih
Selat Hilir	2	12	Buruk	Buruk	x
Selat Tengah	1	4	Buruk	Buruk	x
		5	Buruk	Buruk	x
		6	Buruk	Buruk	x

Sumber : hasil wawancara dan observasi

Ket : x = pemukiman kumuh terpilih

Berdasarkan hasil wawancara dan pengecekan langsung di lapangan dengan melihat kondisi fisik bangunan dan kondisi lingkungan di lokasi studi maka didapat titik-titik pemukiman kumuh di perkotaan kuala kapuas seperti yang dapat dilihat pada hasil tabulasi pada tabel 3.6. diatas, jika kondisi fisik dan kondisi bangunan termasuk dalam kriteria buruk maka kawasan tersebut merupakan lokasi terpilih pemukiman kumuh yaitu terdapat pada Kelurahan Selat Hilir RT 12 dan Kelurahan Selat Tengah RT 4, RT 5 dan RT 6.

3.3. Analisa Kajian Potensi Kodisi Lingkungan berdasarkan Jawaban dari Masyarakat di Lokasi Studi

Analisa kajian potensi kondisi lingkungan berdasarkan jawaban dari masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan fakta yang menyangkut pemukiman kumuh yang ada di wilayah studi, yang didapat dari hasil kuisisioner. Adapun jumlah responden masyarakat yang didata berdasarkan pada pendugaan proporsi populasi, adalah sebanyak 121 responden dengan kriteria pria dan wanita bertempat tinggal di lokasi studi dan memiliki kartu tanda penduduk. Dimana dengan jumlah ini diharapkan dapat mewakili keseluruhan masyarakat yang ada. Untuk lebih jelasnya tentang analisa kajian potensi kondisi lingkungan

berdasarkan jawaban dari masyarakat per-RT dapat dilihat pada tabel... di bawah ini :

Tabel 3.7
Analisa Kajian Potensi Kondisi Lingkungan
Berdasarkan Jawaban Dari Masyarakat

Hasil Kajian	Presentase	Analisa
1. Kondisi Perkerasan Jalan		Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diperoleh bahwa kondisi perkerasan jalan di lokasi penelitian sebagian besar masih buruk karena didominasi oleh jalan jembatan kayu yang kondisinya berlobang karena rendahnya kualitas bahan yang digunakan. Disamping itu juga diperparah dengan sempitnya jalan dengan ukuran 1 – 1,5 m. Kondisi jalan seperti diatas tidak menghambat masyarakat untuk menempati pemukiman kumuh, mereka beranggapan asalkan jalannya masih bisa dilalui dan bisa membantu perekonomian maka mereka akan tetap tinggal di pemukiman tersebut.
▪ Jalan Jembatan Kayu	33 %	
▪ Tanah	15 %	
▪ Aspal	9 %	
2. Kondisi jaringan Drainase		Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diketahui bahwa drainase di lokasi studi tidak lancar ini disebabkan karena perilaku masyarakat yang sebagian besar masih membuang sampah disekitar hunian sehingga tidak terjadi pertukaran air dan menyebabkan polusi akibat bau air dari rawa dan rawan terhadap berkembang biaknya berbagai penyakit. Tetapi hal tersebut tidak menjadi soal buat mereka karena mereka menganggap kondisi tersebut sudah biasa. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri rasa cemas dari masyarakat tetrap ada, karena dampak dari kondisi tersebut bisa menimbulkan berbagai macam penyakit.
▪ Tidak Lancar	100 %	
▪ Lancar	0 %	
3. Kondisi Bangunan		Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diketahui bahwa kondisi bangunan di lokasi studi sebagian besar merupakan bangunan permanen yang menggunakan perpaduan kayu ulin dan plesteran semen sebagai bahan konstruksinya, bahan bangunan ini kekuatannya tahan sampai 15 tahun.
▪ Temporer	12 %	
▪ Semi Permanen	29 %	
▪ Permanen	59 %	
4. Jarak Kerapatan Bangunan		Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diketahui bahwa bangunan di lokasi studi mempunyai kerapatan bangunan yang padat (berdempetan). Mereka beranggapan semakin rapat bangunan yang mereka tempati maka semakin erat pula rasa kekeluargaan atau kekerabatan yang mereka jalani. Hal inilah yang menyebabkan kawasan lingkungan mereka menjadi kumuh karena penataaannya yang tidak teratur.
▪ Berdempetan	79 %	
▪ ≤ 5 meter	42 %	
▪ ≥ 5 meter	0 %	
5. Sumber air bersih		Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di lokasi studi
▪ Sumur	12 %	

Hasil Kajian	Presentase	Analisa
▪ Sungai	15 %	untuk memperoleh sumber air bersih berasal dari PDAM. Mereka menggunakan PDAM untuk air minum, memasak, mencuci dan mandi.
▪ Kran Umum	10 %	
▪ PDAM	61 %	
6. Pelayanan Sampah		Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menimbun/menumpuk sampah disekitar hunian. Inilah yang menyebabkan lokasi studi rawan terhadap berkembang biaknya berbagai macam penyakit. Masyarakat di lokasi studi masih kurang peduli dengan kebersihan lingkungan di sekitar pemukiman mereka mereka menganggap biasa dengan kondisi tersebut.
▪ Dibuang ke sungai	28 %	
▪ Ditimbun/ditumpuk disekitar hunian	45 %	
▪ Dibakar	21 %	
▪ Dibuang ke tempat sampah lalu diambil petugas	8 %	
▪ Dibuang ke TPS	5 %	
7. Pelayanan listrik		Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa sebagian besar warga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, Ini berarti listrik di lokasi studi sudah terlayani meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang tidak menggunakan listrik disebabkan karena ketidak mampuan warga untuk membayar listrik dan pelayanan listrik yang terbatas untuk saat ini namun tidak menghalangi warga untuk tetap menempati lokasi studi.
▪ Bukan Listrik	19 %	
▪ Listrik	81 %	
8. Sistem sanitasi		Berdasarkan hasil kuisioner diketahui bahwa sistem sanitasi (pembuangan limbah keluarga) yang dilakukan oleh masyarakat sebagian masih menggunakan sungai. Akan tetapi mereka sebenarnya mempunyai keinginan untuk mempunyai sanitasi pribadi, hal ini dikarenakan kondisi sungai yang sudah tercemar limbah atau sudah kotor. Jika ditinjau lebih lanjut maka sebenarnya masyarakat menginginkan lingkungan yang sehat tetapi karena himpitan ekonomi menjadikan mereka menggunakan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sungai sebagai sistem sanitasi mereka.
▪ Septic tank	50 %	
▪ MCK Umum	19 %	
▪ Sungai	31 %	
9. Status Tanah		Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa status tanah yang dimiliki oleh warga adalah milik sendiri artinya tanah yang mereka tempati termasuk legal. Mereka sadar betul apabila tanah yang mereka tempati merupakan tanah ilegal maka kehidupan mereka akan dipenuhi dengan rasa kecemasan/kekuatiran untuk digusur. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan, bagi warga yang tidak mempunyai tanah dan ingin memilikinya maka pemerintah memberikan kemudahan yaitu dengan menyewakan tanah tersebut. Apabila penghuni sudah lama menyewa tanah tersebut, penghuni diberikan kemudahan untuk memilikinya secara
▪ Sewa	30 %	
▪ Tanah Negara	1 %	
▪ Tanah Milik	69 %	

Hasil Kajian	Presentase	Analisa
		sah dengan cara tunai ataupun kredit. Hubungan baik inilah yang membuat di lokasi penelitian tidak terdapat kawasan yang termasuk ilegal atau liar.
10. Jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan ekonomi di lokasi studi		Berdasarkan hasil kuisioner diperoleh bahwa jarak rumah penduduk dengan pusat kegiatan kota atau pusat kegiatan ekonomi adalah dekat (≤ 5 km). Mereka memilih jarak yang dekat dengan tempat kerja alasannya karena menurut mereka untuk menghemat ongkos transportasi ke tempat kerja. Dari sini dapat diketahui bahwa masyarakat dalam mencari uang sangat serius, dengan tujuan untuk merubah nasib mereka.
▪ Dekat (≤ 5 km)	72 %	
▪ Sedang (5-10 km)	27 %	
▪ Jauh (> 10 km)	0 %	
11. Tingkat pendidikan terakhir masyarakat		Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa penduduk di lokasi studi termasuk dalam kategori berpendidikan rendah karena mayoritas penduduknya tamatan SLTA. Inilah yang menyebabkan masih adanya pengangguran di lokasi studi karena tidak memiliki keterampilan dan modal untuk membuka usaha dan bekerja. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena semakin banyak warga yang masih berpendidikan rendah dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Karena angka pengangguran akan semakin meningkat.
▪ Tidak Sekolah	10 %	
▪ SD	29 %	
▪ SLTP	27 %	
▪ SLTA	36 %	
▪ S1	7 %	
12. Mata Pencarian		Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk yang tinggal di lokasi penelitian bekerja sebagai pedagang, baik pedagang musiman ataupun pedagang tetap. Inilah yang menyebabkan mereka untuk memilih kawasan yang dibidang mempunyai jarak yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat kegiatan kota karena mereka bisa berjalan kaki menuju ke tempat kerja sehingga menghemat ongkos yang akibatnya menimbulkan tumbuhnya pemukiman kumuh pada kawasan tersebut.
▪ Menganggur	21 %	
▪ Buruh	15 %	
▪ Petani	7 %	
▪ pedagang	29 %	
▪ Karyawan swasta	18 %	
▪ PNS	13 %	
13. Pendapatan per bulan KK		Berdasarkan hasil kuisioner sebagian besar penduduk di lokasi studi tergolong berpendapatan rendah (Rp 150.000 – Rp 500.000). ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan karena ketidak berdayaan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang mereka tempati, penghasilan mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

3.4. Analisa Penilaian Karakteristik Pemukiman Kumuh di Lokasi Studi Berdasarkan Jawaban Dari Masyarakat Per-RT

Analisa karakteristik pemukiman kumuh ini bertujuan untuk menilai tentang kondisi di lokasi studi per RT berdasarkan jawaban dari masyarakat mengenai tiap indikator amatan yang ada disetiap sub variabel. Kemudian jawaban dari masyarakat pada masing-masing RT diberi skor kemudian dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator. Pemberian penilaian terhadap masing-masing indikator berdasarkan kondisi yang ada di lokasi studi bertujuan untuk mengetahui karakteristik mana yang mempunyai pengaruh dalam proses penentuan prioritas pemukiman kumuh di setiap RT (lokasi studi). Jadi tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui karakteristik mana saja yang mempunyai pengaruh dalam proses penentuan kekumuhan di lokasi studi. Lebih jelasnya mengenai analisa penilaian potensi kondisi pemukiman per-RT dapat dilihat pada penjelasan berikut ini

3.4.1. Faktor Fisik.

Penilaian kondisi fisik pemukiman kumuh dilakukan berdasarkan atas sasaran program perbaikan pemukiman kumuh, yaitu penyelamatan kondisi pemukiman kumuh yang terburuk merupakan pemukiman kumuh yang diprioritaskan perbaikannya. Dalam kehidupan bermasyarakat dituntut adanya suatu lingkungan yang aman, tertib, nyaman, bersih, sehat, serasi dan indah. Lingkungan fisik sangat menunjang pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor penunjang kebutuhan masyarakat tersebut adalah kejelasan status tanah, kondisi lingkungan yang berkualitas dan adanya rumah sebagai tempat tinggal, yang tentunya rumah tersebut layak sebagai hunian.

Indikator yang termasuk dalam Variabel fisik dalam studi ini meliputi status tanah, Utilitas dan Kondisi bangunan. Utilitas terdiri dari kondisi jalan, drainase, Sanitasi/MCK, Sumber air bersih dan pembuangan sampah sedangkan kondisi bangunan terdiri dari kepadatan bangunan, Tahun perkembangan kawasan dan kondisi perumahan. Berikut pembobotan sub variabel amatan berdasarkan variabel utilitas:

a) *Kondisi Jalan*

Untuk kondisi jalan di lokasi studi ini didominasi oleh jalan jembatan kayu sebagai jalan lingkungan yang merupakan jalan penghubung antar RT dengan kondisi jalan sebagian tergolong buruk karena kayu yang digunakan sebagai bahan konstruksinya ada sudah lapuk dan berlobang dan sebagian lagi merupakan jalan tanah putih dengan kondisi yang baik karena merupakan jalan baru sebagai usaha pemerintah dalam upaya perbaikan lingkungan. Sedangkan jalan aspal merupakan penghubung antara lokasi pemukiman kumuh. Penilaian terhadap kondisi jalan dibedakan berdasarkan kondisi jalan yang mutlak adanya perbaikan

- Jalan Aspal Kondisi baik, nilai 1
- Jalan Tanah, nilai 2 kondisi jalan banyak terdapat lobang dan membentuk kubangan dan pada saat pasang, jalan ini akan tergenang
- Jembatan Kayu, 3 kondisi jalan berlubang dan lapuk

Setelah dilakukan penjumlahan dari hasil pembobotan masing-masing jenis perkerasan diketahui yang merupakan prioritas untuk perbaikan dengan nilai tertinggi terletak di RT 4 sebesar 560. ini menunjukkan bahwa banyak jalan di RT 4 baik itu jalan tanah maupun jembatan kayu yang kondisinya masih buruk. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan kondisi jalan seperti mengganti bahan jembatan kayu yang sudah lapuk dengan kayu ulin karena kayu ini bersifat tahan terhadap air dan mengganti kondisi perkerasan jalan tanah dengan semen, untuk kegiatan ini pemerintah diharapkan bisa bertindak sebagai fasilitator dan pengontrol karena kegiatan tersebut membutuhkan banyak dana dan memerlukan pengawasan yang bisa didapat dari sektor swasta. Hasil penilaian terhadap kondisi jalan dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8
Kondisi Jalan

uraahan	RT	Kondisi Jalan									Jumlah Index	Klasifikasi Index
		1			2			3				
		Jalan Aspal			Jalan Tanah			Jalan Jembatan Kayu				
		Jumlah	SKOR	INDEX	Jumlah	SKOR	INDEX	Jumlah	SKOR	INDEX		
lat Hilir	12	5	100	100	1	50	100	8	89	267	467	T
Selat engah	4	3	60	60	2	100	200	9	100	300	560	T
	5	2	40	40	0	0	0	6	67	200	240	R
	6	2	40	40	0	0	0	6	67	200	240	R

umber : Hasil Analisa dari kuisisioner

$$K = 1 + 3,32 \log 4$$
$$K = 1 + 3,32 \times 0,6$$
$$K = 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}$$

Interval = $\frac{560 - 240}{3}$

$- 240 - 347 = \text{Rendah (R)}$
 $- 348 - 455 = \text{Sedang (S)}$
 $- 456 - 563 = \text{Tinggi (T)}$

b) Drainase

Dalam mencapai maksud dan tujuan dari program perbaikan pemukiman kumuh dengan keadaan fisik lingkungan yang baik, maka penilaian untuk melihat kondisi saluran drainase di lokasi studi ini dibagi menurut prosentase dari kondisi aliran drainase yaitu lancar dan tidak lancar yang diperoleh dari kuisisioner berdasarkan persepsi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi lokasi studi karena drainase di lokasi studi menggunakan sistem drainase kawasan yang benar-benar mengandalkan pasang surutnya air laut dan jika pada lokasi studi aliran airnya tidak lancar maka akan mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan di sekitar hunian.

Penilaian terhadap kondisi drainase diperlukan untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik lingkungan di lokasi studi serta secara tidak langsung juga akan memberikan gambaran mengenai cara hidup atau perhatian masyarakat setempat terhadap lingkungannya.

Penilaian kondisi saluran drainase di lokasi studi dilakukan dengan pembobotan yang didasarkan pada pengangkaan 1-2 dengan perincian:

- Lancar, nilai 1 merupakan bobot terendah
- Tidak Lancar, nilai 2 merupakan bobot tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi prosentase kondisi drainase . pada kawasan

permukiman kumuh maka perlu mendapatkan perhatian untuk memperbaikannya.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi prosentase kondisi drainase pada lokasi studi perlu mendapatkan perhatian untuk memperbaikannya. Setelah dilakukan penilaian terhadap ke 4 RT sebagai daerah penelitian dengan metode pembobotan tersebut, diketahui nilai tertinggi terletak pada RT 12 dan RT 4 sebesar 200, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga pada RT 12 dan RT 4 masih rendah kesadaran dan perhatiannya terhadap kondisi lingkungan di sekitar hunian. Guna mengatasi masalah drainase ini pemerintah diharapkan bisa mencari sistem drainase apa yang tepat diterapkan pada lokasi studi mengingat kondisi lokasi studi merupakan daerah rawa dan sampai saat ini masalah drainase masih belum sepenuhnya teratasi, upaya ini dilakukan untuk mengatasi buruknya kualitas lingkungan di lokasi studi yang terkait dengan ketidak lancaran sistem drainase. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Kondisi Drainase

Kelurahan	RT	Kondisi Drainase						Jumlah Index	Klasifikasi Index
		1			2				
		Lancar			Tidak Lancar				
		Jumlah	SKOR	INDEX	Jumlah	SKOR	INDEX		
Selat Hilir	12	0	0	0	33	100	200	200	T
Selat Tengah	4	0	0	0	33	100	200	200	T
	5	0	0	0	25	75,76	151,52	151,52	R
	6	0	0	0	30	90,91	181,82	181,82	S

Sumber : Hasil Analisa dari kuisisioner

$$K = 1 + 3,32 \log 4$$
$$K = 1 + 3,32 \times 0,6$$
$$K = 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}$$

$$\text{Interval} = \frac{200 - 151,52}{3}$$
$$= 16,16$$

$$- 151,52 - 167,68 = \text{Rendah (R)}$$
$$- 167,69 - 183,85 = \text{Sedang (S)}$$
$$- 183,86 - 200,02 = \text{Tinggi (T)}$$



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN KONDISI DRAINASE

LEGENDA :

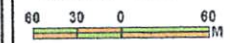
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 183,84 - 200
- Sedang : 167,68 - 183,84
- Rendah : 151,52 - 167,68

SUMBER :

- MAPEDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

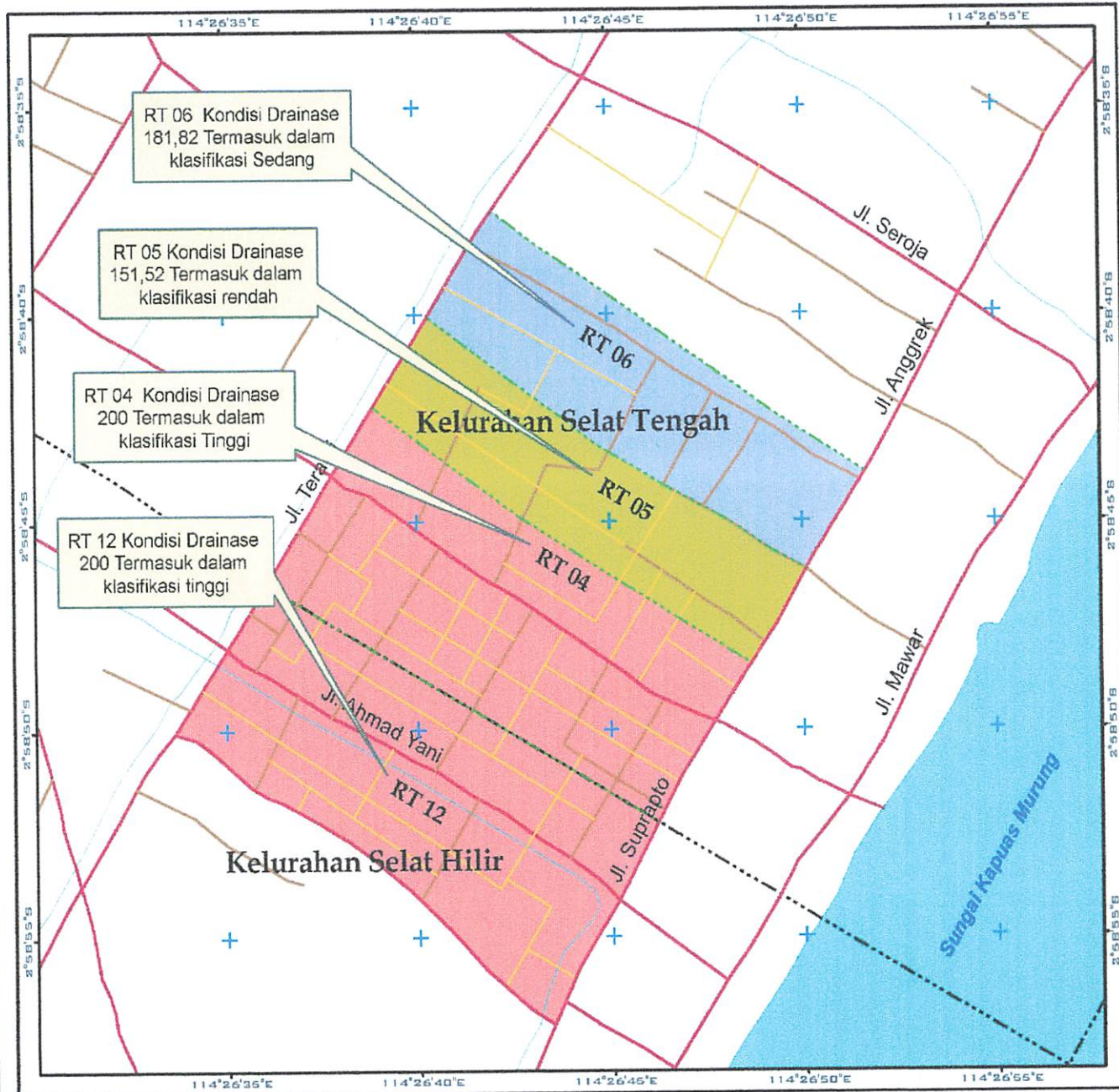


SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.2

PETUNJUK LETAK PETA



c) *Kondisi Bangunan*

Dalam bagian ini pengamatan dilakukan berdasarkan anggapan bahwa makin banyak jumlah rumah yang kondisinya kurang layak (temporer) berarti semakin perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kondisinya, sehingga lokasi studi dengan kondisi demikian diprioritaskan untuk perbaikannya

- Permanen, nilai 1 layak tidak perlu adanya perbaikan
- Semi Permanen, nilai 2 perlu tapi msih bisa dipertimbangkan
- Temporer, nilai 3 sangat perlu adanya perbaikan

Dari perhitungan diketahui untuk lokasi studi yang jumlah nilainya paling banyak adalah RT 4 yang diprioritaskan untuk perbaikannya dengan nilai 550. Angka ini menunjukkan bahwa dari ke empat RT di lokasi studi, RT 4 merupakan RT yang paling banyak terdapat bangunan temporer, maka pada RT 4 perlu adanya perhatian terhadap kondisi bangunan perumahan yang tidak memenuhi syarat layak huni sehingga bangunan temporer tersebut menjadi layak huni. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.10

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + 3,32 \log 4 \\
 K &= 1 + 3,32 \times 0,6 \\
 K &= 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{550 - 309,47}{3} \\
 &= 80,18
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 &- 309,47 - 389,65 = \text{Rendah (R)} \\
 &- 389,66 - 469,84 = \text{Sedang (S)} \\
 &- 469,85 - 550,03 = \text{Tinggi (T)}
 \end{aligned}$$

Tabel 3.10
Kondisi Bangunan

Kondisi Bangunan												
Kelurahan	RT	Kondisi Bangunan									Jumlah Index	Klasifikasi Index
		1			2			3				
		Permanen			Semi Permanen			Temporer				
		Jumlah	Skor	Index	Jumlah	Skor	Index	Jumlah	Skor	Index		
Selat Hilir	12	17	89,47	89,47	12	100	200	4	80	240	529,47	T
Selat Tengah	4	19	100	100	9	75	150	5	100	300	550	T
	5	17	89,47	89,47	6	50	100	2	40	120	309,47	R
	6	18	94,74	94,74	8	66,67	133,34	4	80	240	468,08	S

Sumber : Hasil Analisa dari kuisisioner

d) *Kerapatan Bangunan*

Pengamatan terhadap kepadatan bangunan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kerapatan bangunan di lokasi studi. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa semakin rapat keadaan bangunan (yang ditunjukkan dengan besarnya jarak antar rumah penduduk) berarti semakin diperlukan adanya perbaikan.

Karena keadaan yang demikian menyebabkan terganggunya sirkulasi segala kegiatan didalam lokasi studi, terbatasnya keleluasaan bergerak disamping rumah yang terlalu rapat sangat berbahaya apabila terjadi kebakaran.

- Tidak rapat (≥ 5 meter), nilai 1
- Sedang (≤ 5 meter), nilai 2
- Rapat (berdempetan), nilai 3

Dari perhitungan diketahui untuk lokasi studi bahwa RT yang kepadatan bangunannya paling rapat adalah di RT 12 dengan nilai 460,88. angka ini menunjukan bahwa RT 12 didominasi oleh rumah dengan kerapatan bangunan sangat tinggi, oleh karena itu pada RT 12 perlu adanya penataan tata letak bangunan dan membatasi munculnya bangunan baru agar tidak semakin padat. hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.11

Tabel 3.11
Kerapatan Bangunan

Kerapatan Bangunan												
Kelurahan	RT	Kerapatan Bangunan									Jumlah Index	Klasifikasi Index
		1			2			3				
		> 5 meter (tidak rapat)			< 5 meter (sedang)			Berdempetan (rapat)				
		Jumlah	Skor	Index	Jumlah	Skor	Index	Jumlah	Skor	Index		
	12	0	0	0	13	100	200	20	86,96	260,88	460,88	T
	4	0	0	0	10	76,92	153,84	23	100	300	453,84	T
	5	0	0	0	7	53,85	107,7	18	78,26	234,78	342,48	R
	6	0	0	0	12	92,31	184,62	18	78,26	234,78	419,4	S

Sumber : Hasil Analisa dari kuisisioner

$$K = 1 + 3,32 \log 4$$
$$K = 1 + 3,32 \times 0,6$$
$$K = 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}$$

$$\text{Interval} = \frac{460,88 - 342,48}{3}$$
$$= 39,5$$

$$- 342,48 - 381,98 = \text{Rendah (R)}$$
$$- 381,98 - 421,48 = \text{Sedang (S)}$$
$$- 421,48 - 460,98 = \text{Tinggi (T)}$$

e) Tahun Perkembangan Kawasan Pemukiman kumuh

Pengamatan terhadap umur kawasan pemukiman kumuh sebagai penilaian pada faktor fisik berdasarkan anggapan bahwa makin lama usia pemukiman kumuh berarti kawasan tersebut dianggap sudah menyatu dengan kehidupan perkotaan dan menunjukan menurunnya kualitas bangunan di suatu kawasan sehingga menjadi prioritas untuk perbaikan. Penilaian untuk perkembangan kawasan kumuh dalam penelitian ini berdasarkan pada tahun dimana kawasan kumuh tersebut mulai berkembang yang dibedakan menurut :

- Sebelum tahun 1985 bobot 3 = 100



TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :

ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN KONDISI BANGUNAN

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 696,49 - 825
- Sedang : 567,98 - 696,49
- Rendah : 439,47 - 567,98

SUMBER :

- BAPPEDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

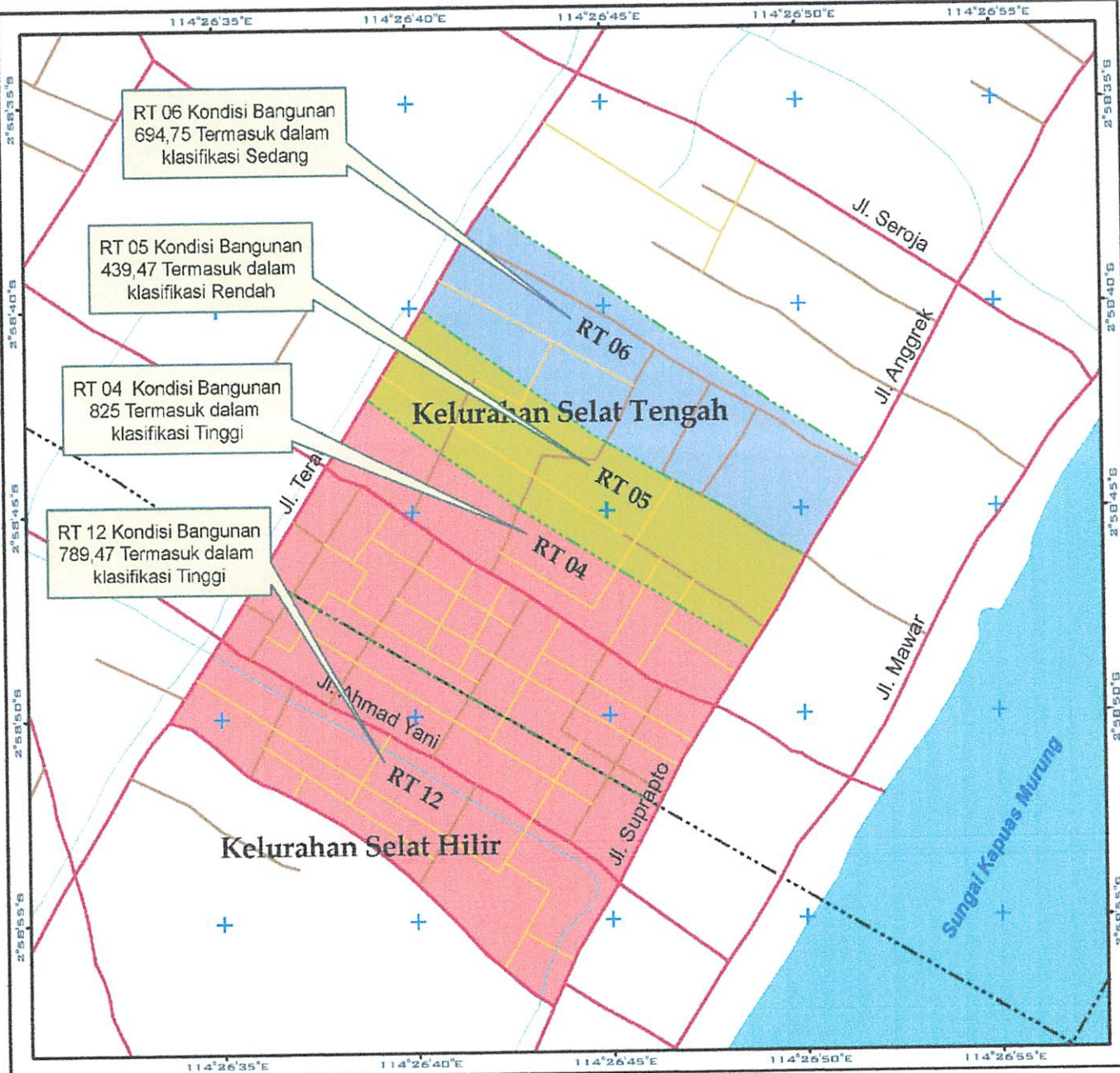


SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.3

PETUNJUK LETAK PETA



TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :

ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN KERAPATAN BANGUNAN

LEGENDA :

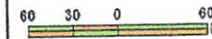
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 674,15 - 734,8
- Sedang : 613,5 - 674,15
- Rendah : 552,85 - 613,5

SUMBER :

- BAKREDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

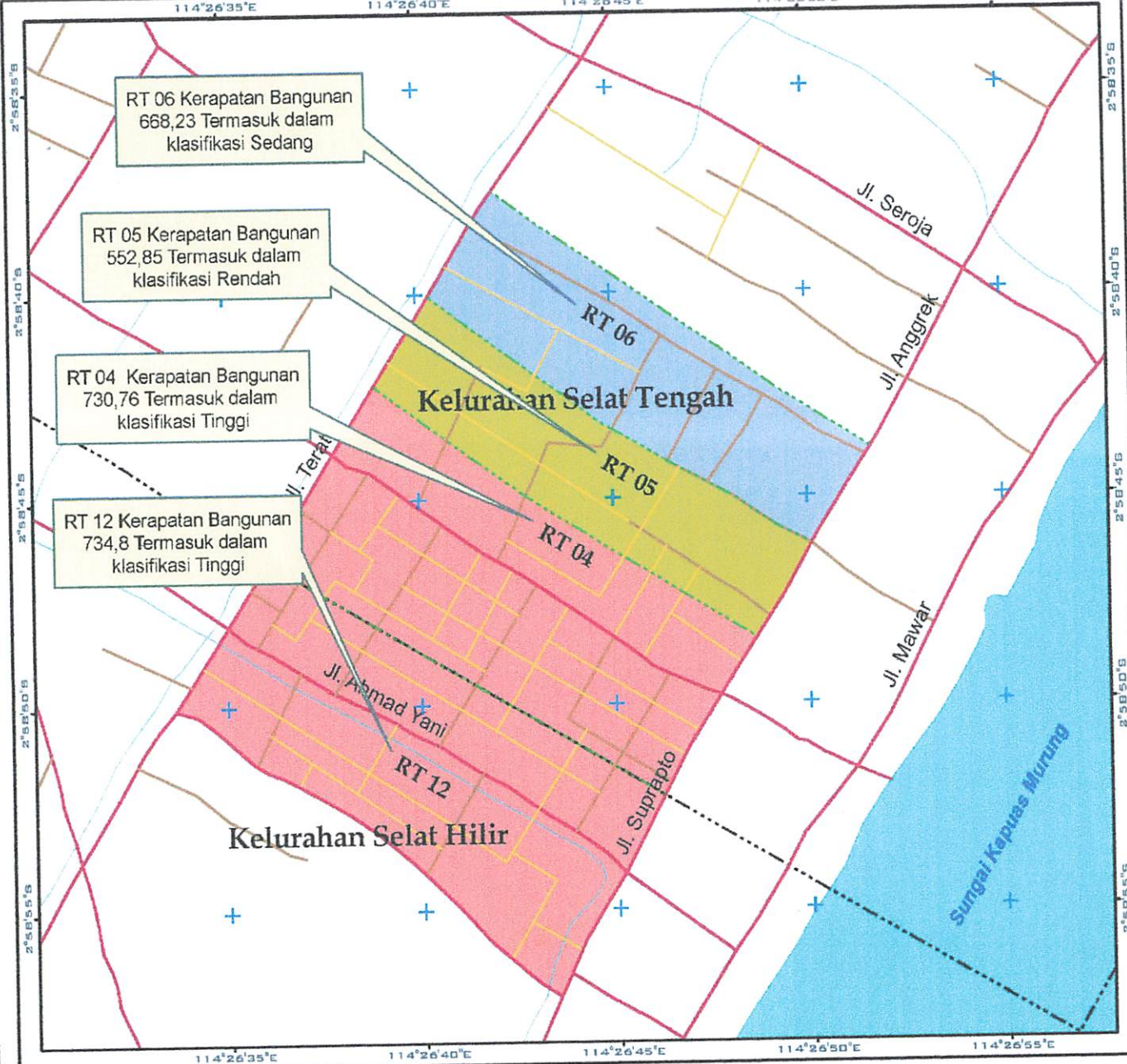


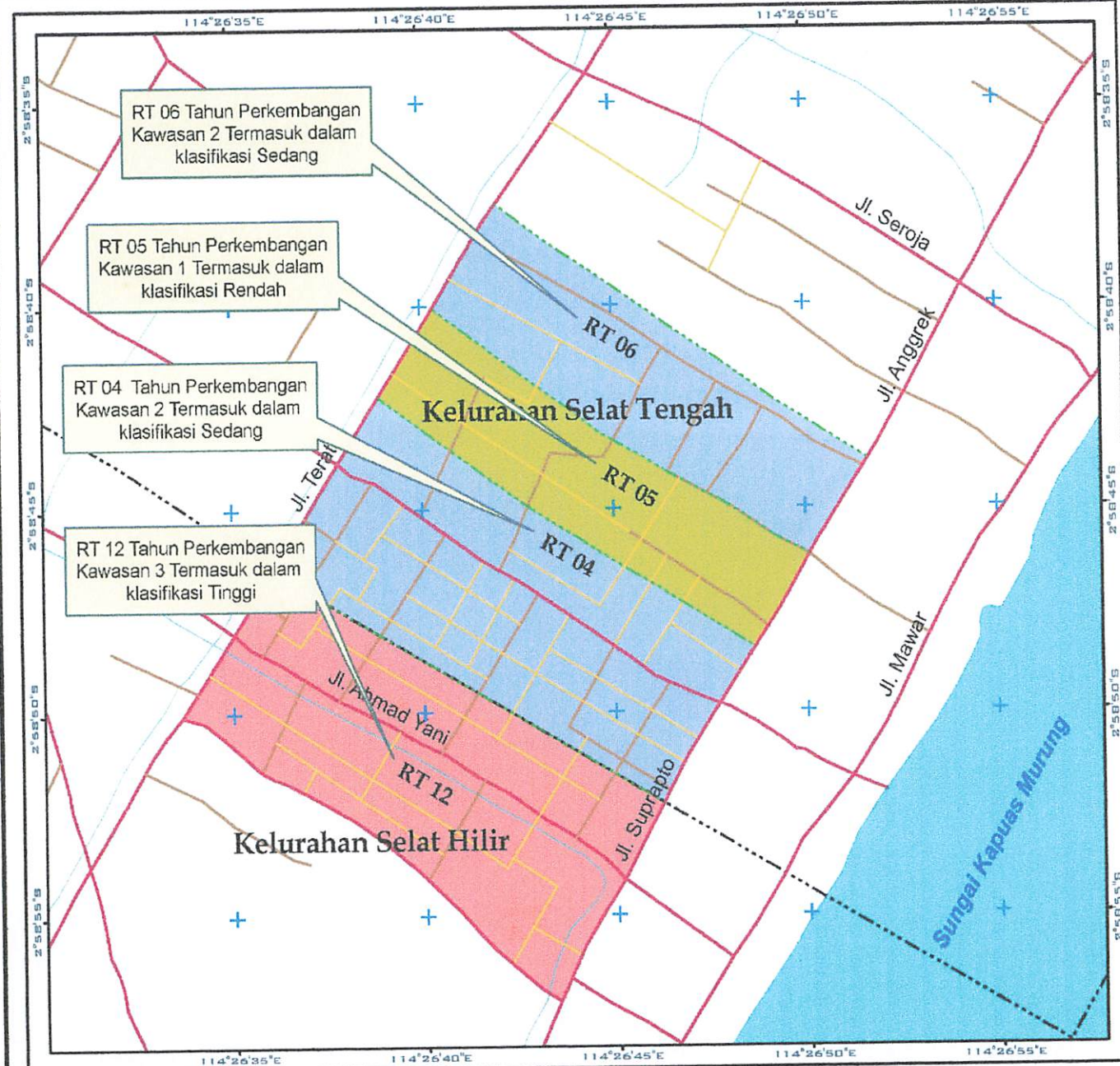
SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.4

PETUNJUK LETAK PETA







JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN TAHUN PERKEMBANGAN KAWASAN

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 2,33 - 3
- Sedang : 1,67 - 2,33
- Rendah : 1 - 1,67

SUMBER :
 - BAPPEDA Kota Kuala Kapuas
 - Hasil Analisa



SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.5

PETUNJUK LETAK PETA



Tabel 3.12
Tahun Perkembangan Kawasan Pemukiman Kumuh

Kelurahan	RT	Berkembang Sejak Tahun	Jumlah Index	Klasifikasi Index
Selat Hilir	12	1980	100	T
Selat Tengah	4	1985	60	S
	5	1993	20	R
	6	1990	60	S

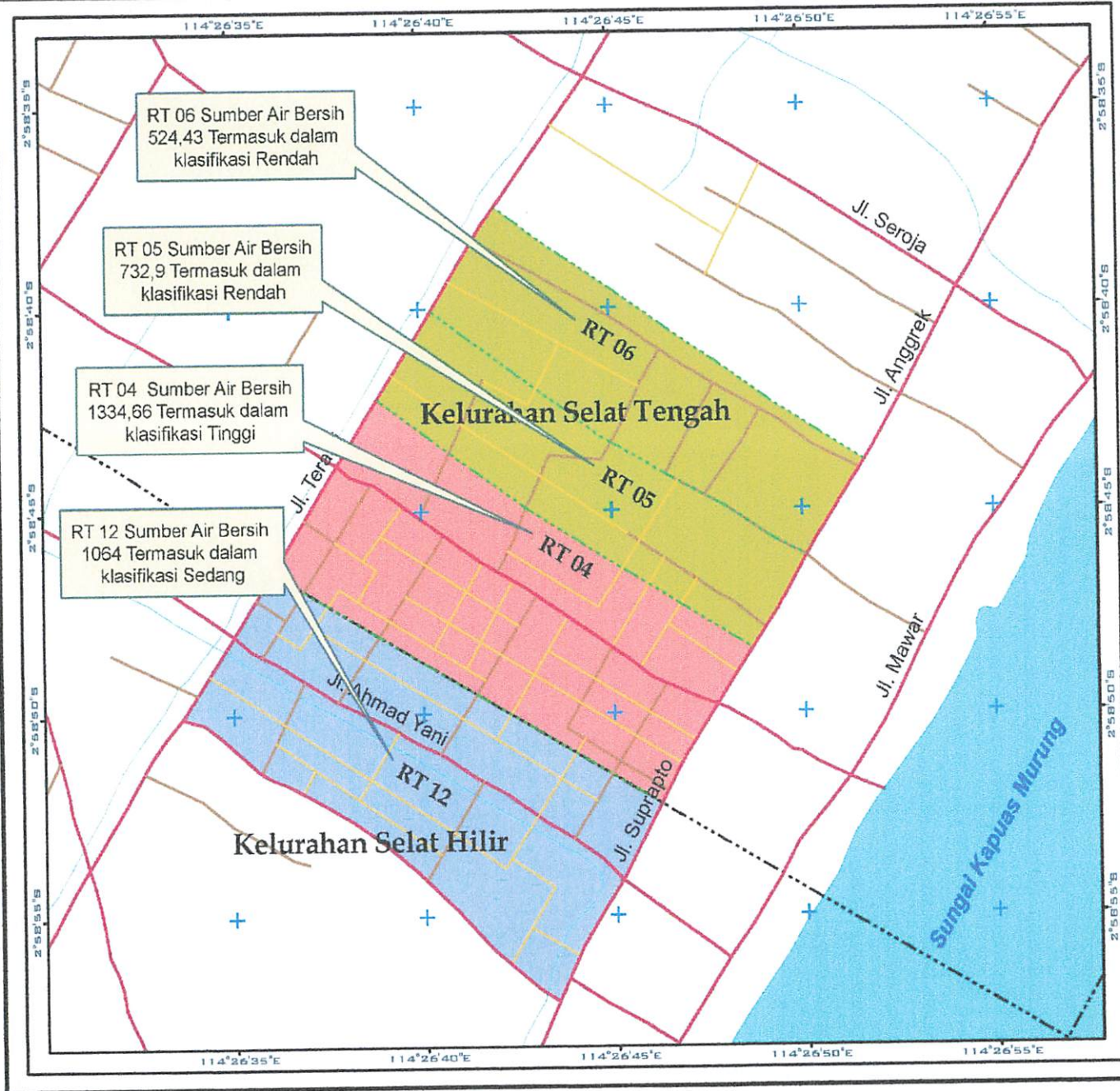
Sumber : Hasil Analisa dari isian RT

f) Air Bersih

Penggunaan air bersih di lokasi studi ini kebanyakan berasal dari air PDAM rata-rata sekitar 61 %, air sungai rata-rata sekitar 15 % dan air sumur rata-rata 12 %. Ini berarti sebagian besar masyarakat di lokasi studi memanfaatkan air PDAM untuk keperluan sehari-hari karena kualitas air PDAM nya sudah baik. Penilaian terhadap sistem pemenuhan kebutuhan akan air bersih terbagi menurut pemanfaatan:

- Sumur, nilai 4
- Kran Umum, nilai 2
- Sungai, nilai 3
- PDAM, nilai 1

Berdasarkan hasil perhitungan penggunaan air bersih di empat RT, angka tertinggi berada pada RT 4 sebesar 812,44. angka ini menunjukkan sebagian besar warga di RT 4 masih memanfaatkan air sumur dan air sungai sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil perhitungan dengan menggunakan bobot sebagai alat analisis ini didukung oleh kondisi eksisting berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa air sumur dan air sungai yang mereka gunakan tercemar air dari rawa dan sampah sehingga kualitas air menjadi buruk, sebagian warga terpaksa memanfaatkan sungai karena tidak mampu untuk membayar PDAM. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat membantu warga dengan menambah kran umum, karena kran umum yang tersedia di RT 4 hanya 1 hingga saat ini sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan warga. Hasil perhitungan penggunaan air bersih dapat dilihat pada tabel 3.13.



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN SUMBER AIR BERSIH

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
 ---- Batas Desa
 ---- Batas RT
 — Jalan Aspal
 — Jalan Tanah
 — Jalan Jembatan Kayu
 — Sungai
 Tinggi : 1064,59 - 1334,67
 Sedang : 794,51 - 1064,59
 Rendah : 524,43 - 794,51

SUMBER :

- HASIL PENELITIAN Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

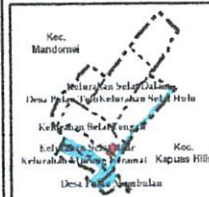


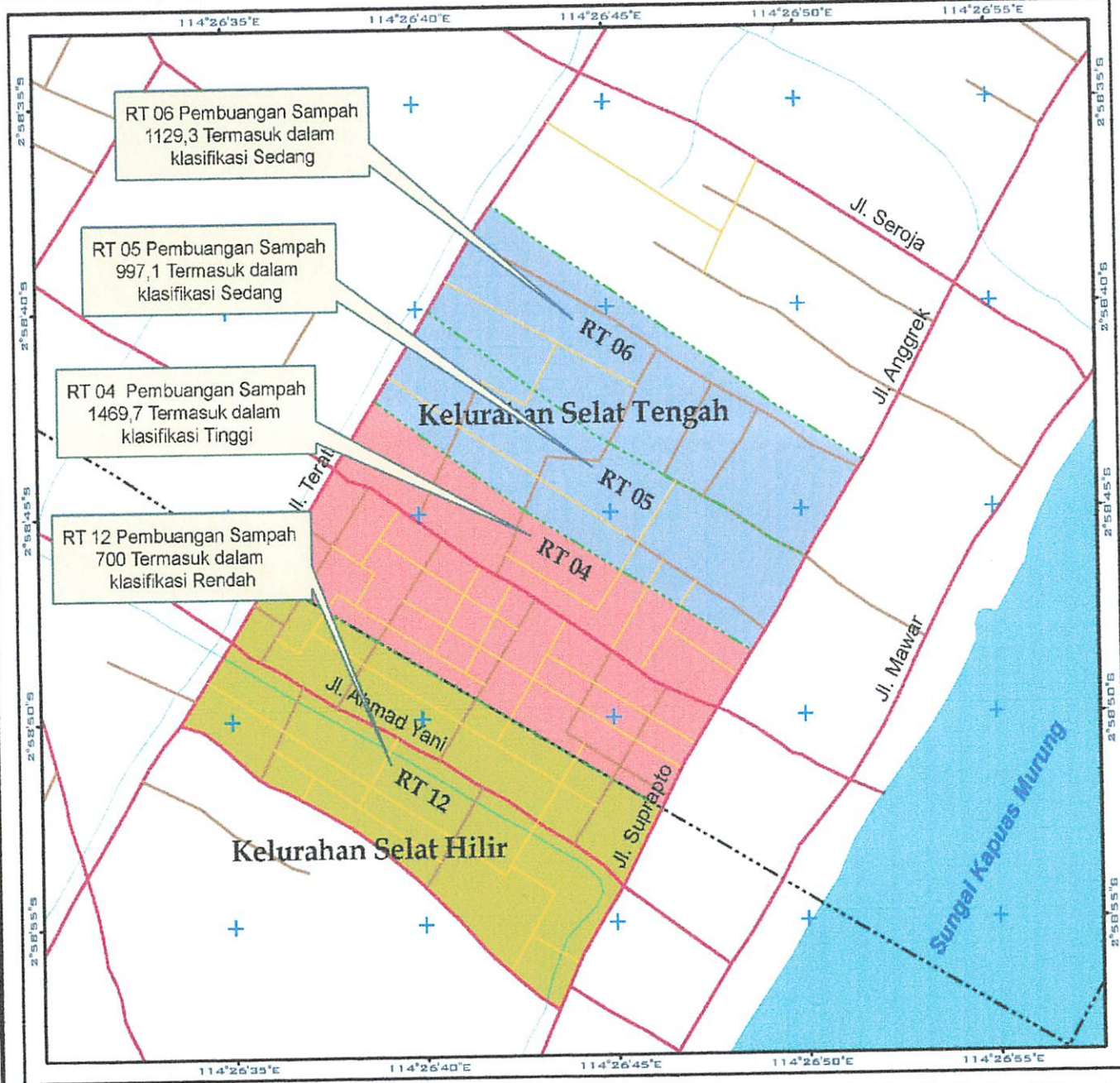
SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.6

 PETUNJUK LETAK PETA





JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
**ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN PEMBUANGAN SAMPAH**

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 1213,13 - 1469,7
- Sedang : 956,57 - 1213,13
- Rendah : 700 - 956,57

SUMBER :

- MAPEDIA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

SKALA : 1:350.000

60 30 0 60 M

NO. PETA : 3.7

PETUNJUK LETAK PETA

Dari hasil isian warga pada 4 RT di lokasi studi diketahui terdapat 3 RT yang ternyata masyarakatnya masih membuang sampah di sungai yaitu RT 4, RT 5 dan RT 6. alasan pemberian angka tertinggi pada sistem pembuangan sampah menunjukkan bahwa, sistem pembuangan ini sudah tidak sesuai dengan cara pembuangan sampah yang benar. Oleh karenanya sistem pembuangan tersebut mendapatkan angka yang tinggi demikian seterusnya. Untuk mengatasi masalah sampah perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat memberikan pemahaman tentang kebersihan lingkungan melalui organisasi-organisasi masyarakat seperti karang taruna agar masyarakat sebagai subyek akan lebih sadar tentang pentingnya hidup bersih, untuk realisasi program perbaikan sampah secara fisik bisa dengan menyediakan tong sampah agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai atau sekitar hunian. Hasil penilaian dapat dilihat pada tabel 3.14

h) Penerangan

Pada bagian ini pengamatan dilakukan dengan melihat prosentase daerah yang tidak memakai jasa pelayanan listrik dan yang sudah memakai jasa pelayanan listrik, sebagian besar RT di lokasi studi memakai listrik untuk penerangan didaerahnya rata-rata sekitar 81 %, namun ada sebagian kecil sekitar 19 % masyarakat yang tidak menggunakan listrik. Masyarakat yang tidak menggunakan jasa pelayanan listrik kebanyakan dikarenakan tidak mampu untuk membayar. Pengamatan terhadap faktor penerangan ini lebih ditekankan atau diprioritaskan untuk pemukiman di lokasi studi yang masyarakatnya banyak menggunakan penerangan bukan listrik, karenanya bobot yang diberikan: Penerangan bukan listrik, nilai 2 dan Penerangan Listrik, nilai 1. berdasarkan hasil perhitungan pada empat RT, angka tertinggi berada di RT 12 sebesar 285,71. ini berarti dari ke empat RT di lokasi studi RT 12 penduduknya paling banyak yang tidak menggunakan jasa pelayanan listrik karena tidak mampu membayar. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah bisa mengupayakan agar warga pada ke empat RT di lokasi studi dapat

menikmati jasa pelayanan listrik. Hasil perhitungan penerangan dapat dilihat pada tabel 3.15

Tabel 3.15
Penerangan

Kelurahan	RT	Penerangan						Jumlah Index	Klasifikasi Index
		1			2				
		Listrik			Bukan Listrik				
		Jumlah	Skor	Index	Jumlah	Skor	Index		
Selat Hilir	12	24	85,71	85,71	9	100	200	285,71	T
Selat Tengah	4	28	100	100	5	55,56	111,12	211,12	S
	5	19	67,86	67,86	6	66,67	133,34	201,2	R
	6	27	96,43	96,43	3	33,33	66,66	163,09	R

Sumber : Hasil Analisa dari kuisioner

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + 3,32 \log 4 \\
 K &= 1 + 3,32 \times 0,6 \\
 K &= 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{285,71 - 163,09}{3} \\
 &= 40,87
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 &- 163,09 - 203,96 = \text{Rendah (R)} \\
 &- 203,97 - 244,84 = \text{Sedang (S)} \\
 &- 244,85 - 285,72 = \text{Tinggi (T)}
 \end{aligned}$$

i) Sanitasi/MCK

Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan melihat pada kemampuan penduduk dalam menyediakan kebutuhan akan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK). MCK merupakan kebutuhan penting penduduk sehari-hari karenanya, penyediaan akan sarana MCK sangat dibutuhkan. Untuk lokasi yang tidak mempunyai MCK disetiap rumah dapat menggunakan MCK umum yang disediakan oleh masyarakat setempat. Pengamatan terhadap MCK di lokasi studi dibagi menurut :

- Septic Tank/MCK Pribadi, nilai 1
- MCK umum/kelompok , nilai 2
- Sungai, nilai 3

Berdasarkan hasil penilaian pada 4 RT sebagai daerah penelitian dengan metode pembobotan tersebut, diketahui nilai tertinggi terletak pada RT 4 sebesar 392,29, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga pada RT 4 masih banyak yang menggunakan MCK umum dan sungai untuk keperluan mandi, cuci dan kakus. Berdasarkan kondisi eksisting pada RT 4, masih banyak warga yang menggunakan MCK umum yaitu sekitar 6 KK

untuk keperluan mandi, cuci dan kakus sedangkan MCK yang tersedia hanya 2, diharapkan pemerintah bisa memberikan bantuan pembangunan MCK baik di darat maupun di MCK sungai mengingat di lokasi studi masih banyak warga yang memanfaatkan sungai atau dari swadaya masyarakat. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan terhadap MCK dapat dilihat pada tabel 3.16

3.16
Sanitasi/MCK

Kelurahan	RT	Sanitasi /MCK									Jumlah Index	Klasifikasi Index
		1			2			3				
		Septic Tank			MCK Umum			Sungai				
		Jumlah	SKOR	INDEX	Jumlah	SKOR	INDEX	Jumlah	SKOR	INDEX		
Selat Hilir	12	20	100	100	13	100	200	0	0	0	300	R
Selat Tengah	4	16	80	80	6	46,15	92,3	11	73,33	219,99	392,29	T
	5	10	50	50	0	0	0	15	100	300	350	S
	6	14	70	70	4	30,77	61,54	12	80	240	371,54	T

Sumber : Hasil Analisa dari kuisisioner

$$K = 1 + 3,32 \log 4$$
$$K = 1 + 3,32 \times 0,6$$
$$K = 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}$$

Interval

=

$$\frac{392,29 - 300}{3}$$
$$= 30,76$$

- 300 - 330,76 = Rendah (R)

- 330,77 - 361,53 = Sedang (S)

- 361,54 - 392,30 = Tinggi (T)

j) Jarak Lokasi Pemukiman dengan Pusat Kegiatan Ekonomi/Kegiatan Kota

Semakin dekat jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat kegiatan kota menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal/menempati kawasan tersebut, hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan hunian pada suatu kawasan. Warga berpendapat semakin dekat jarak rumah dengan pasar atau pusat pelayanan kota maka akan menghemat biaya transportasi. Hal ini berarti semakin dekat jarak rumah dengan pusat kegiatan ekonomi/pusat kegiatan kota maka penilaian terhadap munculnya pemukiman kumuh semakin tinggi



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :

ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN SUMBER PENERANGAN

LEGENDA :

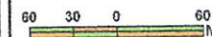
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 322,62 - 385,72
- Sedang : 259,52 - 322,62
- Rendah : 196,42 - 259,52

SUMBER :

- Peta Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

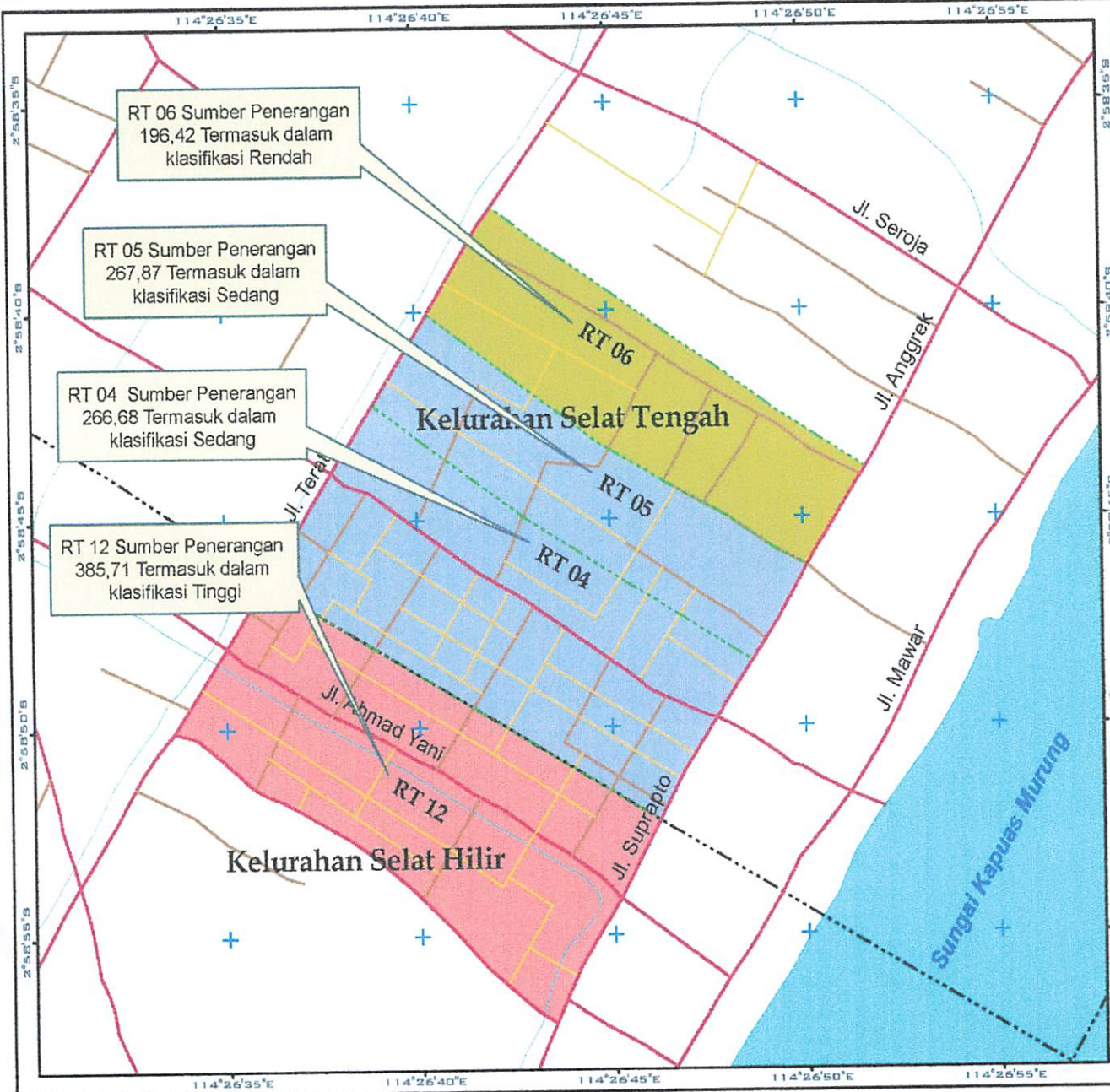


SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.8

PETUNJUK LETAK PETA





JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

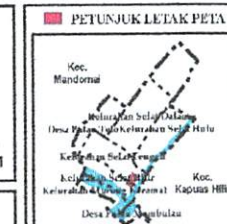
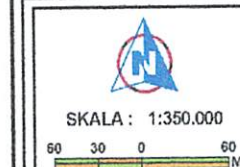
JUDUL PETA :
ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN KONDISI SANITASI

LEGENDA :

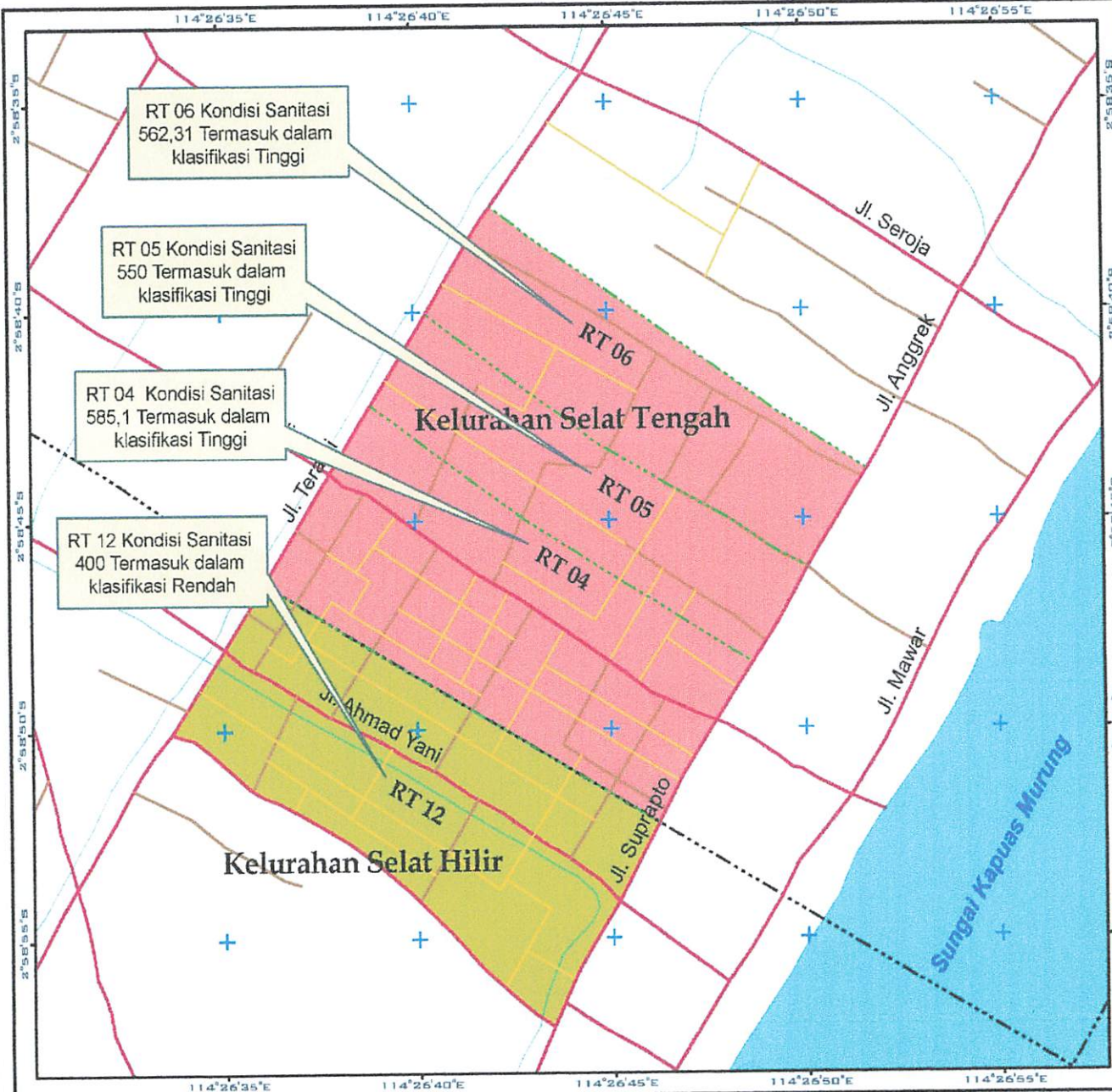
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 523,4 - 585,1
- Rendah : 400 - 461,7

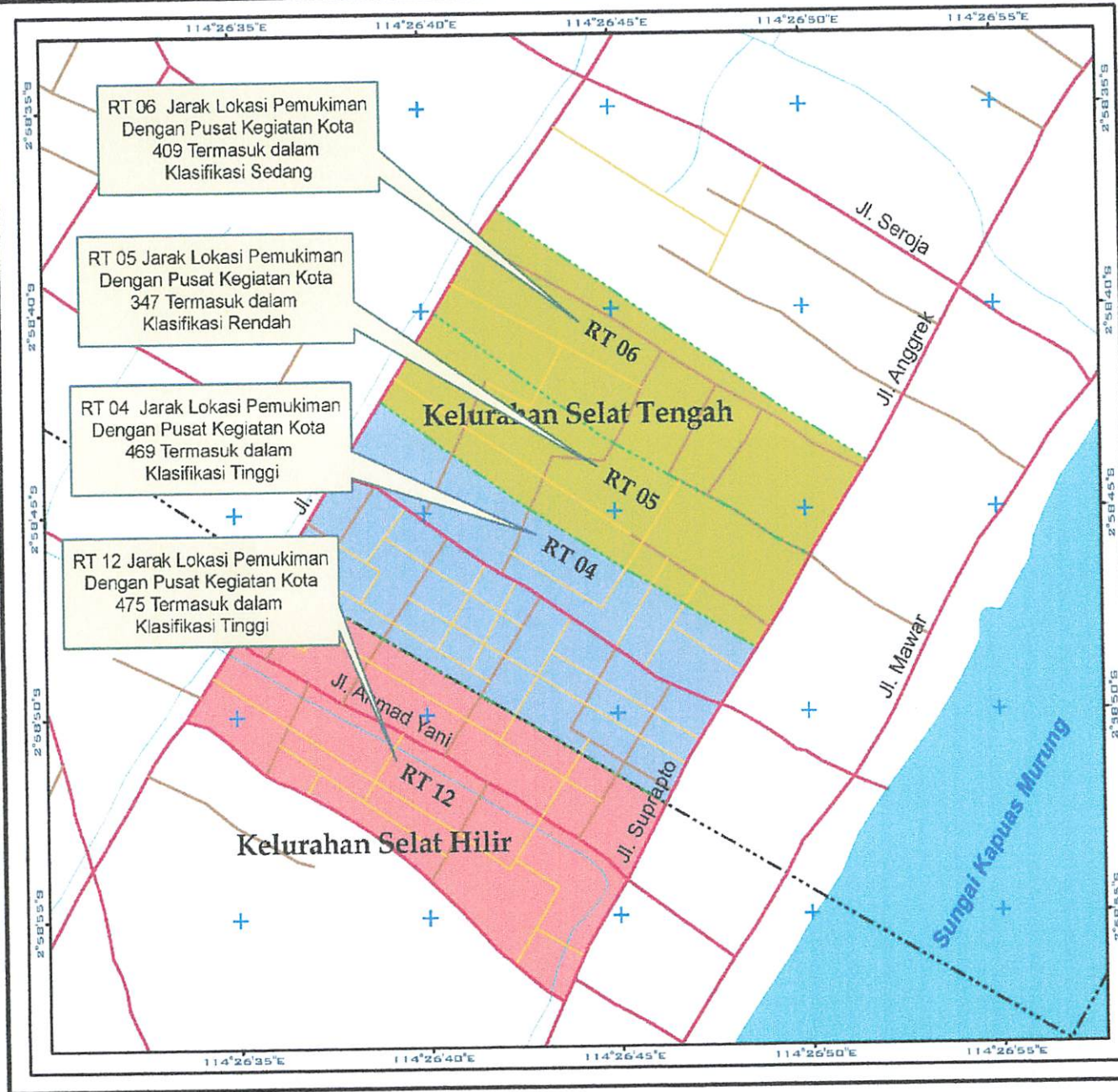
SUMBER :

- MAPPEDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa



NO. PETA : 3.9





JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :

ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN JARAK LOKASI PEMUKIMAN DENGAN
PUSAT KEGIATAN EKONOMI ATAU PUSAT KEGIATAN KOTA

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 432 – 475
- Sedang : 389 – 432
- Rendah : 347 – 389

SUMBER :

- RAPPED A Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

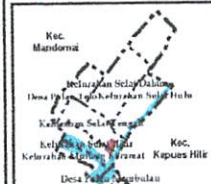


SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.10

PETUNJUK LETAK PETA



3.17
Jarak Lokasi Pemukiman dengan Pusat Kegiatan Ekonomi
Atau Pusat Kegiatan Kota

Kelurahan	RT	Jarak Lokasi Pemukiman dengan Pusat Kegiatan Kota									Jumlah Index	Klasifikasi Index
		Dekat (≤ 5 km)			Sedang (5 – 10 km)			Jauh (> 10 km)				
		3			2			1				
		Jumlah	SKOR	INDEX	Jumlah	SKOR	INDEX	Jumlah	SKOR	INDEX		
Selat Hilir	12	22	91,67	275	11	100	200	0	0	0	475	T
Selat Tengah	4	23	95,83	288	10	91	182	0	0	0	469	T
	5	19	79,17	238	6	55	109	0	0	0	347	R
	6	24	100	300	6	55	109	0	0	0	409	S

Sumber : Hasil Analisa dari kuisisioner

$$K = 1 + 3,32 \log 4$$
$$K = 1 + 3,32 \times 0,6$$
$$K = 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}$$

$$\text{Interval} = \frac{475 - 347}{3}$$
$$= 43$$

$$- 347 - 389 = \text{Rendah (R)}$$
$$- 390 - 433 = \text{Sedang (S)}$$
$$- 434 - 477 = \text{Tinggi (T)}$$

3.3.2. Faktor Sosial

Variabel sosial dalam studi ini memiliki indikator yang meliputi kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan ketenagakerjaan. Dimana lingkungan kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari penduduk itu sendiri, sehingga dalam kehidupan sosial masyarakat yang layak perlu terjalinnya hubungan antar masyarakat itu sendiri, tingkat pendidikan penduduk menunjukkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat kawasan kumuh. Berikut pembobotan sub variabel amatan tersebut :

a) Jumlah penduduk dalam satu Wilayah (jiwa/ha).

Dasar pertimbangannya adalah distribusi kepadatan penduduk yang relatif tinggi dalam suatu lingkungan pemukiman akan menunjukkan terbatasnya optimalisasi pelayanan dari berbagai fasilitas yang ada. Keadaan ini menggambarkan kecenderungan menurunnya kemampuan fasilitas dan merupakan prioritas yang tinggi untuk sasaran perbaikan pemukiman kumuh. makin tinggi tingkat kepadatan penduduk dalam suatu kawasan pemukiman semakin buruk kondisi lingkungannya. Kepadatan penduduk dinyatakan dalam jumlah penduduk per hektar yang diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk pemukiman kumuh (RT) dengan luas administratif

lingkungan terkecil (RT). dari perhitungan diketahui tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada 4 RT terletak di RT 4 sebesar 357 jiwa/ha ini menunjukan buruknya kondisi lingkungan dan dapat mengakibatkan terbatasnya optimalisasi pelayanan dari berbagai fasilitas yang ada karena terbatasnya lahan, jadi untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pengawasan dari pihak instansi baik kelurahan, RW atau RT terhadap para pendatang, yang masuk atau pindah dari lokasi studi untuk menghindari pertambahan jumlah penduduk dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan lingkungan guna peningkatan mutu lingkungan. Perhitungan tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 3.18

- Kepadatan penduduk 314 – 328,33 jiwa/ha, rendah
- Kepadatan penduduk 328,33 – 342,66 jiwa/ha, sedang
- Kepadatan penduduk 342,66 – 357 jiwa/ha, Tinggi

Tabel 3.18
Kepadatan Penduduk

Kelurahan	RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Daerah (Ha)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	TINGKAT KEPADATAN
Selat Hilir	12	327	0,95	344	T
Selat Tengah	4	328	0,92	357	T
	5	245	0,78	314	R
	6	297	0,85	349	T

Sumber : Hasil Analisa Monografi Kelurahan

$$K = 1 + 3,32 \log 4$$
$$K = 1 + 3,32 \times 0,6$$
$$K = 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}$$

$$\text{Interval} = \frac{357 - 314}{3} = 14$$

- 314 – 328 = Rendah (R)

- 329 – 343 = Sedang (S)

- 344 – 358 = Tinggi (T)

b) *Tingkat pendidikan penduduk.*

Perbaikan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dimana semakin banyak penduduk mengenyam pendidikan akan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya maka diharapkan dapat memperpaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan di lokasi studi serta mempermudah pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana lingkungan hunian yang layak sehingga masyarakat akan menjaga, memelihara dan bertanggung jawab terhadap hasil

program perbaikan lingkungan karena adanya rasa memiliki. Dalam hal tingkat pendidikan penduduk untuk program perbaikan pemukiman kumuh, pengamatan ditekankan pada RT dengan kondisi penduduknya yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu tingkat pendidikan merupakan prioritas untuk sasaran perbaikan pemukiman kumuh. Perhitungan dilakukan dengan memberi nilai bobot untuk setiap jenis mata pencaharian. Pembobotan ini berdasarkan pada pengangkaan dengan perincian :

- Sangat tinggi (S2) nilai terendah 1 - Sedang (SLTP), nilai 4
- Tinggi (S1) nilai 2 - Cukup rendah (SD), nilai 5
- Cukup Tinggi (SLTA), nilai 3 - Sangat rendah (tidak sekolah) nilai 6

Dari hasil perhitungan pada 4 RT di lokasi studi, nilai indek tertinggi adalah RT 4 dengan jumlah sebanyak 1869 ini berarti bahwa sebagian besar penduduk RT 4 tingkat pendidikannya masih rendah maka untuk menangani masalah tersebut langkah ke depan dapat dilakukan dengan mencerdaskan masyarakat melalui program peningkatan kualitas pendidikan berupa Kejar Paket A dan B. Dimana penduduk yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang kurang dapat mengikuti program tersebut sedangkan nilai indek terendah untuk tingkat pendidikan terdapat di RT 5 dengan jumlah sebesar 1130 ini berarti di RT 12 banyak penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu membuat program perbaikan pemukiman kumuh baik yang berasal dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Untuk lebih jelas hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.19

c) Mata pencaharian

Dalam hal matapencaharian untuk program perbaikan pemukiman kumuh, pengamatan ditekankan pada daerah dengan kondisi penduduknya yang mempunyai tingkat penghasilan yang relatif rendah, kondisi ini dapat digambarkan dengan komposisi mata pencaharian penduduk yang menunjukkan keterbatasan kemampuan dalam membiayai berbagai pelayanan kebutuhan dasar. Untuk mempermudah perhitungan maka penulis membagi tingkat sosial



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :

ANALISA KEPADATAN PENDUDUK BERDASARKAN
KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH

LEGENDA :

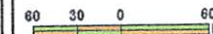
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 342.66 - 357
- Rendah : 314 - 328.33

SUMBER :

- BAPEDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

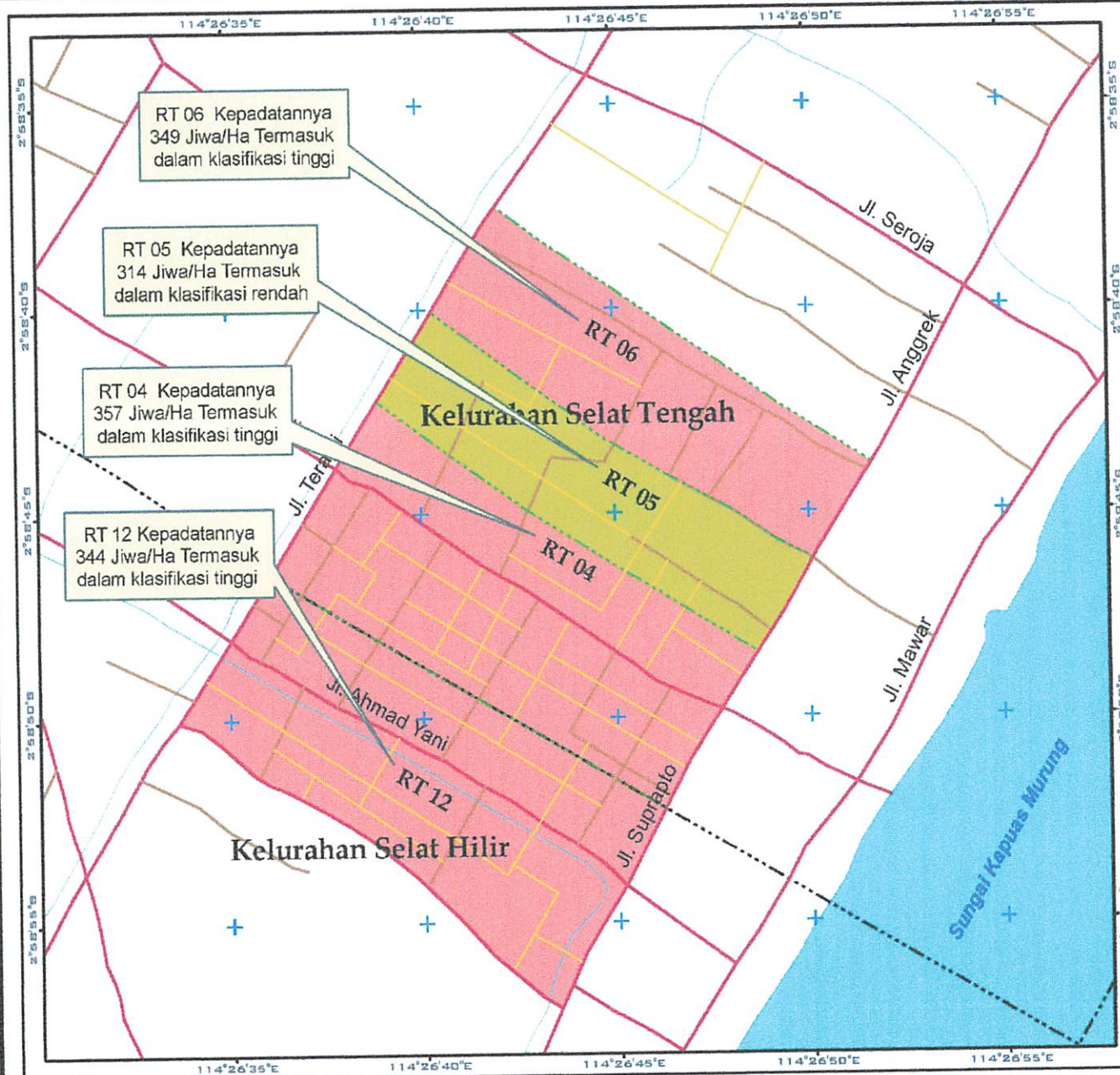


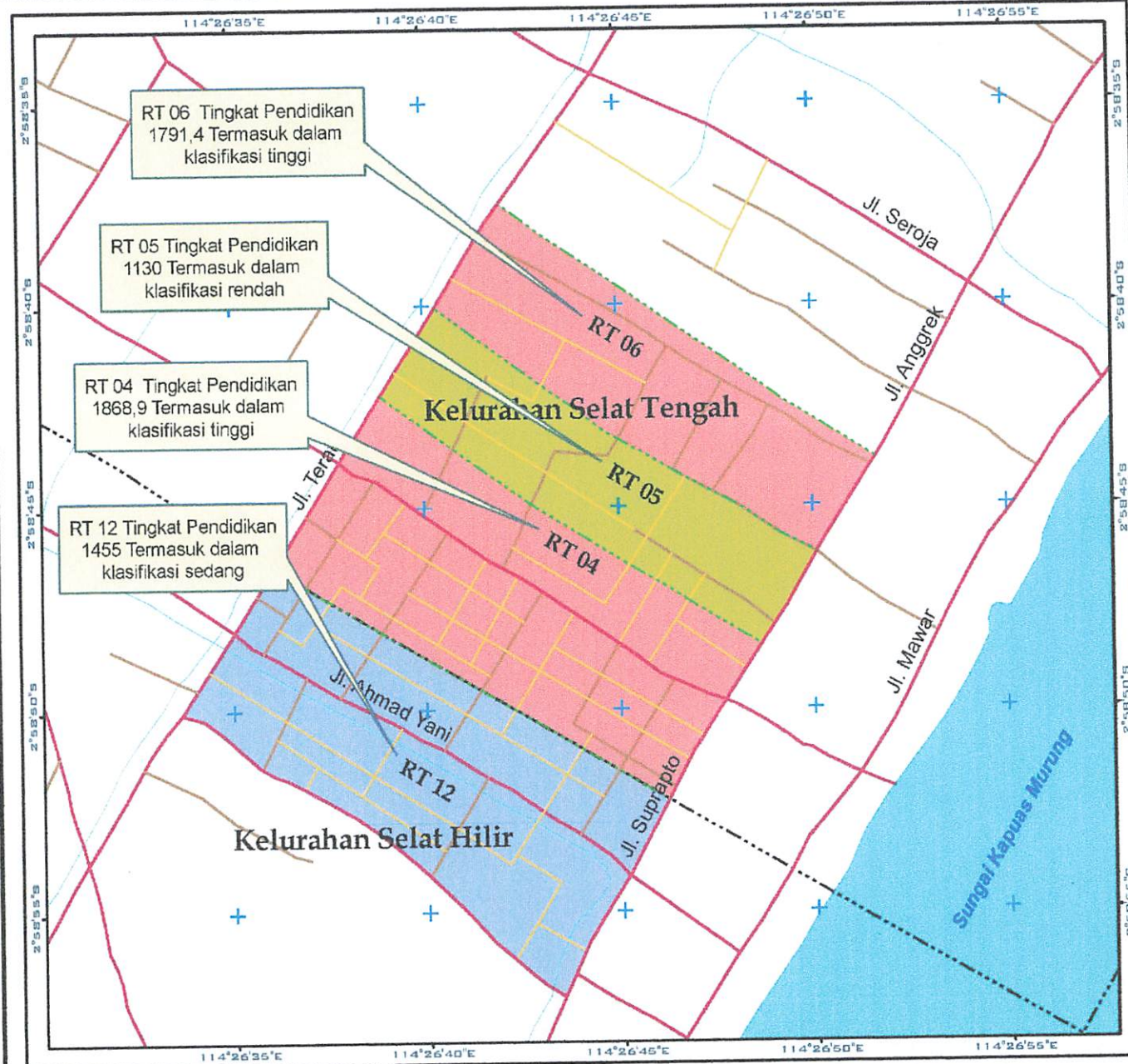
SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.11

PETUNJUK LETAK PETA





JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
**ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 1622,6 - 1868,9
- Sedang : 1376,3 - 1622,6
- Rendah : 1130 - 1376,3

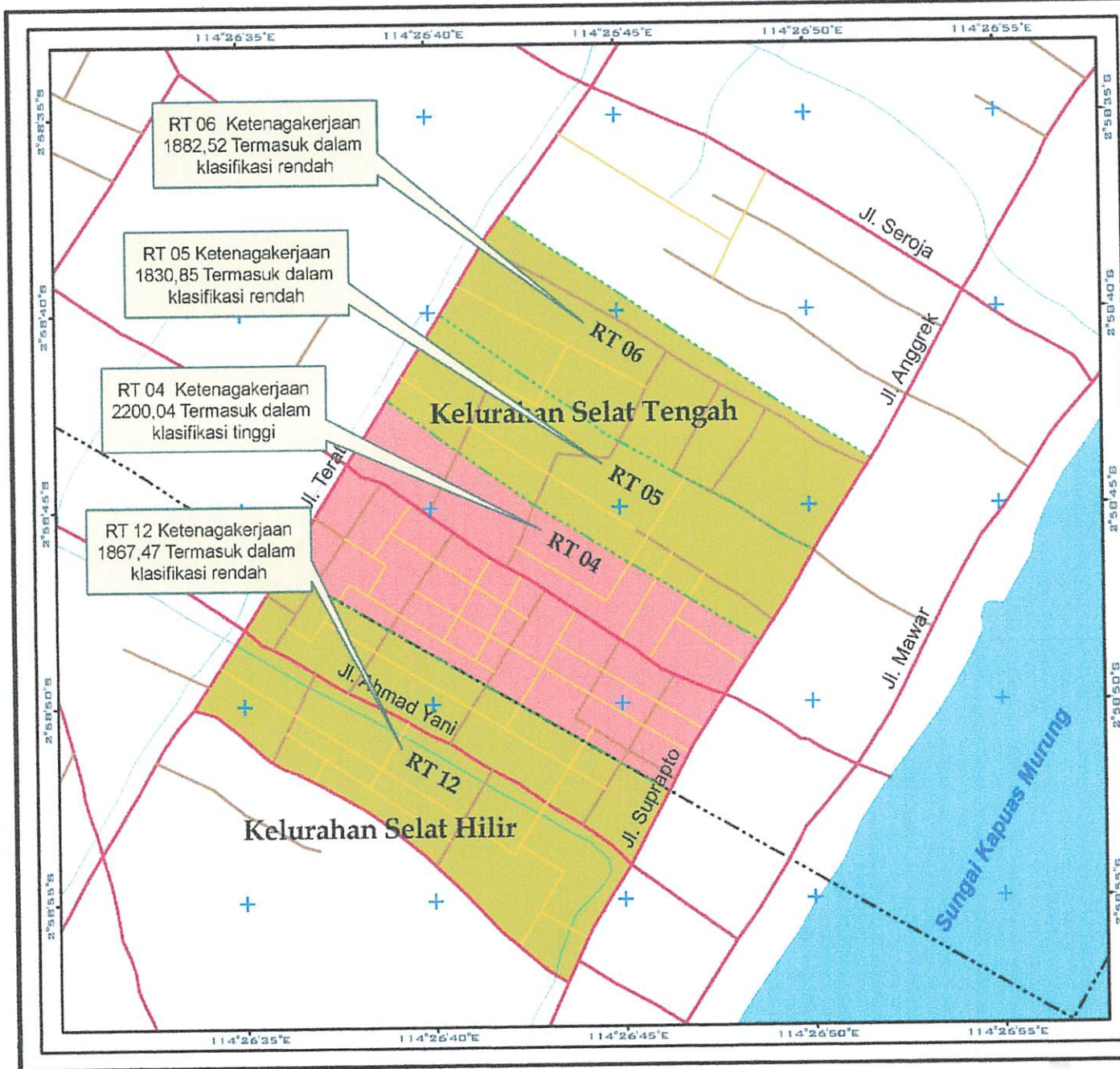
SUMBER :

- BAPPEDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

SKALA : 1:350.000

NO. PETA : 3.12

PETUNJUK LETAK PETA



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 2077 - 2200
- Rendah : 1830,85 - 1954

SUMBER :

- MAPPEDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

SKALA : 1:350.000

NO. PETA : 3.13

PETUNJUK LETAK PETA

kemampuan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan pemukiman kumuh. Apabila tingkat pengangguran penduduk kawasan pemukiman kumuh cukup tinggi maka semakin kecil kemampuan ekonominya, berarti merupakan prioritas untuk perbaikan. Perhitungan dilakukan dengan memberi nilai bobot. Untuk setiap jenis mata pencaharian. Pembobotan ini berdasarkan pada pengangkaan antara 1 – 7 dengan perincian

- 1 = bobot terendah
- 3 = bobot menengah
- 7 = bobot tertinggi

Penilaian untuk faktor ketenagakerjaan dihitung dari hasil penjumlahan semua jenis mata pencaharian yang sudah dikalikan dengan bobot tiap jenis mata pencaharian. Dari hasil perhitungan diketahui nilai tertinggi berada di RT 4 dengan nilai sebesar 2200,04 angka ini menunjukkan sebagian besararganya adalah pengangguran yang menyebabkan terbatasnya kemampuan penduduk dalam membiayai kebutuhan dasarnya untuk mengatasi masalah ini langkah ke depan yang dapat dilakukan dengan pemberian kursus atau ketrampilan kepada masyarakat agar siap untuk terjun ke dunia kerja maka tenaga peangguran dapat dimanfaatkan dan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di lokasi studi. Untuk lebih jelasnya struktur ketenagakerjaan dan hasil penilaian dapat dilihat pada tabel 3.20 diatas.

3.3.3. Faktor Ekonomi

Semakin tinggi tingkat perekeonomian masyarakat di suatu daerah, maka semakin tinggi pula kualitas kesejahteraan daerah tersebut. Sehingga upaya untuk meningkatkankualitas kesejahteraan suatu daerah perlu adanya suatu kegiatan guna meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Sesuai dengan tujuan studi yaitu untuk mendapatkan prioritas perbaikan pemukiman kumuh, maka dilakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi penduduk lokasi studi. Yang dimaksud disini adalah penilaian terhadap pendapatan rata-rata masyarakat lokasi studi setiap bulan yang dibagi menurut jumlah pendapatan rata-rata terendah kurang dari Rp. 150.000,-/bulan setiap orang hingga pendapatan penduduk lebih

dari Rp 1.000.000,-/bulan. Adapun penilaian yang dilakukan dengan pembobotan adalah sebagai berikut:

- Tingkat pendapatan kurang dari 150, nilai 4
- Antara pendapatan Rp 150.000 – Rp 500.000, nilai 3
- Pendapatan antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000, nilai 2
- Tingkat pendapatan > Rp 1.000.000, nilai 1

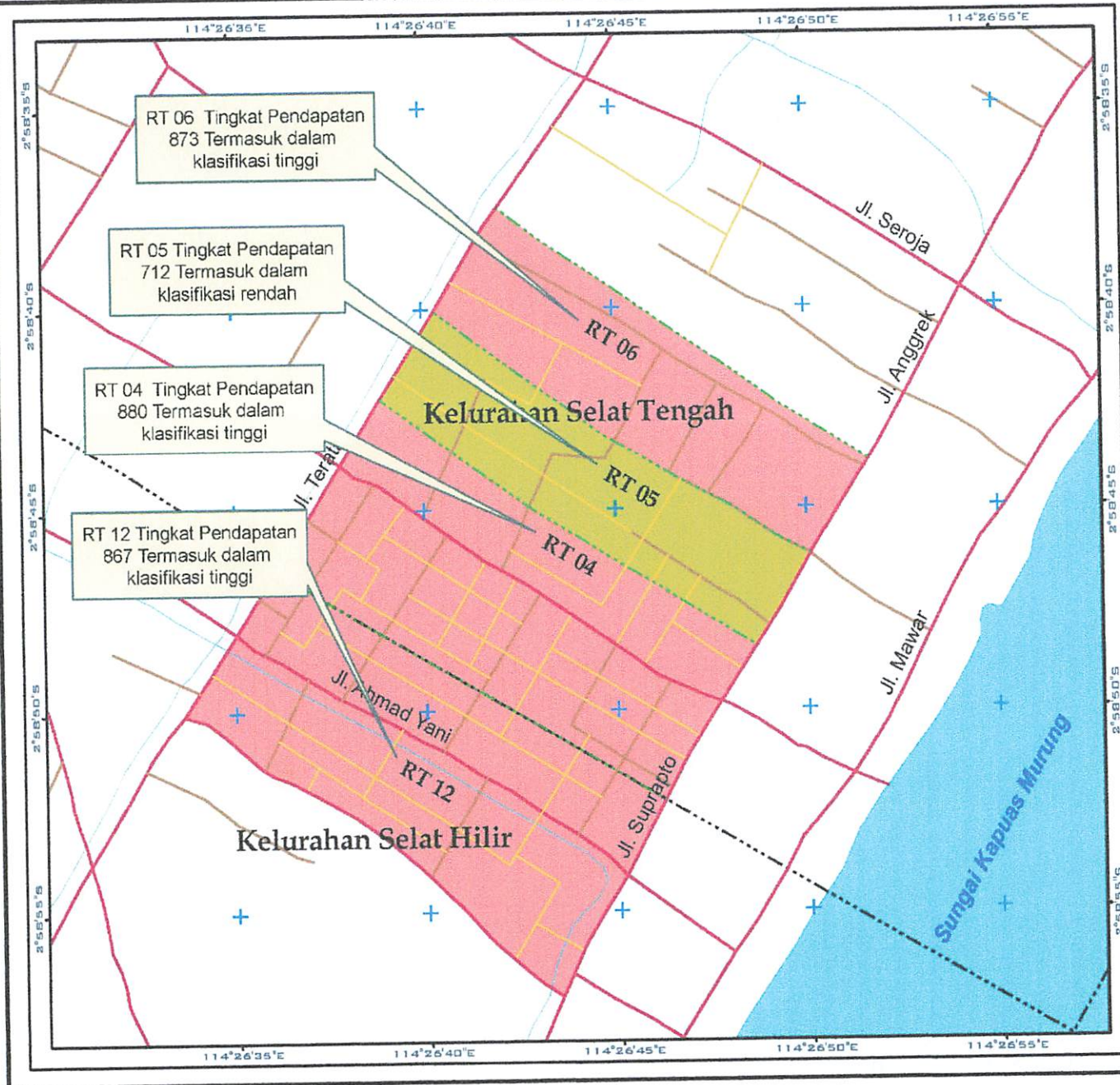
Penilaian terhadap tingkat pendapatan penduduk dimaksud untuk mengetahui besarnya kemampuan masyarakat dalam membiayai kebutuhan hidupnya, dengan kata lain untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat pemukiman kumuh tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk berpenghasilan kurang dari Rp 150.000,-/ bulan setiap orang, maka tingkat kemakmuran masyarakat pemukiman tersebut semakin rendah. Berarti merupakan prioritas untuk perbaikan. Dari hasil penilaian terhadap tingkat pendapatan masyarakat pada 4 RT di lokasi studi ini, nilai tertinggi terdapat di RT 12 dengan jumlah sebanyak 905,13. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di RT 12 didominasi oleh penduduk yang berpenghasilan kurang dari Rp. 150.000,-/bulan sampai Rp. 150.000,-/bulan dengan demikian tingkat penghasilan masyarakat RT 12, RT 4 dan RT 6 masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator dengan pemberian modal atau investasi, bisa juga dengan memberikan modal kepada sebagian besar penduduk untuk membuat usaha bersama seperti *home industry* yang nantinya dapat menjawab permasalahan rendahnya pendapatan di RT 12 dan kedepannya dapat meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di RT 12. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.21

Tabel 3.21
Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan															
Kehurahan	RT	Tingkat Pendapatan												Jumlah Index	Klasifikasi Index
		4			3			2			1				
		≥ Rp 150.000			150 Rb – 500 Rb			500 Rb – 1 jt			> 1 jt				
		J	S	I	J	S	I	J	S	I	J	S	I		
Selat Hilir	12	4	66,67	267	6	100,00	300	8	100	200	10	100	100	867	T
Selat Tengah	4	6	100,00	400	5	83,33	250	6	75	150	8	80	80	880	T
	5	4	66,67	267	6	100,00	300	3	37,50	75	7	70	70	712	R
	6	5	83,33	333	5	83,33	250	8	100,00	200	9	90	90	873	T

Ket : J = Jumlah S = Skor I = Index

Sumber : Hasil Analisa dari kuisioner





JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :
ANALISA KARAKTERISTIK PEMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN TINGKAT PENDAPATAN

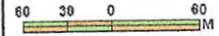
LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Tinggi : 823,89 - 880
- Rendah : 712 - 767,78

SUMBER :

- BAPPEDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.14

PETUNJUK LETAK PETA



$$\begin{array}{lll}
 K = 1 + 3,32 \log 4 & \text{Interval} = \frac{880 - 712}{3} & - 712 - 767,78 = \text{Rendah (R)} \\
 K = 1 + 3,32 \times 0,6 & & - 767,79 - 823,90 = \text{Sedang (S)} \\
 K = 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas} & = 56,11 & - 823,91 - 880,02 = \text{Tinggi (T)}
 \end{array}$$

3.4. Penyusunan Faktor-Faktor Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh

Penentuan prioritas ini merupakan tahap akhir dari proses penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh. Untuk menentukan prioritas perbaikan pemukiman kumuh, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a) Memberikan bobot penilaian pada tiap faktor-faktor yang mempengaruhi proses penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh terhadap tingkat kepentingan tertentu. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor Sosial, Faktor Ekonomi dan Faktor Fisik yang telah disusun pada bagian terdahulu (sub bab 3.3)
- b) Metode pembobotan yang akan digunakan dalam penilaian terhadap tingkat kepentingan adalah dengan menggunakan metode AHP (Analisa Hirarki Proses). Dimana kekuatan dari AHP ini terletak pada struktur hirarkinya sendiri yang memungkinkan seseorang memasukkan semua faktor penting dan mengaturnya dari atas ke bawah mulai dari yang paling penting ke tingkat yang berisi alternatif, untuk dipilih mana yang terbaik. Pada penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan:
 - Menata bagian atau variabel dalam suatu susunan hirarki
 - Memberi nilai numerik pada pertimbangan subyektif tentang relatif pentingnya setiap variabel. Sehubungan dengan pemberian nilai numerik pada setiap pertimbangan maka Thomas L. Saaty memberikan perangkat penilaian yang mempunyai derajat skala angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan), lebih jelasnya lihat tabel 3.22 pada halaman selanjutnya
 - Mensintesis berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel mana memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

3.4.1. Penyusunan Diagram Faktor Penentu.

Dalam proses perhitungan AHP diperlukan suatu perbandingan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Faktor-faktor yang akan dibandingkan disini merupakan kelompok-kelompok kegiatan yang dipakai sebagai penentu prioritas

perbaikan pemukiman kumuh, antara lain meliputi faktor sosial, Faktor ekonomi dan faktor fisik. Untuk lebih jelasnya lihat diagram 3.1.

Seperti yang dilukiskan pada diagram 3.1 diatas :

Tingkat I : menguraikan tujuan yang akan dicapai dalam studi

Tingkat II : faktor utama dari aktivitas tingkat I, dalam menentukan prioritas perbaikan pemukiman kumuh dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan fisik.

Tingkat III : Merupakan Faktor penunjang dari aktivitas pada tingkat I dan II, dimana faktor pada tingkat III ini merupakan elemen-elemen pecahan dari faktor utama yang tujuannya adalah untuk memberikan alternatif perbandingan agar tingkat kesalahan dapat diperkecil seminim mungkin.

Tingkat IV : Mengukur pentingnya setiap elemen bagi faktor penentu perbaikan pemukiman kumuh dengan menggunakan pertimbangan dari para pakar sesuai dengan bidangnya.

3.4.2. Hasil Perhitungan

Dari 10 kuisisioner yang disebarkan, diperoleh nilai bobot dari masing-masing faktor penentu, yaitu :

a) Perbandingan tingkat kepentingan antara faktor Sosial (S), Ekonomi (E) dan Fisik (F) yang memiliki nilai bobot :

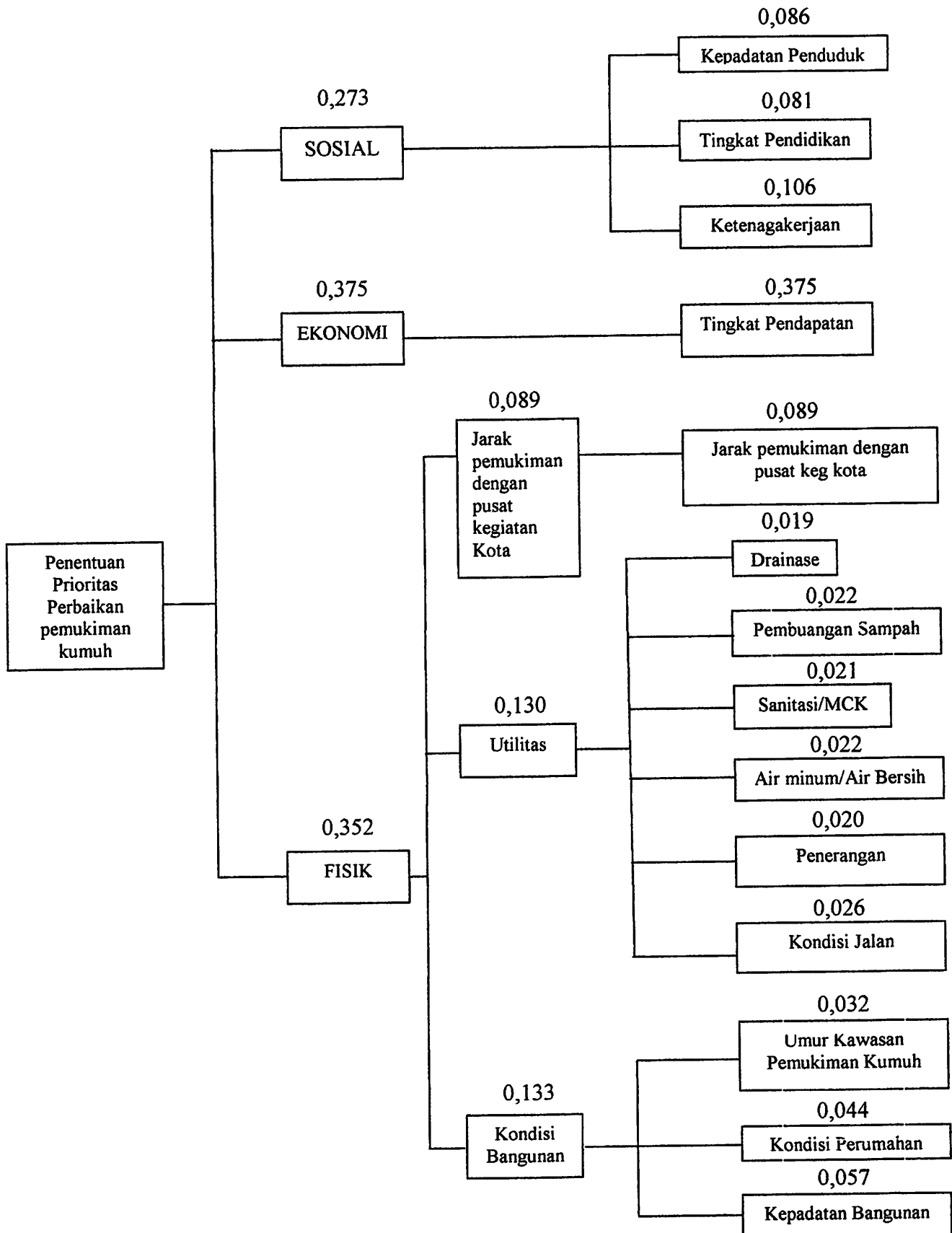
Sosial (S) = 0,273

Ekonomi/Tingkat Pendapatan (E/F4) = 0,375

Fisik (F) = 0,352

Dari perbandingan ketiga faktor sosial, ekonomi dan fisik berdasarkan pendapat dari 10 preferensi, dalam penentuan prioritas perbaikan pemukiman

**DIAGRAM FAKTOR-FAKTOR PENENTU
PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH**



faktor ekonomi dari ketiga faktor tersebut faktor ekonomi mempunyai bobot tertinggi, faktor kedua adalah faktor fisik dan yang terakhir adalah faktor sosial

- b) Perbandingan tingkat kepentingan antara faktor yang membentuk aspek Fisik, nilai perbandingannya adalah :

Jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan kota (A/F5) = 0,089

Utilitas (A) = 0,130

Kondisi Bangunan (B) = 0,133

Jika dilihat dari perbandingan tingkat kepentingan antara faktor yang membentuk aspek fisik bobot dengan kepentingan tertinggi adalah faktor kondisi bangunan, kemudian utilitas dan yang paling kecil nilai bobot kepentingannya adalah status tanah.

- c) Perbandingan tingkat kepentingan antara faktor yang membentuk aspek utilitas, nilai perbandingannya adalah :

Drainase (F6) = 0,109

Pembuangan Sampah (F7) = 0,022

Sanitasi/MCK (F8) = 0,021

Sumber Air Bersih (F9) = 0,022

Penerangan (F10) = 0,020

Kondisi Jalan (F11) = 0,026

Berdasarkan pendapat dari 10 para ahli di perkotaan kuala kapuas dilihat dari perbandingan tingkat kepentingan antara faktor yang membentuk aspek utilitas besarnya nilai bobot faktor penunjang seperti pembuangan sampah, sanitasi/MCK, Sumber air bersih, penerangan dan kondisi jalan tidak jauh berbeda ini menunjukan ke lima faktor penunjang ini sama penting untuk diprioritaskan dalam upaya perbaikan pemukiman kumuh, namun faktor yang paling penting dari perbandingan tingkat kepentingan antara faktor yang membentuk aspek utilitas ini adalah Drainase.

- d) Perbandingan tingkat kepentingan antara faktor yang membentuk aspek kondisi bangunan, nilai perbandingannya adalah :

Umur Kawasan Pemukiman Kumuh (F12) = 0,032

TABEL 3.22
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN KUALA KAPUAS

Kelurahan	RT	0,086		0,081		0,106		0,375		0,089		0,019		0,022	
		Kepadatan Penduduk		Tingkat Pendidikan		Mata Pencapaian		Tingkat Pendapatan		Jarak Lokasi Pemukimn dengan Pusat Kegiatan Kota		Kondisi Drainase		Pembuangan Sampah	
		Indeks (A)	A X F1	Indeks (B)	B X F2	Indeks (C)	C X F3	Indeks (D)	D X F4	Indeks (E)	E X F5	Indeks (F)	F X F6	Indeks (G)	G X F7
Selat Hilir	12	344	30	1455	118	1855	197	867	325	475	42	200	4	700	15
Selat Tengah	4	357	31	1869	151	2033	215	880	330	469	42	200	4	1580	35
	5	314	27	1130	92	1758	186	712	267	347	31	151,52	3	978	22
	6	349	30	1791	145	1896	201	873	327	409	36	181,82	3	1100	24

Sumber : Hasil Perhitungan

Kelurahan	RT	0,021		0,022		0,02		0,026		0,032		0,044		0,057		Jumlah	Prioritas
		Sanitasi/MCK		Air Bersih		Kondisi Penerangan		Kondisi Jalan		Tahun Perkembangan Kawasan Kumuh		Kondisi Bangunan		Kerapatan Bangunan			
		Indeks (H)	H X F8	Indeks (I)	I X F9	Indeks (J)	J X F10	Indeks (K)	K X F11	Indeks (L)	L X F12	Indeks (M)	F X F13	Indeks (N)	N X F14		
Selat Hilir	12	300	6	664	15	285,71	6	467	12	100	3	529,47	23	460,88	26	822	III
Selat Tengah	4	392,29	8	812,44	18	211,12	4	560	15	60	2	550	24	453,84	26	905	I
	5	350	7	457,34	10	201,2	4	240	6	20	1	309,47	14	342,48	20	689	IV
	6	371,54	8	348,88	8	163,09	3	240	6	60	2	468,08	21	419,4	24	839	II

Sumber : Hasil Perhitungan

$$K = 1 + 3,32 \log 4$$

$$K = 1 + 3,32 \times 0,6$$

$$K = 2,6 \rightarrow 3 \text{ kelas}$$

Interval

=

$$\frac{905 - 689}{3} = \frac{216}{3} = 72$$

$$- 689 - 761 = \text{Rendah (R)}$$

$$- 762 - 833 = \text{Sedang (S)}$$

$$- 834 - 905 = \text{Tinggi (T)}$$

Kondisi Perumahan (F13) = 0,044

Kepadatan Bangunan (F14) = 0,057

Faktor yang terakhir dalam penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh adalah kondisi bangunan yang mempunyai 3 faktor penunjang yaitu umur kawasan pemukiman kumuh, kondisi perumahan dan kepadatan bangunan. Berdasarkan pendapat dari 10 para ahli di perkotaan kuala kapuas dilihat dari perbandingan tingkat kepentingan antara faktor yang membentuk aspek kondisi bangunan, kepadatan bangunan mempunyai bobot kepentingan tertinggi selanjutnya kondisi perumahan dan bobot yang paling kecil adalah umur kawasan pemukiman kumuh.

Proses perhitungan setiap nilai faktor diatas dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai bobot pada lampiran.

3.4.3. Proses Penilaian Terhadap Unit Analisis

Berdasarkan nilai bobot faktor yang diperoleh dari hasil perhitungan AHP diatas, maka hasil ini akan dikalikan dengan hasil penilaian sub variabel dan analisa potensi pemukiman berdasarkan jawaban dari masyarakat per RT. Langkah selanjutnya dari hasil perkalian tersebut dibuat 3 (tiga) kelas interval menurut perhitungan metode sturges sehingga diperoleh nilai yang menunjukan prioritas perbaikan pemukiman kumuh dari ke 4 RT.

Berdasarkan hasil perhitungan penentuan prioritas perbaikan pemukiman kumuh pada tabel 3.20. didapat prioritas lokasi, yaitu Prioritas I pada RT 4, Prioritas II pada RT 6, Prioritas III pada RT 12 dan Prioritas IV pada RT I.



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2009

TUGAS AKHIR
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

JUDUL PETA :

ANALISA PENENTUAN PRIORITAS
LOKASI PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH

LEGENDA :

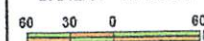
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas RT
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Jembatan Kayu
- Sungai
- Prioritas I
- Prioritas II
- Prioritas III
- Prioritas IV

SUMBER :

- BAPPEDA Kota Kuala Kapuas
- Hasil Analisa

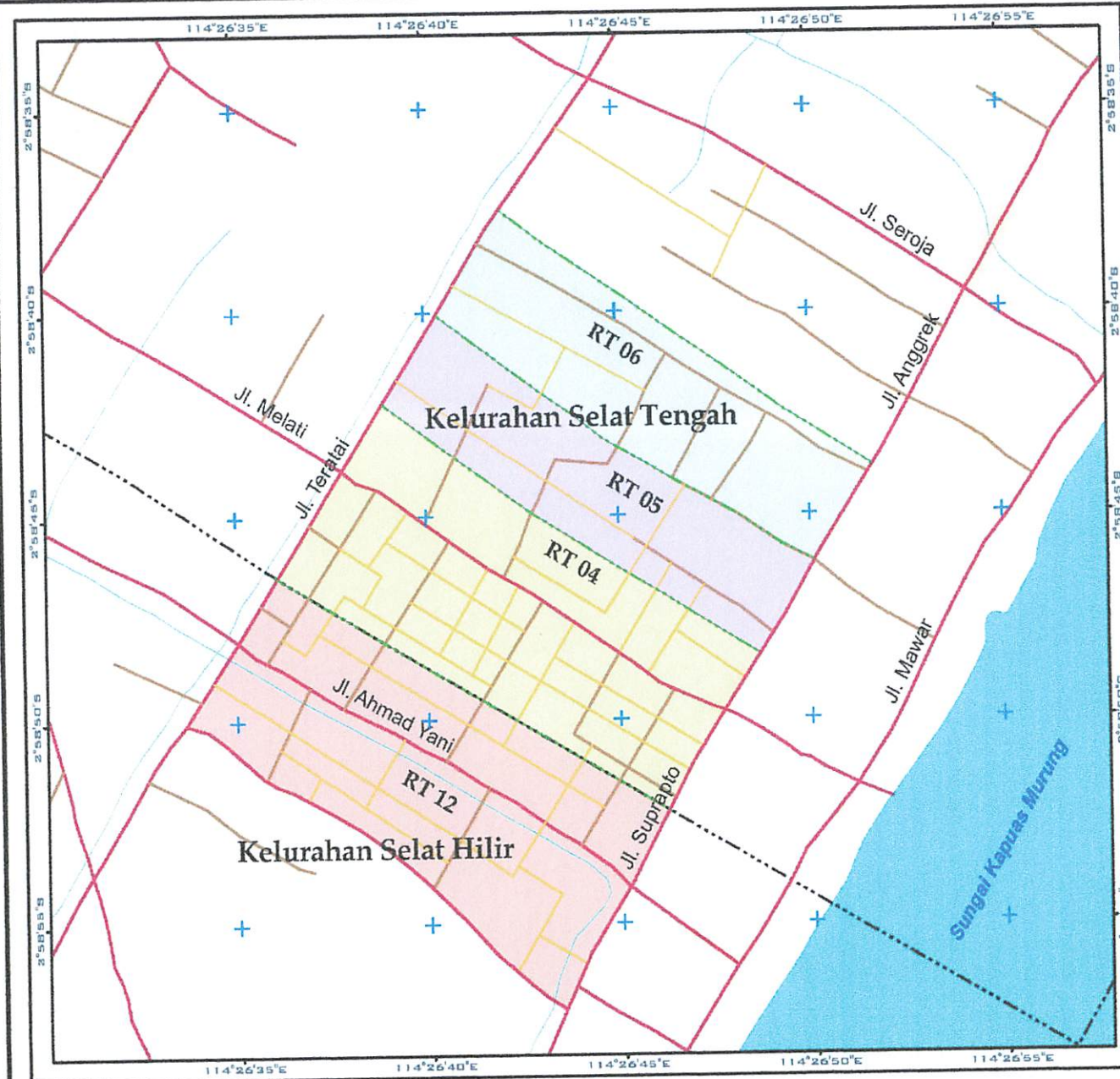


SKALA : 1:350.000



NO. PETA : 3.15

PETUNJUK LETAK PETA



BAB IV

PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KUALA KAPUAS

Sejalan dengan tujuan program perbaikan pemukiman kumuh yaitu untuk memperbaiki keadaan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan di pemukiman kumuh di perkotaan kuala kapuas yang ditandai oleh kondisi yang kurang layak, maka dengan adanya keterbatasan dana dari pemerintah diperlukan penentuan prioritas agar semua pemukiman kumuh yang ada di Perkotaan Kuala Kapuas tanpa terkecuali perlu mendapatkan upaya-upaya untuk memperbaiki dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh itu sendiri dengan melihat bahwa pemukiman kumuh di lokasi studi merupakan pemukiman padat yang menempati daerah rawa dengan kondisi lingkungan yang buruk dan rawan terhadap bahaya kebakaran.

Selain itu salah satunya masih banyak masyarakat yang membuang sampah dengan cara menumpuk sampah disekitar hunian sehingga membuat sirkulasi pertukaran air di lokasi studi (daerah rawa) menjadi tidak lancar. Menyikapi hal tersebut dan berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, perlu adanya penanganan perbaikan pemukiman kumuh sesuai dengan karakteristik pemukiman kumuh tersebut. Setelah dilakukan proses perhitungan menurut metode pembobotan dan analisis hirarki proses (AHP), maka pada bab ini merupakan hasil akhir dari proses untuk menentukan prioritas perbaikan pemukiman kumuh. Dan pada akhir bab ini penulis juga memberikan rekomendasi.

4.1. Prioritas dan Upaya Penanganan Perbaikan Pemukiman Kumuh

Dari ke 4 unit analisis yang penulis amati menunjukan bahwa masing-masing unit analisis memiliki nilai index yang tidak jauh berbeda. Tetapi dari hasil perhitungan pada tabel 3.22. sudah dapat diketahui prioritas perbaikan pemukiman kumuh, mulai dari prioritas I sampai IV, yaitu : RT 4, RT 6, RT 12 dan RT 5

Pada tabel 3.22. menunjukan bahwa prioritas I s/d IV untuk perbaikan pemukiman kumuh adalah RT 4 dan RT 6 (Kelurahan Selat Tengah), RT 12 (Kelurahan Selat Hilir) dan RT 5 (Kelurahan Selat Tengah).

Dengan melihat dari pemasalahan dan penyebab terjadinya kekumuhan di perkotaan Kuala Kapuas maka kondisi yang perlu diperbaiki atau dibangun pada loksai studi yang diprioritaskan berdasarkan hasil perhitungan dari tiap-tiap variabel dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1.
Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh

Lokasi Prioritas	Variabel	Masalah	Penanganan
RT 4	FISIK	▪ Kondisi Jalan : Berdasarkan hasil analisa jumlah indeks sebesar 560 termasuk dalam klasifikasi tinggi, angka ini menunjukan buruknya kualitas jalan di RT 4	▪ Jalan jembatan kayu yang berlubang/lapuk diganti dengan kayu ulin (kayu besi) atau bahan konstruksi yang kekuatannya sama seperti kayu ulin yang biayanya lebih murah seperti kayu galam dan blangiran. ▪ Jalan tanah dilapis dengan perkerasan semen
		▪ Berdasarkan hasil analisa jumlah total indeks sebesar 200 dan termasuk dalam klasifikasi tinggi dan berdasarkan hasil kuisioner 100 % drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak terjadi pertukaran air karena saluran drainase terhalang endapan gambut dan sampah	▪ Saluran drainase Tersier dikeruk untuk mengangkat gambut dan sampah sehingga bisa terjadi pertukaran air. ▪ Membuat saluran drainase sekunder (drainase tertutup) untuk tiap-tiap rumah berupa pipa yang langsung dihubungkan dengan saluran drainase tersier.
		▪ Kondisi Bangunan : Total indeks 550 termasuk dalam klasifikasi tinggi dan berdasarkan kuisioner 15 % masih terdapat bangunan temporer tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan.	▪ Melakukan kegiatan perbaikan rumah penduduk yang dianggap sudah tidak layak terutama rumah-rumah jenis temporer. ▪ Kegiatan perbaikan dilakukan dengan cara gotong royong oleh masyarakat sendiri ▪ Dana diperoleh dari swadaya masyarakat sendiri dan bantuan dari pemerintah
		▪ Kerapatan bangunan: Total indeks 453,84 termasuk dalam klasifikasi tinggi dan berdasarkan kuisioner 70 % berdempetan kaarena di lokasi studi banyak terdapat rumah barak (rumah yang dibangun berdempetan) sehingga mempengaruhi sirkulasi udara di dalam rumah dan rawan terhadap bahaya kebakaran karena sebagian besar rumah dari bahan kayu	▪ Membuat cerobong asap pada tiap-tiap dapur untuk rumah yang berdempetan ▪ Menyediakan hydrant untuk tiap-tiap rumah atau menyediakan pompa air untuk RT. ▪ Membatasi munculnya bangunan baru.
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan sumber air bersih total indeks sebesar 812,44 termasuk dalam klasifikasi tinggi dan berdasarkan kuisioner 15 % warga yang tidak menggunakan PDAM masih menggunakan sumur yang tercemar air dari rawa karena kran umum sebagai fasilitas umum masih	▪ Menambah fasilitas kran umum agar kebutuhan air bersih (memasak dan minum) warga bisa terpenuhi

Lokasi Prioritas	Variabel	Masalah	Penanganan
		kurang	
		Pembuangan sampah : berdasarkan hasil perhitungan pembuangan sampah total index sebesar 1580 termasuk dalam klasifikasi tinggi dan berdasarkan kuisisioner 24 % dibuang ke sungai dan 45 % ditimbun/ditumpuk di sekitar hunian	- Menyediakan tong sampah basah dan kering untuk masing-masing rumah agar warga tidak membuang sampah disekitar hunian. - Membuat tempat pembakaran sampah khusus (dalam drum) untuk membakar sampah mengingat lokasi studi rawan kebakaran. - Mengadakan penyuluhan tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan.
		Berdasarkan hasil perhitungan penerangan total indek sebesar 285,71 termasuk dalam klasifikasi tinggi, ini berarti masalah penerangan di RT 4 perlu mendapatkan perhatian dimana 15 % penduduk masih menggunakan penerangan bukan listrik sebagai sumber penerangan.	- Pemerintah memberikan bantuan genset yang dapat memenuhi kebutuhan 15 % penduduk, namun pemakaiannya dibatasi digunakan untuk malam hari - Dana operasional dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah
		Sanitasi/MCK : 33 % warga masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan akhir dan berdasarkan hasil perhitungan sanitasi/MCK total index sebesar 392,29 termasuk dalam klasifikasi tinggi. Ini berarti kondisi sanitasi/MCK perlu mendapat penanganan	Pembuatan MCK komunal dengan sistem septic tank yang dapat menampung sebanyak 33 % penduduk. Lokasi MCK dibuat di lingkungan RT 4 yang dianggap sesuai dan layak untuk dibangun MCK komunal.
		Berdasarkan hasil perhitungan jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan ekonomi/pusat kegiatan kota total index sebesar 469 termasuk dalam klasifikasi tinggi. Ini berarti jarak lokasi pemukiman yang paling dekat dengan pusat kegiatan ekonomi/pusat kegiatan kota perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki.	Melakukan perbaikan kondisi fisik lingkungan pemukiman di sekitar pusat kegiatan ekonomi kota/pusat kegiatan kota
	SOSIAL	- Kepadatan Penduduk sangat tinggi sebesar 357 jiwa/ha - Tingkat Pendidikan di lokasi studi berdasarkan dari isian kuisisioner 12 % tidak sekolah, 25 % hanya tamat SD, 30 % tamat SLTP dan 27 % yang tamat SLTA dan berdasarkan hasil perhitungan tingkat pendidikan terakhir penduduk total indek sebesar 1869 termasuk dalam klasifikasi tinggi,	- Perlu adanya pengawasan dari pihak instansi baik kelurahan, RW atau RT terhadap para pendatang yang masuk atau pindah dari lokasi studi untuk menghindari pertambahan jumlah penduduk - Membatasi izin tinggal bagi para pendatang - dilakukan program peningkatan kualitas pendidikan non formal berupa : - Kejar Paket A setara ijazah SD untuk penduduk yang tidak tamat SD/putus sekolah dan buta huruf - Paket B setara ijazah SMP untuk penduduk yang tidak tamat

Lokasi Prioritas	Variabel	Masalah	Penanganan
		masalah ini perlu mendapat penanganan karena di RT 4 sebagian besar penduduk berpendidikan rendah.	SMP. - Paket C untuk penduduk yang tidak tamat SMA Diharapkan semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan akan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan program perbaikan pemukiman kumuh
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan mata pencaharian total index sebesar 2033 termasuk dalam klasifikasi tinggi, ini berarti tingkat pengangguran di RT 4 masih tinggi sehingga perlu mendapatkan penanganan	▪ Perlu adanya pembekalan pemberian kursus/keterampilan kepada penduduk yang belum memiliki pekerjaan, agar siap untuk terjun ke dunia kerja
	EKONOMI	▪ Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pendapatan total index sebesar 880 termasuk dalam klasifikasi tinggi, ini berarti tingkat pendapatan di RT 4 masih rendah (18 % < Rp 150.000 dan 33 % berpenghasilan Rp 150.000 – Rp 1jt) sehingga perlu mendapatkan penanganan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	▪ Memberikan bantuan modal atau investasi kepada penduduk yang telah dibekali keterampilan tersebut
RT 6	FISIK	▪ Berdasarkan hasil perhitungan kondisi drainase di RT 6 tergolong dalam klasifikasi sedang dengan total index sebesar 181,82. ini berarti kondisi drainase juga perlu mendapat perbaikan sebelum kondisinya menjadi lebih buruk.	▪ Saluran drainase Tersier dikeruk untuk mengangkat gambut dan sampah sehingga bisa terjadi pertukaran air. ▪ Membuat saluran drainase sekunder (drainase tertutup) untuk tiap-tiap rumah berupa pipa yang langsung dihubungkan dengan saluran drainase tersier karena kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk dibuat saluran drainase untuk tiap-tiap blok perumahan dan agar limbah rumah tangga tidak dibuang langsung di sekitar hunian.
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan kondisi bangunan di RT 6 tergolong dalam klasifikasi sedang dengan total index sebesar 468,08. ini berarti kondisi bangunan temporer di RT 6 kondisinya sedang	▪ Melakukan kegiatan perbaikan rumah penduduk yang dianggap sudah tidak layak terutama rumah-rumah jenis temporer. ▪ Kegiatan perbaikan dilakukan dengan cara gotong royong oleh masyarakat sendiri ▪ Dana diperoleh dari swadaya masyarakat sendiri dan bantuan dari pemerintah
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan kondisi kepadatan bangunan di RT 6 tergolong dalam klasifikasi sedang dengan total index sebesar 419,4. ini berarti kerapatan bangunan sedang	▪ Membuat cerobong asap pada tiap-tiap dapur untuk rumah yang berdempetan ▪ Menyediakan hydrant untuk tiap-tiap rumah atau menyediakan

Lokasi Prioritas	Variabel	Masalah	Penanganan
		dan berdempetan jumlahnya hampir sama.	pompa air untuk RT.
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan pembuangan sampah di RT 6 tergolong dalam klasifikasi sedang dengan total index sebesar 1100. dan berdasarkan hasil kuisioner 30 % warga masih membuang sampah di sungai dan 30 % lagi membuang sampah disekitar hunian. Ini menunjukan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.	▪ Menyediakan tong sampah basah dan kering untuk masing-masing rumah ▪ Membuat tempat pembakaran sampah khusus (dalam drum) untuk membakar sampah mengingat lokasi studi rawan kebakaran.
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan sanitasi/MCK di RT 6 tergolong dalam klasifikasi Tinggi dengan total index sebesar 371,54. ini berarti kondisi sanitasi/MCK di RT 6 kondisinya buruk dan perlu mendapatkan perbaikan	▪ Perlu pembuatan sanitasi komunal berupa MCK umum dengan sistem septic tank yang dapat menampung sebanyak 40 % penduduk karena 40 % penduduk masih memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan akhir.
	SOSIAL	▪ Berdasarkan hasil perhitungan jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan / pusat kegiatan kota tergolong sedang dengan total index sebesar 409	▪ Melakukan perbaikan kondisi fisik lingkungan pemukiman di sekitar pusat kegiatan ekonomi kota/pusat kegiatan kota
		▪ Kepadatan Penduduk di RT 6 sebesar 349 jiwa/ha tergolong dalam klasifikasi tinggi	▪ Perlu adanya pengawasan dari pihak instansi baik kelurahan, RW atau RT terhadap para pendatang yang masuk atau pindah dari lokasi studi untuk menghindari pertambahan jumlah penduduk ▪ Membatasi izin tinggal bagi para pendatang
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pendidikan terakhir penduduk total index sebesar 1791 termasuk dalam klasifikasi tinggi, ini berarti tingkat pendidikan di RT 6 masih rendah sehingga perlu mendapatkan penanganan	▪ Dilakukan program peningkatan kualitas pendidikan non formal berupa : - Kejar Paket A setara ijazah SD untuk penduduk yang tidak tamat SD/putus sekolah dan buta huruf - Paket B setara ijazah SMP untuk penduduk yang tidak tamat SMP. - Paket C untuk penduduk yang tidak tamat SMA Diharapkan semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan akan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan program perbaikan pemukiman kumuh
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan mata pencaharian total index sebesar 1896 termasuk dalam klasifikasi sedang, ini berarti tingkat pengangguran di RT 6 masih cukup berpengaruh	▪ Perlunya pembekalan atau pemberian kursus/ketrampilan kepada penduduk yang belum memiliki pekerjaan tersebut agar siap untuk terjun ke dunia kerja

Lokasi Prioritas	Variabel	Masalah	Penanganan
		terhadap tingkat pendapatan penduduk sehingga perlu mendapatkan penanganan	
	EKONOMI	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pendapatan total index sebesar 873 termasuk dalam klasifikasi tinggi, ini berarti tingkat pendapatan di RT 4 masih rendah (17 % < Rp 150.000 dan 43 % berpenghasilan Rp 150.000 – Rp 1jt) sehingga perlu mendapatkan penanganan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	memberikan bantuan modal atau investasi kepada penduduk yang telah dibekali ketrampilan tersebut. Pemberian modal ini tidak sebatas kepada penduduk yang baru saja memiliki ketrampilan tetapi juga kepada penduduk yang dianggap mampu berwiraswasta dan ingin meningkatkan pendapatannya. Sehingga diharapkan pemberian modal tersebut dapat menjawab permasalahan rendahnya tingkat pendapatan penduduk yang sebanyak 60 % di RT 6
RT 12	FISIK	Berdasarkan hasil perhitungan kondisi Jalan di RT 12 tergolong dalam klasifikasi tinggi dengan total index sebesar 467. ini berarti kondisi jalan juga perlu mendapat perbaikan	- Jalan jembatan kayu yang berlubang/lapuk diganti dengan kayu ulin (kayu besi) atau bahan konstruksi yang kekuatannya sama seperti kayu ulin yang biayanya lebih murah seperti kayu galam dan blangiran. - Jalan tanah dilapis dengan perkerasan semen atau paving
		Berdasarkan hasil perhitungan kondisi drainase di RT 12 tergolong dalam klasifikasi tinggi dengan total index sebesar 200. ini berarti kondisi drainase juga perlu mendapat perbaikan	- Saluran drainase Tersier dikeruk untuk mengangkat gambut dan sampah sehingga bisa terjadi pertukaran air. - Membuat saluran drainase sekunder (drainase tertutup) untuk tiap-tiap rumah berupa pipa yang langsung dihubungkan dengan saluran drainase tersier.
		Berdasarkan hasil perhitungan kondisi bangunan di RT 12 tergolong dalam klasifikasi tinggi dengan total index sebesar 529,47. ini menunjukkan kondisi bangunan temporer di RT 12 kondisinya buruk.	- Melakukan kegiatan perbaikan rumah penduduk yang dianggap sudah tidak layak terutama rumah-rumah jenis temporer. - Kegiatan perbaikan dilakukan dengan cara gotong royong oleh masyarakat sendiri - Dana diperoleh dari swadaya masyarakat sendiri dan bantuan dari pemerintah
		Kerapatan bangunan: Total indek 460,88 termasuk dalam klasifikasi tinggi dan berdasarkan kuisisioner 61 % berdempetan sehingga mempengaruhi sirkulasi udara di dalam rumah dan rawan terhadap bahaya kebakaran karena sebagian besar rumah dari bahan kayu	- Membuat cerobong asap pada tiap-tiap dapur untuk rumah yang berdempetan - Menyediakan hydrant untuk tiap-tiap rumah atau menyediakan pompa air untuk RT. - Membatasi munculnya bangunan baru.
		Berdasarkan hasil perhitungan Tahun perkembangan	Melakukan perbaikan kondisi fisik lingkungan pemukiman untuk

Lokasi Prioritas	Variabel	Masalah	Penanganan
		kawasan kumuh di RT 12 tergolong dalam klasifikasi tinggi dengan total index sebesar 100. makin tua usia suatu kawasan menunjukkan buruknya potret kehidupan perkotaan sehingga menjadi prioritas untuk perbaikan.	memperbaiki image kota namun tetap memperhatikan nilai-nilai sejarah yang terdapat pada bangunan tersebut.
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan sumber air bersih total indek sebesar 664 termasuk dalam klasifikasi tinggi dan berdasarkan kuisioner 15 % warga yang tidak menggunakan PDAM masih menggunakan sumur yang tercemar air dari rawa karena kran umum sebagai fasilitas umum masih kurang	▪ Menambah fasilitas kran umum agar kebutuhan air bersih (memasak dan minum) warga bisa terpenuhi
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan penggunaan penerangan di RT 12 tergolong dalam klasifikasi tinggi dengan total index sebesar 285,71. (27 % penduduknya masih belum bisa menikmati listrik sebagai penerangan karena permasalahan ekonomi dan terbatasnya pasokan listrik di perkotaan Kuala Kapuas) ini menunjukkan pelayanan listrik masih terbatas	▪ Pemerintah memberikan bantuan genset yang dapat memenuhi kebutuhan 27 % penduduk, namun pemakaiannya dibatasi digunakan untuk malam hari ▪ Dana operasional dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan / pusat kegiatan kota tergolong tinggi dengan total index sebesar 475. ini berarti perlunya perbaikan lingkungan untuk kawasan yang jaraknya dekat dengan pusat kegiatan ekonomi kota / pusat kegiatan kota	▪ Melakukan perbaikan kondisi fisik lingkungan pemukiman di sekitar pusat kegiatan ekonomi kota/pusat kegiatan kota
	SOSIAL	▪ Kepadatan Penduduk di RT 12 sebesar 344 jiwa/ha tergolong dalam klasifikasi tinggi	▪ Perlu adanya pengawasan dari pihak instansi baik kelurahan, RW atau RT terhadap para pendatang yang masuk atau pindah dari lokasi studi untuk menghindari pertambahan jumlah penduduk ▪ Membatasi izin tinggal bagi para pendatang
		▪ Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pendidikan terakhir total indek sebesar 1455 termasuk dalam klasifikasi sedang dan berdasarkan dari isian kuisioner 6 % tidak sekolah, 18 % hanya tamat SD, 21 % tamat SLTP dan 48 % yang tamat SLTA.	▪ Dilakukan program peningkatan kualitas pendidikan non formal berupa : - Kejar Paket A setara ijazah SD untuk penduduk yang tidak tamat SD/putus sekolah dan buta huruf - Paket B setara ijazah SMP untuk penduduk yang tidak tamat SMP. - Paket C untuk penduduk yang tidak tamat SMA

Lokasi Prioritas	Variabel	Masalah	Penanganan
			Diharapkan semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan akan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan program perbaikan pemukiman kumuh
		Berdasarkan hasil perhitungan mata pencaharian total index sebesar 1855 termasuk dalam klasifikasi sedang, ini berarti tingkat pengangguran di RT 12 masih cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan penduduk sehingga perlu mendapatkan penanganan	perlunya pembekalan atau pemberian kursus/ketrampilan kepada penduduk yang belum memiliki pekerjaan tersebut agar siap untuk terjun ke dunia kerja
	EKONOMI	Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pendapatan total index sebesar 867 termasuk dalam klasifikasi tinggi, ini berarti tingkat pendapatan di RT 4 masih rendah (12 % < Rp 150.000 dan 42 % berpenghasilan Rp 150.000 – Rp 1jt) sehingga perlu mendapatkan penanganan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	memberikan bantuan modal atau investasi kepada penduduk yang telah dibekali ketrampilan tersebut. Pemberian modal ini tidak sebatas kepada penduduk yang baru saja memiliki ketrampilan tetapi juga kepada penduduk yang dianggap mampu berwiraswasta dan ingin meningkatkan pendapatannya. Sehingga diharapkan pemberian modal tersebut dapat menjawab permasalahan rendahnya tingkat pendapatan penduduk yang sebanyak 54 % di RT 12
RT 5		Berdasarkan hasil perhitungan dari 14 faktor di RT 5 menunjukan bahwa kondisi sanitasi / MCK masuk dalam klasifikasi sedang. Untuk mencegah kondisi sanitasi menjadi lebih buruk maka perlu dilakukan perbaikan.	Perlu pembuatan sanitasi komunal berupa MCK umum dengan sistem septic tank yang dapat menampung sebanyak 40 % penduduk karena 40 % penduduk masih memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan akhir.

Sumber : Hasil Analisa

4.2. Rekomendasi

Dilihat dari permasalahan yang terdapat di lokasi studi maka perlu adanya penanganan yang mampu mengakomodasi guna pengembangan lokasi studi kedepannya. Adapun rekomendasi perbaikan pemukiman kedepannya, antara lain :

- Berdasarkan kondisi yang ada serta hasil analisa maka cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui konsep yang berdasarkan pada 3 (tiga) aspek, meliputi sosial, ekonomi dan fisik. Sehingga dalam penanganan tersebut tidak ditinjau dari segi fisik saja tetapi aspek sosial-ekonomi juga sangat penting.
- Perencanaan sistem drainase di perkotaan Kuala Kapuas dipengaruhi oleh pasang surut, oleh karena itu perencanaan dan perbaikan drainase di perkotaan Kuala Kapuas perlu memperhatikan tinggi dan tipe pasang surut serta elevasi kawasan yang menjadi obyek drainase karena perkotaan Kuala Kapuas menggunakan sistem drainase kawasan.
- Penerbitan perijinan bangunan rumah tinggal sub standar oleh Dinas PU Kota Kuala Kapuas.
- Pembinaan penghunian perumahan melalui penyuluhan peraturan perundang-undangan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas sarana dan prasarana Kota Kuala Kapuas terhadap keluarga yang tinggal di perumahan yang dibangun sendiri/pengembang, baik swasta maupun pemerintah, agar tercapai budaya tertib penghunian perumahan.
- Berdasarkan karakteristik bangunan (kayu) dan perilaku bermukim, maka untuk selanjutnya perlu adanya studi tentang tipologi pemukiman kumuh berdasarkan karakteristik bermukim masyarakat di perkotaan Kuala Kapuas.
- Perlu adanya studi tentang tingkat partisipasi masyarakat untuk mengetahui aspirasi-aspirasi masyarakat dalam usaha penanganan pemukiman kumuh.

4.2. Rekomendasi

Dilihat dari permasalahan yang terdapat di lokasi studi maka perlu adanya penanganan yang mampu mengakomodasi guna pengembangan lokasi studi kedepannya. Adapun rekomendasi perbaikan pemukiman kedepannya, antara lain :

- Berdasarkan kondisi yang ada serta hasil analisa maka cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui konsep yang berdasarkan pada 3 (tiga) aspek, meliputi sosial, ekonomi dan fisik. Sehingga dalam penanganan tersebut tidak ditinjau dari segi fisik saja tetapi aspek sosial-ekonomi juga sangat penting.
- Perencanaan sistem drainase di perkotaan Kuala Kapuas dipengaruhi oleh pasang surut, oleh karena itu perencanaan dan perbaikan drainase di perkotaan Kuala Kapuas perlu memperhatikan tinggi dan tipe pasang surut serta elevasi kawasan yang menjadi obyek drainase karena perkotaan Kuala Kapuas menggunakan sistem drainase kawasan.
- Penerbitan perijinan bangunan rumah tinggal sub standar oleh Dinas PU Kota Kuala Kapuas.
- Pembinaan penghunian perumahan melalui penyuluhan peraturan perundang-undangan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas sarana dan prasarana Kota Kuala Kapuas terhadap keluarga yang tinggal di perumahan yang dibangun sendiri/pengembang, baik swasta maupun pemerintah, agar tercapai budaya tertib penghunian perumahan.
- Berdasarkan karakteristik bangunan (kayu) dan perilaku bermukim, maka untuk selanjutnya perlu adanya studi tentang tipologi pemukiman kumuh berdasarkan karakteristik bermukim masyarakat di perkotaan Kuala Kapuas.
- Perlu adanya studi tentang tingkat partisipasi masyarakat untuk mengetahui aspirasi-aspirasi masyarakat dalam usaha penanganan pemukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. (1992) *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, (1997) *Kamus Tata Ruang*, Edisi 1, Jakarta.
- Hidayati, Agustina Nurul., (1997) Dalam tesis; *Tipologi Kampung Kumuh di Kotamadya Malang*.
- Jayadinata, Johara T. (1999) *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan Dan Wilayah*, ITB, Bandung.
- Komarudin., (1997) *Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman*, Yayasan Realestat Indonesia - PT Rakasindo, Jakarta.
- Kuswartojo, Tjuk, dkk (2005) *Perumahan dan Permukiman di Indonesi*, ITB, Bandung
- Rakhmat, Jalaludin., (1998) *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung.
- Saaty. L. Thomas, (1991) *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Suhardjon, (1994) *Pengantar Reklamasi Rawa*, ITN Press, Malang
- Syamsudin (2002) *Statistik Deskriptif*, Surakarta: Muhamadiyah university press
- Yudohusodo, Siswono, dkk. (1991) *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990.
- Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/93 Tahun 1993.

Materi Internet

- [www.Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman](http://www.DirektoratJenderalPerumahanDanPermukiman), Bandung 3 september 2004
- [www.Demandiri Online_Siti Umajah Masjukri Program Pascasarjana UNAIR](http://www.DemandiriOnline_SitiUmajahMasjukriProgramPascasarjanaUNAIR), Surabaya Pdf 21 januari 2008
- www.kimpraswil.go.id/Ditjen_mukim/ensiklopedia/kumuh_miskin/sos_nomi_kumuh.pdf.
- www.kompas.com/kompas-cetak/0003/21/metro/mena19.htm (Selasa, 21 maret 2000).
- [www. Sulutlink.com/artikel/lingkungan 0814.htm-69k-](http://www.Sulutlink.com/artikel/lingkungan0814.htm-69k-)

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PENGANTAR

Dalam rangka usaha penulisan tugas akhir “Kondisi dan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh di Perkotaan Kuala Kapuas” saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi daftar pertanyaan yang saya sajikan, dengan harapan agar dapat memperoleh hasil penulisan tugas akhir yang lebih optimal sesuai dengan metode yang digunakan.

Atas kesediaan dan kesungguhan Bapak/Ibu/Saudara dalam memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Kapuas, Agustus 2008

Penulis

QUESTIONER

Quistioner ini hanya digunakan untuk mencari atau melengkapi data dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis dengan judul "Penentuan Prioritas Perbaikan Permukiman Kumuh di Kota Kuala Kapuas", dan seluruh informasi/data yang di peroleh akan menjadi dokumentasi pribadi dan tidak dipublikasikan.

Cara Mengisi Pertanyaan

Dalam pertanyaan ini diharapkan Bapak / Ibu / Saudara/I untuk mengisi dengan cara "Melingkari" jawaban yang akan di pilih. Jawaban yang anda pilih akan terjamin kerahasiaannya

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat : Jl RT. RW.
Kelurahan
3. Status Dalam Keluarga :
 a) Kepala keluarga c) Famili e) lain-lain
 b) Ibu Rumah Tangga d) Anak
4. Jumlah Anggota Keluarga: Orang

II. Data Fisik

1. Bagaimana Kondisi perkerasan jalan di lingkungan anda ?
 (a) Baik:..... (b) Buruk:.....
2. Apa jenis perkerasan jalannya?
 (a) Aspal (c) Tanah (d) Jembatan Kayu
3. Apakah di rumah anda terdapat drainase (parit/selokan) ?
 (a) Ada
 (b) Tidak Ada
4. Bila ada, bagaimana aliran airnya ?
 (a) Mengalir dengan Lancar
 (b) Tidak lancar
5. Adakah lubang angin (Ventilasi) dan jendela dalam rumah anda ?
 (a) Ada (b) Tidak Ada (c) Kurang
6. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga apa yang anda gunakan di rumah anda?
 (a) Sungai (c) Sanitasi Pribadi (septik teng)
 (b) MCK umum (d) Lain-lain,
 Sebutkan.....
7. Apakah terdapat penyekatan ruang di dalam rumah anda ?
 (a) Ada (b) Tidak ada
8. Jika ada terbagi dalam berapa ruang rumah anda ?
 (a) ≤ 3 ruang (c) 5 ruang (e) 6 ruang
 (b) 4 ruang (d) 6 ruang
9. A. Bagaimana pelayanan air bersih di lingkungan anda ?
 (a) Tidak terlayani (c) Terlayani
 (b) Kurang terlayani
 B. Dari manakah pelayanan sumber air bersih di rumah anda berasal ?

- (a) Sungai
 - (b) Pedagang air keliling
 - (c) Sumur
 - (d) Mata Air
 - (e) Kran Umum
 - (f) PDAM
- C. Bagaimana aliran sumber air bersih yang anda pakai :
- (a) Sering macet / mati
 - (b) Kotor / tercemar
 - (c) Kebutuhan air bersih sudah cukup (dari pedagang air)
 - (d) Kebutuhan air bersih sudah cukup sepanjang tahun.
 - (e) Lain-lain, Sebutkan :
- D. Jika anda memilih jawaban (a) dari pertanyaan diatas, maka berapa kali sumber air bersih yang anda pakai mengalami macet / mati dalam seminggu ?
- (a) kurang dari 2 kali
 - (b) Sekitar 3 – 4 kali
 - (c) Lebih dari 5 kali
 - (d) Lain-lain, Sebutkan :
10. Bagaimana kondisi bangunan / rumah anda ?
- (a) Permanen (bahan bangunan terbuat dari dinding plesteran semen dan Kayu)
 - (b) Semi permanen (terbuat dari kayu ulin dan bansau)
 - (c) Temporer (terbuat dari bahan yang mudah rusak, sejenis kayu garupuk dan pilau serta papan bekas)
11. Bagaimana jarak kerapatan bangunan / rumah anda dengan rumah tetangga terdekat anda ?
- (a) Kurang dari 5 meter
 - (b) Lebih dari 5 meter
 - (c) Berdempetan (tidak ada jarak sama sekali)
12. Rumah atau Tempat tinggal yang anda tempati saat ini adalah ?
- (a) Kontrakan / sewa
 - (b) Milik Saudara
 - (c) Milik Pribadi
 - (c) Milik Orang Tua
 - (d) Lain-lain, Sebutkan :
13. Bila jawaban anda a, Berapa nilai sewanya / bulan ?
- (a) $\leq$ Rp 150.000/ bulan
 - (b) Rp 150.000 – Rp 300.000/ bulan
 - (c) $\geq$ Rp 300.000/ bulan
14. Bila milik sendiri, bagaimana anda mendapatkan rumah ini ?
- (a) Membeli Kontan
 - (b) Membeli Kredit
 - (c) Warisan
 - (d) Diberi
 - (e) Lain-lain, Sebutkan :

III. Data Sosial

1. Apakah anda penduduk pendatang disini ?
 - (a) Penduduk Pendatang
 - (b) Penduduk Asli
2. Jika jawaban anda a, berasal dari mana anda sebelum tinggal disini ?
 - (a) Sekitar Kota Kuala Kapuas
 - (b) Luar Pulau :
3. Apabila anda pendatang, sudah berapa lama anda tinggal disini ?
 - (a) Kurang dari 5 tahun
 - (b) Sekitar 5 – 10 tahun
 - (c) Lebih dari 10 tahun
4. Yang menjadi alasan anda untuk tinggal disini ?
 - (a) Dekat dengan tempat kerja
 - (b) Dekat dengan keluarga
 - (c) Lain-lain, Sebutkan :

IV. Data Ekonomi

1. Apakah pekerjaan anda saat ini ?

(a) Menganggur	(e) Karyawan Swasta
(b) Pegawai Negeri Sipil	(f) Buruh pabrik
(c) Pedagang	(g) Pemulung
(d) Supir	(h) Lain-lain, Sebutkan :
2. Jarak antar rumah dengan pusat kota ?
 - a) Dekat (kurang dari 5 km)
 - b) Sedang (sekitar 5 – 10 km)
 - c) Jauh (lebih dari 10 km)
3. Berapa Jarak rumah anda dengan tempat kerja anda ?
 - (a) Dekat (kurang dari 5 km)
 - (b) Sedang (sekitar 5 – 10 km)
 - (c) Jauh (lebih dari 10 km)
4. Bagaimana cara anda menuju ke tempat kerja anda ?
 - (a) Jalan kaki
 - (b) Naik kendaraan umum (mikrolet, taksi, Bis)
 - (c) Naik kendaraan Pribadi (motor, sepeda)
5. Apakah anda memiliki pekerjaan tambahan / sampingan ?
 - (a) Ya
 - (b) Tidak
6. Bila ADA, apa pekerjaan tambahan / sampingan anda tersebut ?

(a) Buka warung (Pedagang)	(e) Supir
(b) Karyawan Swasta	(f) Lain-lain, Sebutkan.....
(c) Buruh pabrik	
(d) Pemulung	
7. Berapa Jarak rumah anda dengan tempat kerja tambahan / sampingan anda ?

(a) Dekat (kurang dari 5 km)	(c) Jauh (lebih dari 10 km)
(b) Sedang (sekitar 5 – 10 km)	(d) Tidak ada jarak
8. Bagaimana cara anda menuju ke tempat kerja tambahan / sampingan anda ?
 - (a) Jalan kaki
 - (b) Naik kendaraan umum (mikrolet, taksi, Bis)
 - (c) Naik kendaraan Pribadi (motor, sepeda)
9. Berapa pendapatan anda Per bulan ?
 - a) $\leq$ Rp 100.000,-/ bulan
 - b) Rp 100.000,- – Rp 500.000,-/ bulan
 - c) Rp 500.000,- – Rp 1 Juta,- / bulan
 - d) $\geq$ Rp 1 Juta,-/ bulan
10. Berapa pengeluaran anda Per bulan ?
 - a) $\leq$ Rp 150.000/ bulan
 - b) Rp 150.000 – Rp 300.000/ bulan
 - c) Rp 300.000 – Rp 1 Juta,- / bulan
 - d) $\geq$ Rp 1 Juta,-/ bulan

Mekanisme Perbaikan Berdasarkan Aspirasi masyarakat

1. Menurut anda apakah diperlukan sebuah penataan terhadap permukiman yang ada di pinggiran Sungai Brantas Kelurahan Kidul Dalem ini?
(a) Perlu (b) Tidak Perlu
2. Bila merasa Perlu, kira-kira apa alasan anda mengatakan perlu?
(a) Permukiman disini terlihat semrawut (kurang teratur)
(b) Permukiman disini bentuk bangunannya terlalu lama, perlu di modifikasi.
(c) Ingin Suasana permukiman yang baru
(d) Supaya permukiman disini terlihat Rapi dan Bersih
(e) Lainnya,
sebutkan:.....
3. Apakah anda setuju bila kondisi lingkungan yang ada di sekitar anda di perbaiki ?
(a) Setuju (b) Tidak Setuju
4. Bila Setuju, bantuan apa yang dapat anda sumbangkan ?
(a) Tenaga (d) Jawaban (a) dan (c) benar
(b) Pikiran (e) Tidak ada
(c) Uang/dana
5. Bila Tidak Setuju, sebaiknya apa yang harus dilakukan :
(a) Mengusulkan untuk relokasi (pemindahan) ke daerah yang lebih aman, nyaman, dan teratur (dengan program rumah murah/rumah susun).
(b) Tidak melakukan apa-apa
(c) Lain-lain,
Sebutkan:.....
6. Apakah anda setuju bila ada penyeragaman bentuk rumah?
(a) Setuju (b) Tidak Setuju
7. Bentuk bangunan / gaya rumah seperti apa yang anda sukai?
(a) tradisional dimana bahan bangunan semua terbuat dari kayu.
(b) Modern, dimana bahan bangunan semua terbuat dari beton.
(c) Gabungan keduanya.
(d) Rumah seperti di film-film
(e) Lainnya,
sebutkan:.....
8. Jika ada perbaikan kondisi rumah terlebih dahulu, menurut anda bagian apa yang harus diperbaiki pertama kali ?
(f) Ventilasi (d) Lantai
(g) Atap (e) Lain-lain, Sebutkan :
.....
(h) Tembok / dinding
9. Jika ada pengadaan sarana dan prasarana, menurut anda apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ?
(a) Penyediaan MCK (d) Perbaikan Drainase (parit/selokan)
(b) Penyediaan Air Bersih (e) Lain-lain, Sebutkan :
.....
(c) Penyediaan TPS (Tempat Pembuangan sampah Sementara)
10. Apakah anda setuju, jika perbaikan dari pemerintah berupa dana atau bahan material saja ?
(a) Setuju (b) Tidak Setuju

11. Apabila anda setuju, bagaimana cara pengerjaan yang akan anda lakukan ?
 - (a) Melakukan sendiri
 - (b) Menyewa pekerja
 - (c) Melakukan gotong royong atau swadaya dengan warga sekitar ?
 - (d) Lain-lain,
Sebutkan.....
12. Jika anda Tidak Setuju, apa yang anda lakukan ?
 - (a) Tidak melakukan apa-apa
 - (b) Lain-lain,
Sebutkan.....
13. Apakah anda setuju bila di lingkungan anda di lakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat :
 - (a) Setuju
 - (b) Tidak Setuju
14. Apabila anda setuju, pemberdayaan masyarakat yang bagaimana yang anda inginkan?
 - (a) Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat.
 - (b) Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pendekatan masyarakat mengenai pembangunan.
 - (c) Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan melalui tokoh masyarakat mengenai pentingnya lingkungan sehat.
 - (d) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lapangan usaha baru yang memacu tingkat ekonomi.
15. Apabila anda tidak setuju tentang adanya pemberdayaan masyarakat, kemudian apa yang akan anda inginkan :
 - (a) Perbaikan langsung dalam bentuk fisik saja, potensi masyarakat tidak perlu di tingkatkan.
 - (b) Lain-lain, Sebutkan
:.....

**Terima Kasih
Atas
Kerjasama Yang Anda Berikan**

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
 Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

QUISTIONER PRIORITAS PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH

Tujuan : Tujuan dari studi yang dilakukan adalah untuk Menentukan Prioritas Perbaikan Permukiman Kumuh

1. Nama Saudara/I :
2. Alamat : Jalan
RT/RW
Kelurahan
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
4. pendidikan :
 a. Tidak Sekolah/belum/Tidak/Tamat SD d. Belum/Tidak/Tamat Akademik
 b. Belum/Tidak/Tamat SLTP e. Belum/Tidak/Tamat Perguruan
 c. Beelum/Tidak/Tamat SLTSA tinggi
5. Pekerjaan saat ini :

Ikutilah petunjuk di bawah ini untuk mengisi pertanyaan quesioner :

Contoh Pertanyaan dan Jawaban:

Untuk mengatasi persoalan di daerah anda, anda diminta untuk membandingkan tingkat kepentingan antara tiga macam aspek yang dipergunakan dalam usaha menangani permasalahan di tempat anda (Aspek Fisik, Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi).

Bila anda membandingkan antara aspek Fisik, Perda dan Aspek kepentingannya dibandingkan dengan Sosial, maka jawaban anda dinyatakan sebagai

Aspek Fisik	1	2	3	4	5	6	7	8	(9)
Aspek Sosial – 1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional Malang
 Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang Telp. (0341) 567154

Intensitas Kepentingan / Derajat Penilaian
Antar Pasangan Faktor / Parameter

Intensitas Kepentingan	Definisi	Keterangan / Penjelasan
1	Sama penting	Kedua faktor tersebut memberikan dukungan yang sama pentingnya tujuan tertentu
3	Relatif agak penting terhadap lainnya	Telah nyata nampak pentingnya faktor tersebut dibandingkan dengan faktor lainnya tetapi tidak meyakinkan.
5	Perlu dan kuat kepentingannya	Jelas, nyata dan nampak terbukti bahwa beberapa peristiwa dan kriteria logis menunjukkan faktor tersebut dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya
7	Menyolok kepentingannya	Satu elemen dengan kuat disokong, dan <i>dominannya telah terlihat dalam praktek</i>
9	Mutlak penting	Jelas, nyata dan nampak terbukti secara meyakinkan dari beberapa peristiwa menunjukkan faktor tersebut sangat penting <i>dalam tingkat pemufakatan yang paling tinggi</i>
2,4,6,8	Nilai penengah antara dua pertimbangan diatas yang berdekatan	Jika diperlukan suatu penilaian yang kompromistis atas kedua faktor yang diperbandingkan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas <i>i</i> mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas <i>j</i> , maka <i>j</i> mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan <i>i</i>	

Sumber : Ketetapan Saat

PERTANYAAN

Faktor dasar penentu lokasi dalam menentukan Prioritas perbaikan permukiman kumuh

S Sosial

E Ekonomi

F Fisisk

1. Berikan penilaian perbandingan pasangan antara Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi sebagai kriteria di dalam menentukan prioritas perbaikan permukiman kumuh

S = Aspek Sosial

E = Aspek Ekonomi

Faktor S =	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor E =	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Berikan penilaian perbandingan pasangan antara Aspek Sosial dan Aspek Fisisk

S = Aspek Sosial

F = Aspek Fisik

Faktor S =	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor F =	1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. Berikan penilaian perbandingan pasangan antara Aspek Ekonomi dan Aspek Fisik

E = Aspek Ekonomi

F = Aspek Fisik

Faktor E =	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor F =	1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. Berikan penilaian perbandingan pasangan antara tingkat pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan ketenagakerjaan dengan pertimbangan Aspek Sosial (A)

S 1 = Tingkat Kepadatan Penduduk

S 2 = Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk

S 3 = Mata Pencarian

Faktor S 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor S 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor S 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor S 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor S 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor S 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Berikan penilaian perbandingan pasangan antara Faktor Aksesibilitas, Utilitas dan Kondisi Bangunan dengan pertimbangan aspek fisik (B)

B 1 = Jarak Lokasi Pemukiman dengan Pusat Kegiatan Ekonomi/Pusat Kegiatan Kota

B 2 = Utilitas

B 3 = Kondisi Bangunan

Faktor B 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor B 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor B 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor B 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor B 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor B 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9

6. Berikan penilaian perbandingan pasangan antara faktor Drainase, Pembuangan Sampah, Sanitasi, Air Bersih, Penerangan dan Kondisi jalan dengan pertimbangan kondisi utilitas (B 2)

D 1 = Drainase

D 2 = Pembuangan Sampah

D 3 = Sanitasi

D 4 = Air Bersih

D 5 = Penerangan

D 6 = Kondisi Jalan

Faktor D 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 4 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 5 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 1 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 6 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 4 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 5 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 2 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 6 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9

Faktor D 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 4 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 5 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 3 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 6 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 4 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 5 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 4 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 6 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 5 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faktor D 6 = 1	2	3	4	5	6	7	8	9

LAMPIRAN II
PROSES PERHITUNGAN NILAI PRIORITAS/BOBOT
FAKTOR PENENTU LOKASI

ferman. Ir.MT
BAG SAPRAS BAPEDA KAPUAS

	S	E	F
S	1	5/8	7/5
E	8/5	1	8/6
F	5/7	6/8	1

3 = 0,58

ktor Penentu	S	E	F	Ev	Vp	VA	X (VA/VP)	λ Max	CI	CR
SOSIAL	1	0,63	1,4	0,96	0,313	0,948	3,028	3,03	0,01	0,03
EKONOMI	1,6	1	1,33	1,29	0,421	1,276	3,031			
FISIK	0,714	0,75	1	0,81	0,266	0,805	3,030			
Jumlah	3,314	2,38	3,73	3,06	1	3,030	9,089			

R = 0,03 ≤ 0,10 (Ketetapan Saaty Terpenuhi)

= Sosial

= Ekonomi

= Fisik

	S1	S2	S3
S1	1	1	7/9
S2	1	1	6/8
S3	9/7	8/6	1

aktor Penentu	S1	S2	S3	Ev	Vp	VA	X (VA/VP)	λ Max	CI	CR
S1	1	1	0,78	0,92	0,304	0,913	3,00	3,00	0,00	0,00
S2	1	1	0,75	0,91	0,300	0,901	3,00			
S3	1,29	1,33	1	1,2	0,396	1,187	3,00			
Jumlah	3,29	3,33	2,53	3,03	1	3,001	9,00			

CR = 0,00 ≤ 0,10 (Ketetapan Saaty Terpenuhi)

Ket : Sosial

1 = Kepadatan Penduduk

2 = Tingkat Pendidikan

3 = Ketenagakerjaan

	A	B	C
A	1	5/7	3/8
B	7/5	1	5/8
C	8/3	8/5	1

Ket : Fisik

A = Status Tanah

B = Utilitas

C = Kondisi Bangunan

aktor Penentu	A	B	C	Ev	Vp	VA	X (VA/VP)	λ Max	CI	CR
A	1	0,71	0,38	0,65	0,201	0,603	3,00	3,01	0,00	0,01
B	1,4	1	0,63	0,96	0,297	0,895	3,01			
C	2,67	1,6	1	1,62	0,502	1,514	3,02			
Jumlah	5,07	3,31	2,01	3,23	1,000	3,012	9,03			

CR = 0,01 ≤ 0,10 (Ketetapan Saaty Terpenuhi)

	B1	B2	B3	B4	B5	B6
B1	1	5/7	7/8	5/9	1	1
B2	7/5	1	1	5/9	7/5	7/5
B3	8/7	1	1	1	8/5	9/5
B4	9/5	9/5	1	1	9/5	9/4
B5	1	5/7	5/8	5/9	1	1
B6	1	5/7	5/9	4/9	1	1

RI 6 = 1,24

Faktor penentu	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Ev	Vp	VA	X(VA/Vp)	λ Max	CI	CR
B1	1	0,71	0,88	0,56	1	1	0,84	0,135	0,817	6,043	6,042	0,008	0,01
B2	1,4	1	1	0,56	1,4	1,4	1,07	0,172	1,044	6,060			
B3	1,14	1	1	1	1,6	1,8	1,22	0,196	1,192	6,067			
B4	1,8	1,8	1	1	1,8	2,25	1,54	0,248	1,499	6,044			
B5	1	0,71	0,63	0,56	1	1	0,79	0,127	0,768	6,039			
B6	1	0,71	0,56	0,44	1	1	0,75	0,121	0,725	6,001			
Jumlah	7,34	5,93	5,07	4,12	7,8	8,45	6,21	1	6,045	36,253			

CR = $0,02 \leq 0,10$ (Ketetapan Saaty Terpenuhi)

Ket : UTILITAS

B1 = Drainase

B2 = Pembuangan Sampah

B3 = Sanitasi

B4 = Air Bersih

B5 = Penerangan

B6 = Kondisi Jalan

	C1	C2	C3
C1	1	1	7/8
C2	1	1	8/6
C3	8/7	6/8	1

Penentu	D1	D2	D3	Ev	Vp	VA	X (VA/VP)	λ Max	CI	CR
D1	1	1	0,88	0,96	0,319	0,962	3,02	3,02	0,01	0,02
D2	1	1	1,33	1,10	0,365	1,104	3,02			
D3	1,14	0,75	1	0,95	0,316	0,953	3,02			
Jumlah	3,14	2,75	3,21	3,01	1,000	3,020	9,06			

0,02 ≤ 0,10 (Ketepatan Saaty Terpenuhi)

- Kondisi Bangunan
- Umur Kampung
- Kondisi Perumahan
- Kepadatan Bangunan

PERHITUNGAN NILAI BOBOT FAKTOR PENENTU

Faktor Penentu	Noferman .Ir.,MT	Ir Songep., M.Ars	Nur Kayani. BA	Johansah.,SP	Yan Satriansyah .,Sstp	Drs. Ferry Noah	Hendri.S.Lamon S.sos	Drs. Djumrinson	Drs Agustinus Babo. SH	Drs.Fajar Narang.
S	0,292	0,313	0,199	0,305	0,358	0,381	0,323	0,143	0,298	0,122
E	0,289	0,421	0,427	0,414	0,333	0,381	0,274	0,416	0,220	0,573
F	0,420	0,266	0,374	0,281	0,309	0,238	0,403	0,441	0,482	0,306
S1	0,341	0,304	0,294	0,164	0,384	0,376	0,355	0,197	0,294	0,376
S2	0,225	0,300	0,232	0,164	0,331	0,257	0,230	0,451	0,577	0,224
S3	0,434	0,396	0,474	0,672	0,285	0,367	0,416	0,352	0,129	0,400
A	0,185	0,201	0,333	0,222	0,333	0,283	0,498	0,214	0,136	0,137
B	0,495	0,297	0,320	0,505	0,333	0,380	0,243	0,258	0,578	0,240
C	0,32	0,502	0,347	0,273	0,333	0,336	0,259	0,528	0,285	0,623
B1	0,108	0,135	0,145	0,149	0,159	0,231	0,098	0,236	0,115	0,140
B2	0,219	0,172	0,138	0,165	0,140	0,155	0,192	0,103	0,202	0,132
B3	0,197	0,196	0,172	0,177	0,159	0,212	0,079	0,151	0,148	0,093
B4	0,160	0,248	0,182	0,252	0,209	0,167	0,100	0,139	0,125	0,137
B5	0,137	0,127	0,155	0,120	0,167	0,108	0,097	0,086	0,216	0,282
B6	0,179	0,121	0,209	0,137	0,165	0,127	0,335	0,286	0,194	0,217
C1	0,261	0,319	0,108	0,493	0,251	0,262	0,162	0,241	0,079	0,299
C2	0,370	0,365	0,104	0,296	0,361	0,396	0,192	0,391	0,339	0,414
C3	0,370	0,316	0,788	0,211	0,388	0,342	0,646	0,368	0,582	0,288

Sumber : Diolah dari Hasil Isian 10 Kuisisioner

S = Sosial

E = Ekonomi

F = Fisik

S1 = Kepadatan Penduduk

S2 = Tingkat Pendidikan

S3 = Ketenagakerjaan

A = Jarak Lokasi Pemukiman dengan Pusat Kegiatan Ekonomi/Pusat Kegiatan Kota

B = Utilitas

C = Kondisi Bangunan

B1 = Drainase

B2 = Pembuangan Sampah

B3 = Sanitasi

B4 = Air Bersih

B5 = Penerangan

B6 = Kondisi Jalan

C1 = Umur Kawasan Kumuh

C2 = Kondisi Perumahan

C3 = Kepadatan Bangunan

NILAI BOBOT FAKTOR PENENTU PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH

Faktor Penentu	SAMPEL										Nilai Bobot Faktor
	Noferman .Ir.,MT	Ir Songep., M.Ars	Nur Kayani. BA	Johansah.,SP	Yan Satriansyah .,Satp	Drs. Ferry Noah	Hendri.S.Lamon S.sos	Drs. Djumrinson	Drs Agustinus Babo. SH	Drs.Fajar Narang.	
X1	0,1	0,095	0,058	0,05	0,138	0,143	0,115	0,028	0,088	0,046	0,086
X2	0,066	0,094	0,046	0,05	0,119	0,098	0,074	0,065	0,172	0,027	0,081
X3	0,127	0,124	0,094	0,205	0,102	0,14	0,134	0,05	0,038	0,049	0,106
X4	0,289	0,421	0,427	0,414	0,333	0,381	0,274	0,416	0,22	0,573	0,375
X5	0,078	0,053	0,125	0,062	0,103	0,067	0,201	0,094	0,066	0,042	0,089
X6	0,022	0,011	0,017	0,021	0,016	0,021	0,01	0,027	0,032	0,01	0,019
X7	0,046	0,014	0,017	0,023	0,014	0,014	0,019	0,012	0,056	0,01	0,022
X8	0,041	0,015	0,021	0,025	0,016	0,019	0,008	0,017	0,041	0,007	0,021
X9	0,033	0,02	0,022	0,036	0,022	0,015	0,01	0,016	0,035	0,01	0,022
X10	0,028	0,01	0,019	0,017	0,017	0,01	0,009	0,01	0,06	0,021	0,020
X11	0,037	0,01	0,025	0,019	0,017	0,011	0,033	0,033	0,054	0,016	0,026
X12	0,035	0,043	0,014	0,038	0,026	0,021	0,017	0,056	0,011	0,057	0,032
X13	0,05	0,049	0,013	0,023	0,037	0,032	0,02	0,091	0,047	0,079	0,044
X14	0,05	0,042	0,102	0,016	0,04	0,027	0,067	0,086	0,08	0,055	0,057

Sumber : Diolah dari Hasil Isian 10 Kuisisioner

X1 = Kepadatan Penduduk

X2 = Tingkat Pendidikan

X3 = Ketenagakerjaan

X4 = Ekonomi

X5 = Jarak Lokasi Pemukiman dengan pusat Kegiatan ekonomi/kota

X6 = Drainase

X7 = Pembuangan sampah

X8 = Sanitasi

X9 = Air Bersih

X10 = Penerangan

X11 = Kondisi Jalan

X12 = Umur Kawasan Kumuh

X13 = Kondisi Perumahan

X 14 = Kepadatan Bangunan

PEMBUKTIAN PERHITUNGAN ANALISIS HIRARKI PROSES

RESPONDEN	FAKTOR FISIK	FAKTOR SOSIAL	FAKTOR EKONOMI	λ Max	CI	CR
erman.,MT	0,42	0,292	0,289	3,00	0	0
ngep.,M.Ars	0,266	0,313	0,421	3,00	0	0
ayani BA	0,374	0,199	0,427	3,00	0	0
isah.,SP	0,281	0,305	0,414	3,00	0	0
atriansyah.,Sstp	0,309	0,358	0,333	3,00	0	0
Ferry Noah	0,238	0,381	0,381	3,00	0	0
i.S.Lamon.,Ssos	0,403	0,323	0,274	3,00	0	0
Djumrinson	0,441	0,142	0,416	3,00	0	0
Agustinus Babo.SH	0,482	0,298	0,22	3,00	0	0
Fajar Narang	0,306	0,122	0,573	3,00	0	0
Rata-Rata	0,352	0,273	0,375			

RESPONDEN	S1	S2	S3	λ Max	CI	CR
erman.,MT	0,341	0,225	0,434	3,00	0	0
ngep.,M.Ars	0,304	0,300	0,396	3,00	0	0
ayani BA	0,294	0,232	0,474	3,00	0	0
isah.,SP	0,164	0,164	0,672	3,00	0	0
Satriansyah.,Sstp	0,384	0,331	0,285	3,00	0	0
Ferry Noah	0,376	0,257	0,367	3,00	0	0
ri.S.Lamon.,Ssos	0,355	0,23	0,416	3,00	0	0
Djumrinson	0,197	0,451	0,352	3,00	0	0
Agustinus Babo.SH	0,294	0,577	0,129	3,00	0	0
Fajar Narang	0,376	0,224	0,400	3,00	0	0
Rata-Rata	0,309	0,299	0,393			

RESPONDEN	A	B	C	λ Max	CI	CR
erman.,MT	0,182	0,182	0,329	3,00	0	0
ngep.,M.Ars	0,201	0,207	0,303	3,00	0	0
Kayani BA	0,333	0,32	0,347	3,00	0	0
nsah.,SP	0,222	0,305	0,273	3,00	0	0
Satriansyah.,Sstp	0,333	0,333	0,333	3,00	0	0
Ferry Noah	0,283	0,38	0,336	3,00	0	0
ri.S.Lamon.,Ssos	0,498	0,243	0,259	3,00	0	0
Djumrinson	0,214	0,258	0,528	3,00	0	0
Agustinus Babo.SH	0,136	0,578	0,285	3,00	0	0
Fajar Narang	0,137	0,240	0,623	3,00	0	0
Rata-Rata	0,254	0,365	0,381			

RESPONDEN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	λ Max	CI	CR
Ir.,Noferman.,MT	0,108	0,219	0,197	0,16	0,137	0,179	6,00	0	0
Ir.,Songep.,M.Ars	0,135	0,172	0,196	0,248	0,127	0,121	6,00	0	0
Nur Kayani BA	0,145	0,138	0,172	0,182	0,155	0,209	6,00	0	0
Johansah.,SP	0,149	0,165	0,177	0,252	0,12	0,137	6,00	0	0
Yan Satriansyah.,Sstp	0,159	0,14	0,159	0,209	0,167	0,165	6,00	0	0
Drs. Ferry Noah	0,231	0,155	0,212	0,167	0,108	0,127	6,00	0	0
Hendri.S.Lamon.,Ssos	0,098	0,192	0,079	0,1	0,097	0,335	6,00	0	0
Drs. Djumrinson	0,236	0,103	0,151	0,139	0,086	0,286	6,00	0	0
Drs. Agustinus Babo.SH	0,115	0,202	0,148	0,125	0,216	0,194	6,00	0	0
Drs. Fajar Narang	0,140	0,132	0,093	0,137	0,282	0,217	6,00	0	0
Nilai Rata-Rata	0,152	0,162	0,158	0,172	0,150	0,197			

RESPONDEN	C1	C2	C3	λ Max	CI	CR
Ir.,Noferman.,MT	0,261	0,370	0,370	3,00	0	0
Ir.,Songep.,M.Ars	0,319	0,365	0,316	3,00	0	0
Nur Kayani BA	0,108	0,104	0,788	3,00	0	0
Johansah.,SP	0,493	0,296	0,211	3,00	0	0
Yan Satriansyah.,Sstp	0,251	0,361	0,388	3,00	0	0
Drs. Ferry Noah	0,262	0,396	0,342	3,00	0	0
Hendri.S.Lamon.,Ssos	0,162	0,192	0,646	3,00	0	0
Drs. Djumrinson	0,241	0,391	0,368	3,00	0	0
Drs. Agustinus Babo.SH	0,079	0,339	0,582	3,00	0	0
Drs. Fajar Narang	0,299	0,414	0,288	3,00	0	0
Nilai Rata-Rata	0,248	0,323	0,430			



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Kiri 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAYAK JILID BUKU HITAM**

Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Regina Maria

NIM : 00.24.003

Judul Tugas Akhir : Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh
Perkotaan Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah

Tgl Sidang : 14 Maret 2009

Dinyatakan : **Layak / Tidak Layak**

Untuk Tugas Akhirnya dijadikan 'Buku Hitam' (Syarat Mengikuti Wisuda Sarjana tgl 16 Mei 2009) dengan catatan sebagai berikut :

Contoh :

- Materi kurang layak
- Metodologi kurang sesuai
- Apabila dirasa perlu, dapat menggunakan kertas terpisah.

Pembimbing I

(Ir. Wahyu Hidayat, MM, MBA)

Pembimbing II

(Ida Soewarni, ST)



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAYAK SIDANG KOMPREHENSIF**

Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : REGINA MARIA

NIM : 00 24 003

Judul Tugas Akhir : PEMENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN
PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
KUALA KAPUAS. KAL - TENG

Tgl Seminar : _____

Dinyatakan : **Layak / Tidak Layak**

Untuk Tugas Akhirnya dijadikan 'Buku Hitam' (Syarat Mengikuti Sidang
Komprehensif) dengan catatan sebagai berikut :

Contoh :

- Materi kurang layak
- Metodologi kurang sesuai
- Apabila dirasa perlu, dapat menggunakan kertas terpisah.

Pahami Karakter Perkotaan kuala kapuas → sehingga
menjadi dasar dalam Penelitian ini (terutama kawasan
permukiman kumuh)

Pembimbing I

Pembimbing II



PT BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN - 013/I. TA/4/2009
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

15 Januari 2009

Kepada Yth : Bpk. Sdr/i. Ir. Wahyu Hidayat., MM. MBA
Dosen Institut Teknologi Nasional

Di -
MALANG.

Dengan Hormat,

Kami dari Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang sedang mengembangkan perencanaan dari semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu / Bapak untuk membimbing Mahasiswa kami :

Nama : *Regina Maria*
NIM : *00.24.003*
Semester : XVII (tujuh belas)
Judul TA : *"Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh Perkotaan Kuala Kapuas".*

Sejak Tanggal : *10 September 2008 s/d 10 Maret 2009*

(Maksimum 6 bulan). Dalam masa pembimbingan tersebut, Ibu / Bapak didampingi oleh Pembimbing II dari Jurusan kami, yaitu :

Ida Soewarni, ST, untuk memudahkan penyamanan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut.

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

a.n. Dekan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Ub. Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

Agung Witjaksono., ST. MTP
NIP.Y. 1039 600 292



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK**

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN - 014/I. TA/4/2009
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth : Bpk. Sdr/i. **Ida Soewarni., ST**
Dosen Institut Teknologi Nasional

15 Januari 2009

Di -
MALANG.

Dengan Hormat,

Kami dari Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang sedang mengembangkan perencanaan dari semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu / Bapak untuk membimbing Mahasiswa kami :

Nama : **Regina Maria**
NIM : **00.24.003**
Semester : **XVII (tujuh belas)**
Judul TA : **"Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh
Perkotaan Kuala Kapuas".**

Sejak Tanggal : **10 September 2008 s/d 10 Maret 2009**

(Maksimum 6 bulan). Dalam masa pembimbingan tersebut, Ibu / Bapak didampingi oleh Pembimbing I dari Jurusan kami, yaitu :

Ir. Wahyu Hidayat., MM. MBA, untuk memudahkan penyamanan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut.

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

a.n. D e k a n
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Ub. Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

Agung Witjaksono., ST. MTP
NIP.Y. 1039 600 292



BERITA ACARA SIDANG KOMPRES
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2009
Judul : Penentuan Prioritas Perbaikan Pemukiman Kumuh Perkotaan Kuala Kapuas
Nama : Regina Maria
Nim : 00.24.003.

No	Penguji	Pertanyaan, Masukan dan Saran	Tanggapan	Paraf
1	Ir.Agustina Nurul Hidayati.,MT	1. Perbaiki BAB I: tinjauan pustaka 1.5 pada sub bab nya : - 1.5.1. fokus pada pemukiman kumuh dan kajian daerah rawa - 1.5.2. program perbaikan pemukiman kumuh. Dan berikan kesimpulan akhir dari masing-masing sub bab Serta sub bab 1.6. landasan penelitian sehingga didapat rumusan variabel yang sesuai dengan karakteristik kekumuhan daerah rawa. 2. Bab II: Kebijakan pemukiman yang ada di Bab II digunakan untuk rekomendasi bab IV	a) 1.5.1. Pemukiman Kumuh: ▪ Definisi dan ciri-ciri rumah kampung, rumah liar dan rumah kumuh. ▪ Kajian kumuh (slum dan squater) ▪ Pengertian kumuh ▪ Karakteristik pemukiman kumuh ▪ Kajian daerah rawa b) Perbaikan pemukiman kumuh yang pernah dilakukan di Indonesia ▪ Program perbaikan kampung/ <i>Kampung Improvement Program</i> (KIP) ▪ Program peremajaan lingkungan kumuh Masukan	

2	Mira Setiawati A.,ST	1. Gambaran umum BAB II : lingkup perkotaan Kuala Kapuas dulu kemudian mengerucut menjadi lingkup lokasi studi. 2. Pada kepadatan penduduk satuannya di modifikasi baru diterapkan pada lokasi studi 3. Bedakan sarana dan prasarana 4. kelas interval di cek lagi 5. tata tulis tabel searah bolak balik	- Masukan dan saran - Masukan dan saran - Masukan dan saran - Masukan dan saran	<i>Ethan</i>
3	Fanita Cahyaning Arie, ST	1. Latar belakang : belum kelihatan jelas endingnya bahwa betapa pentingnya perbaikan pemukiman kumuh di Kuala Kapuas 2. rumusan masalah dibuat point dari masalah yang ada di lokasi studi 3. Sasaran di cek lagi 4. Topografi diganti sama kelerengan	- Masukan dan saran - Masukan dan saran - Masukan dan saran	<i>Qulur</i>

Mengetahui :

Pembimbing I



Ir. Wahyu Hidayat.,MM.MBA

Pembimbing II



Ida Soewarni.,ST



JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN KUALA KAPUAS

Dosen Pembimbing : Pembimbing I: Ir Wahyu Hidayat.,MM.,MBA
Pembimbing II: Ida Soewarni., ST
Lembar Asistensi : SKRIPSI
Nama : REGINA MARIA
Nim : 00.24.003

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
	13-2-09.	• Per penimb. penentuan var dlm Ket. & tabel • Kelengkapan & jabarkan +	
	16-2-09.	Revisi dan Karakteristik ke Kumuhan → dg indikator Rex : Aus ts tingkat part Gipri Mary. dlm	
	17-2-09.	Pahami karakter perkotaan Kuala Kapas → shg mengad & dlm penelitian ini. (tentama Kwch permukiman kumuh) - Lanjut sidang !	
	18/2/09	- see SUBANG	

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura-gura 02
MALANG

PERBAIKAN SKRIPSI

Perbaikan dalam Seminar Skripsi tingkat Sarjana S1 Jurusan Planologi (Perencanaan Wilayah dan Kota) yang diadakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Maret '09

Perlu perbaikan pada skripsi atas nama:

Saudara : Regina Maria

NIM :

Perbaikan tersebut meliputi :

1. Bab I: 1.5 & 1.6 $\rightarrow$ rumusan variabel.
2. Bab II: Kebijakan $\rightarrow$ bab IV rekomendasi

Dosen Penguji



PERBAIKAN SKRIPSI

Perbaikan dalam Seminar Skripsi tingkat Sarjana S1 Jurusan Planologi (Perencanaan Wilayah dan Kota) yang diadakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 14 Maret '09

Perlu perbaikan pada skripsi atas nama:

Saudara : Regina Maria

NIM :

Perbaikan tersebut meliputi :

Kata pengantar → dgn dominant ucapan terima kasih, tuliskan harapan Anda thd. TA Anda
Lingkup Lokasi → Global dulu (Pertotaan) → Baru dikerucutkan ke Kelurahan terpilih
(jangan dibalik)
↳ Peta Kabupaten → Peta Pertotaan → Kelurahan terpilih. (lokasi)

Lingkup materi → cek dg tabel variabel (sama atau tdk) → output.
Penulisan tabel → Buat searah (walau beda halaman) shg mudah dibaca.

Bab II → Gambaran umum perkotaan (atau 12 kelurahan yg pr perumahan kumuh) dan
Bukan 2 kelurahan yg terpilih, karena proses pemilihan Kelurahan ada
di Bab III (hal 155)
Atau dibalik, proses pemilihan lokasinya di depan, baru penjelasan lokasi

Nilai dlm klasifikasi tdk boleh ada angka yg sama → bertingkat

Dosen Penguji

Bhaira

Mira Setiawati

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura-gura 02
MALANG

PERBAIKAN SKRIPSI

Perbaikan dalam Seminar Skripsi tingkat Sarjana S1 Jurusan Planologi (Perencanaan Wilayah dan Kota) yang diadakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 14 Maret '09

Perlu perbaikan pada skripsi atas nama:

Saudara : Regina Maria

NIM :

Perbaikan tersebut meliputi :

- Konsistensi pembahasan
- Ventilasi ?
- topografi ?
- Dasar penentuan indikator
- Pendekatan ?

Dosen Penguji

Fanita . C . A

Terima Kasih Bapa....

**Karena Masa depan Sungguh Ada
dan harapanmu tidak akan hilang**

**Engkau Membuat Segala Sesuatu
indah pada waktunya.....**



**Kemuliaan terbesar kita peroleh
Bukan karena tidak pernah jatuh
Tetapi karena kita mampu
untuk bangkit kembali
Saat terjatuh**



**Bukan Karna Kekuatan
Namun Roh mu ya... Tuhan
Ketika Ku Berdoa dan Percaya
Mukjizat itu menjadi Nyata**

*Aku percaya mentari itu ada,
bahkan ketika ia tidak memancarkan sinarnya
Aku percaya kasih itu ada,
bahkan ketika aku tidak dapat merasakannya,
Aku percaya tuhan itu ada,
bahkan ketika Dia diam*

To : My Lovely Family

To : Mamah & Papah..

Makasih.... mamah, Makasih.... Papah

Akhirnya gina Lulus...ss..ss... ☺

Makasih doa, dukungan dan semangat yang mamah & papah berikan buat gina.

Mamah...,Papah... Makasih atas cinta, kesabaran & kasih sayang yang mamah & Papah berikan buat Gina dari kecil sampai gina dewasa dan akhirnya... gina bisa memenuhi janji dan tanggung jawab gina, meskipun agak telat he..he..

Papah...Mamah.. Makasih.. karna selalu bisa menerima & memaafkan segala kesalahan gina selama ini.

Tangan kalian selalu terbuka buat memaafkan gina.

Kalian memang orang tua Terhebat buat gina...

Gina bangga punya kalian....

To : My Lovely Sister

Tere cacak brendy.. akhirnya, aku lulus wek..wek...

Bentar lagi kayaknya nyusul neh...

btw kangen juga neh sama ponakan q si Manda ndut...

Makacih ya doa & dukungannya.

Moga langgeng sm Agoes & jangan lupa traktirannya kalo ke Batu Licin.

Vero Grunyu... Makacih ya selalu doain Kk mu yang cantiq ini..

Tunggu aq nyau lah.. qt wisata kuliner lagi.

Btw jangan lupa diet. Inga... inga.. itu penting.

Tambi Paula... Makacih sudah pernah mengasuh Gin & selalu mendoakan gina.
Tambi.. mudahan barigas tarus lah... Tuhan Mampahayak.

Bue Tabak... Makasih Bue lah, mesti kita jarang ketemu & kumpul tapi gina yakin
bue pasti selalu mendoakan keberhasilan cucu-cucu bue..



To My Prince...

Akhimya Gina Lulu...

Hadiah Paling Berharga
Yang dapat dihadiahkan seseorang
Kepada orang lain
Adalah dorongan semangat yang diberikan dengan
lemah lembut

Ka Mecky... Makasih ya.. dorongan
dsemangat, Kasih sayang, Cinta & doa_nya..
Maaf ya.. Selama gina kerja skripsi suka
marah-marah & BT
Tapi.. Gina Salut, Ka Mcky emang penyabar....

Ka Mcky.. Gina Tunggu Janjinya...
Love U.. 😊

To: Para Dosen

- Dosen Pembimbing q :
Pak Wahyu.. Makacih ya dah meluangkan waktu bwt bimbingan, padahal regi tau bpk orang sibuk.. d mata regi bapak orang yang profesional.
Bu Ida.. regi bangga d bimbing sm bu ida, banyak pengalaman hidup yang regi dapat dari bu ida. Makacih ibu selalu mensuport regi ketika regi pernah mengalami kegagalan ...
Bu Ida.. regi suka liat ibu senyum..
- Bwt Dosen Penguji q:
Bu Nurul, Bu Fanita & Bu Mira.. maaf ya kalo regi sudah bwt kalian sebel..
Makasih sudah jadi team penguji q & masukan-masukan nya.
- Bwt dosen-dosen Planologi :
Pak Koko, Pak Arif, Pak Tri, Pak Budi, Pak Teguh, Pa Karno, Pak Agung, Pak Koni, Bu Nindya, Bu Lisa, Bu Titik, Bu Ika. Makasih bwt ilmu & pengetahuan yang sudah kalian berikan bwt regi.
- Mba Puji & Mb Virta.. Maaf ya.. udah merepotkan kalian.. Makasih bantuannya selama ini..

THE UNIVERSITY OF CHICAGO